

DAMPAK STRATEGI EKSTENSIFIKASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP DIMENSI STRUKTURAL DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER

(Studi di Dinas Pasar Kabupaten Jember)

SKRIPSI



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Asal

Hadiah

Klass

Pembelian

352

Terima

Tgl 8 JUN 2003

417

Oleh :

No. 1234

α

α.1

Joko Wiyono

96-1122

Pembimbing I

Drs Soeranto Soerantomo

Pembimbing II

Drs Anwar M Si.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2003

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kemudahan itu ada kesulitan yang lain. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah kamu berharap “
(Q.S. Al-A’raf 94, : 5-8)

"Penggawe becik punika gampang yen wis dilakoni, angel yen durung kelakonan, aras-arasen nglakoni, tur iku den lakonana mupangati badanira"

(Perbuatan baik itu mudah jika telah dilakukan, sulit jika belum dilakukan, malas melakukannya, dan itu lakukanlah agar bermanfaat bagi dirimu).
(R. Rangawarsita)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta :

1. Orang tua Bapak Dartomartono dan Ibu yang telah mencurahkan semua kasih sayang dan mengorbankan segala jerih payah untuk anak-anaknya.
2. Keluarga Mas Janto dan Mas Brotowinarno sekeluarga di Klaten, Mas Suryadi dan keluarga di Pekalongan.
3. Mas Harto dan Wahyono terima kasih atas motivasi dan dorongan yang selama ini kalian berikan.
4. Almamaterku tercinta.



PENGESAHAN

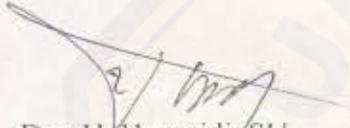
Diterima dan Dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negera

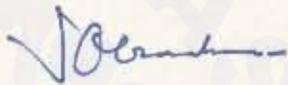
Pada Hari : Sabtu
Tanggal : 19 April 2003
Jam : 08.00 WIB

Panitia Penguji,

Ketua

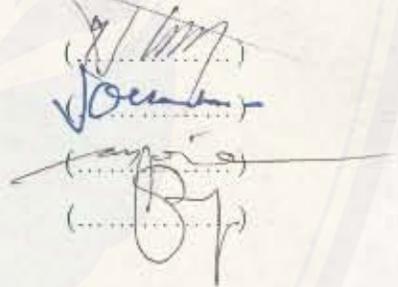
Sekretaris


Drs. H. Humaidi, SU
NIP. 130 261 662


Drs. Soeranto Soerantomo
NIP. 130 518 485

Anggota Tim Penguji :

1. Drs. H. Humaidi, SU
2. Drs. Soeranto Soerantomo
3. Drs. Anwar, M.Si
4. Drs. Agus Suharsono, M.Si


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T berkat rahmat dan hidayah-Nya,akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan ini untuk memenuhi salah satu kewajiban diantara beberapa kewajiban yang harus penulis penuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak maka penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardyanto, M.S.i selaku ketua Jurusan Administrasi FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Boediyono M.S.i. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Drs. Soeranto Soerantomo dan Bapak Anwar M.S.i. selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Drs. Agus Suharsono M.S.i. selaku Dosen wali.
6. Pimpinan dan staff Dinas Pasar Kabupaten Jember.
7. Rekan-rekan Kost-kost Kalimantan VIII/41; Gana dan Yesi, Rendra, Handy 'Batak', Sumidi, Tri, Puguh, Dali, Eko, Budi, V.J, Handoko, Akrom, Tulus dan Isti, Surip, Wawan dan Andri, Guntur, Miko, dan teman-teman di Agro 97 Arie (Iwuk), Nonik, Nurul Qomar.
8. Rekan-rekan seperjuangan di UKPKM Tegalboto/Tawang Alun: Wino, Gussan, Oryza, Abadi 'Selalu', Ani, Agre, Ratna, Luluk, Ririn, Herbert, Mas Pram, Herisakti, Hayie, Deni, Iwan, Nunus, Ronald, Sigit, Chimenk, Romdhi, Wawan, Mr. Idur. "Pencerahan Belum Selesai."
9. Rekan-rekan AN angkatan 96.
10. Rekan-rekan di BIOS Comp. Mas Anis, Mas Didik, Pak Min, Ali terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini.

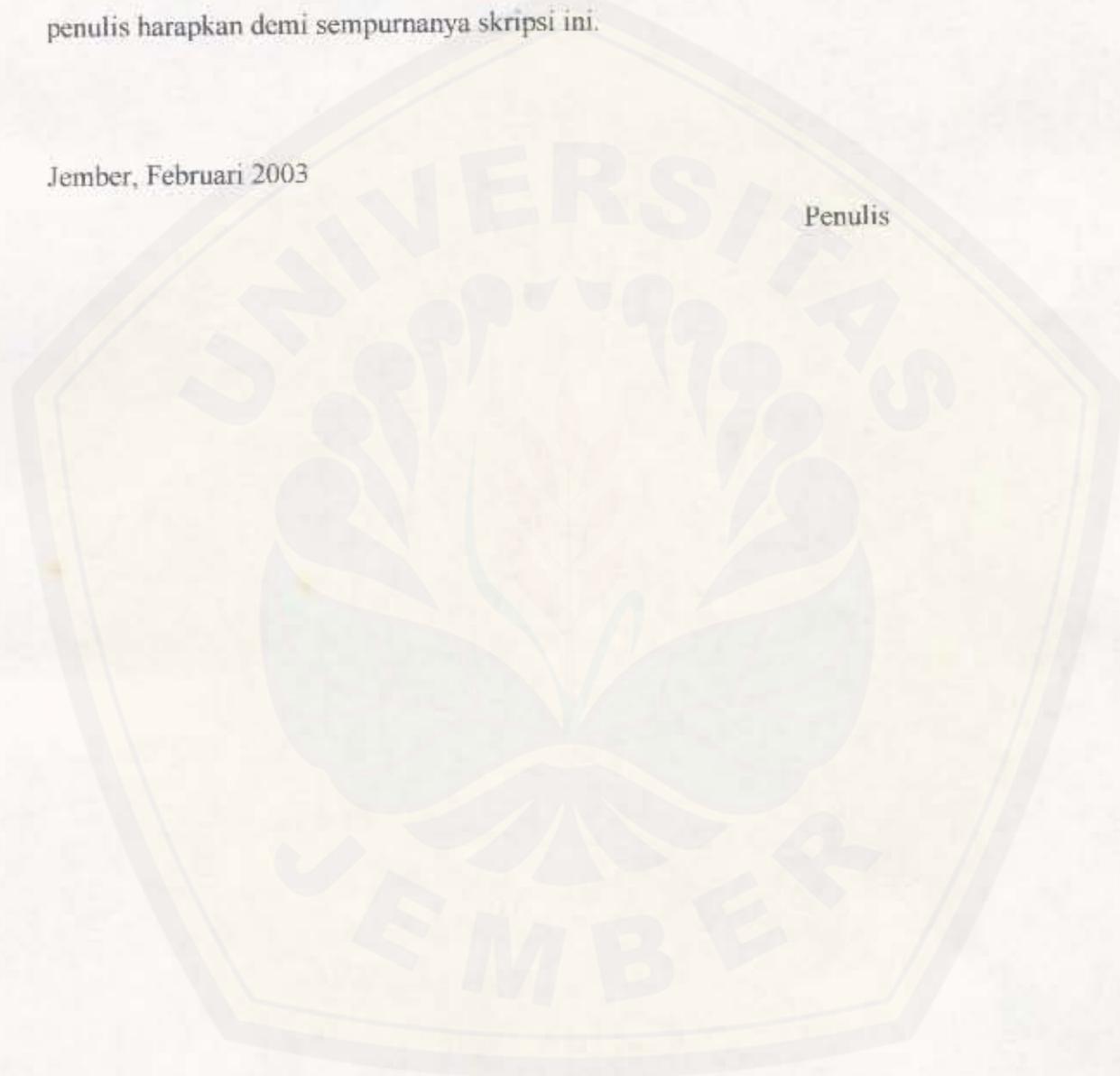
11. Rekan-rekan di HMI ; Yanto, Roni, Exiadri, Koko, Yasin, Asmuni, Zainal, Boli, Mamad, Deni, Dewi, Adri, Hariyanto terima kasih untuk pengalaman yang telah diberikan. Yakin Usaha Sampai.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu kritik dan saaran yang sifatnya membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Jember, Februari 2003

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1.3.1 Tujuan Penelitian	17
1.3.2 Kegunaan Penelitian	18
1.4 Kerangka Teori	18
1.4.1 Konsep Retribusi Daerah	18
1.4.2 Konsep Retribusi Pasar	24
1.4.3 Konsep Strategi Ekstensifikasi	28
1.4.4 Konsep Dimensi Struktur	35
1.5 Definisi Operasional	40
1.5.1 Tingkat Kompleksitas	40
1.5.2 Tingkat Formalisasi	41
1.5.3 Tingkat Sentralisasi	42
1.6 Metode Penelitian	42
1.6.1 Jenis Penelitian	42
1.6.2 Obyek Penelitian	43
1.6.3 Jenis Data	43
1.6.4 Metode Analisa Data	49

II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2.1 Pengantar	50
2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	50
2.3 Program Kerja Organisasi 2002	51
2.4 Wilayah Kerja Dinas Pasar	41
2.5 Susunan Organisasi	52
2.6 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	52
2.7 Tata Kerja	60
2.8 Bagan Susunan Organisasi	60

III. PEMBAHASAN

3.1 Dampak Strategi: Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar Terhadap Dimensi Struktural Dinas Pasar Kabupaten Jember	66
3.1.1 Tujuan Strategi: Ekstensifikasi	66
3.1.2 Dimensi Struktural	76
3.1.2.1 Kompleksitas	88
3.1.2.1.a Diferensiasi Horisontal	88
3.1.2.1.b Diferensiasi Vertikal	94
3.1.2.1.c Diferensiasi Spasial	98
3.1.2.2 Formalisasi	106
3.1.2.2.a Seleksi	106
3.1.2.2.b Peraturan	110
3.1.2.2.c Prosedur	116
3.1.2.2.d Pelatihan	120
3.1.2.3 Sentralisasi	130

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	142
4.2 Saran	143

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2001	5
Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1996/1997 s/d Tahun 2001.	7
Tabel 3 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Total Pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember	8
Tabel 4 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun Anggaran 1996/1997 s/d Tahun Anggaran 2001	9
Tabel 5 Rencana Program Ekstensifikasi Yang Dilakukan Oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2001 s/d 2005	11
Tabel 6 Data Geografi Unit Pasar yang Dikelola Oleh Dinas Pasar	13
Tabel 7 Tipologi Strategik Miles dan Snow	34
Tabel 8 Data Pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember Menurut Jabatan dan Golongan	61
Tabel 9 Data Pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember Menurut Bagian	62
Tabel 10 Data Pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember Menurut Jenis Pendidikan	62
Tabel 11 Data Pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember Menurut Masa Kerja	63
Tabel 12 Perolehan Pungutan dari berbagai Potensi Pungutan Retribusi Pasar di Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2000 s/d 2002	68
Tabel 13 Perkembangan Jumlah Pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Menurut Klasifikasinya dari Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2002	72
Tabel 14 Wilayah Kerja Mantri Pasar dalam Pengelolaan Pasar-Pasar di Kabupaten Jember	97
Tabel 15 Daftar Hari Pasaran dari Pasar Hewan yang Dikelola Dinas Pasar	98
Tabel 16 Rekapitulasi Data Kepegawaian Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2002	100
Tabel 17 Jumlah Pegawai yang Bekerja di Dinas Pasar Mulai Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2002	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Sumber-sumber Penerimaan Daerah	20
Gambar 2 Kerangka Kerja Untuk Menganalisis Teori Organisasi	29
Gambar 3 Strategi Imperative	31
Gambar 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember	59
Gambar 5 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember Menurut Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000	76
Gambar 6 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember Menurut Perda Nomor 85 Tahun 2000	79
Gambar 7 Bagan Struktur Organisasi yang Diterapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember	82
Gambar 8 Struktur Organisasi Pengelolaan Unit Pasar oleh mantri Pasar Di Dinas Kabupaten Jember	85
Gambar 9 Alur Proses Penjaringan Pemungutan dan Penyetoran Pendapatan Retribusi Pasar Dinas Pasar Kabupaten Jember	114



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Program Tahun 2001 - Tahun 2005 Dinas Pasar Kabupaten Jember
- Lampiran 2 Target dan Realisasi Target Perolehan Penerimaan Retribusi Pasar untuk Jenis Pungutan Pasar Umum di Tiap Unit Pasar di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000 dan 2001.
- Lampiran 3 Tarif retribusi pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember
- Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Unej
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember
- Lampiran 6 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari Dinas Pasar Kabupaten Jember



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian otonomi dalam ketatanegaraan sangat erat kaitannya dengan desentralisasi, bahkan diantara keduanya diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Dari sisi pemerintah pusat dilihat adalah penyelenggaraan desentralisasi, sedangkan dari sisi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan otonomi.

Disamping itu otonomi juga mempunyai dua pengertian. Pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dapat pula berupa pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Selanjutnya daerah diberi untuk mengurus urusan dan kepentingannya sendiri. Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas otonomi dapat dimaksudkan adalah pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada diluar pemerintahan pusat.

Secara konseptual, tujuan otonomi daerah adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat, agar tercapai pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan persatuan dan kesatuan, serta lebih meningkatkan pedemokrasian.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan wujud penerapan asas desentralisasi bagi berfungsinya satu sistem pemerintahan yang modern. Berbagai alasan mengapa otonomi tingkat II menjadi sangat penting antara lain : *Pertama*, pelaksanaan pelayanan publik dalam kondisi sumber daya yang semakin terbatas dan langka. *Kedua*, semakin tingginya tingkat ketergantungan Daerah Tingkat II terhadap Pemerintahan Pusat dan juga kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam bidang pembangunan.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah mengakhiri suatu era pemerintahan daerah yang sentralistik dibawah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Bentuk otonomi yang diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Secara empiris otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yang telah diterapkan selama dua puluh lima tahun itu ternyata tidak memenuhi harapan.

Kecenderungan yang kuat adalah sentralistik yang menempatkan pemerintah daerah sebagai agen (*agency model*). Pemerintah Pusat memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan kebijakan dan pengaturan secara seragam peyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam keterbatasan wewenang untuk penetapan kebijakan, Pemerintah Daerah menjadi kurang efektif dalam mengemban misinya meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Disamping itu, otonomi yang nyata dan bertanggungjawab menekankan segi kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu variable penting dalam menilai kemampuan otonomi. Pada aspek ini kecederungan yang kuat adalah hubungan keuangan yang tidak realitis antara pusat dan daerah yang tidak seimbang. Ketergantungan daerah yang sangat kuat pada sumber-sumber penerimaan dari pemerintahan pusat dan kecilnya sumbangan pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah. Kondisi kemampuan pembiayaan yang sangat lemah itu meyebabkan ketidakberdayaan daerah dalam membangun daerahnya. Pemerintahan pusat telah mengintervensi kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan penguasaan sumber-sumber pembiayaan secara dominan.

Lebih lanjut E. Koswara (1998 : 166) memberikan penilaiannya terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah selama ini sebagai berikut :

Selama ini, hampir tidak tampak adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemampuan menggali sumber keuangan daerah karena sebagian besar penerimaan daerah didasarkan kepada alokasi bantuan pusat. Selain itu, pengendalian dari pusat terhadap penggunaan dana bantuan ini sangat ketat sehingga keleluasaan (*discretion*) pemerintahan daerah untuk berprakarsa, menentukan

prioritas, dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya dibatasi (*restricted*) oleh intruksi dan petunjuk dari pusat.

Ini adalah kontroversi antara restriksi dan diskresi yang tidak berujungpangkal yang membelit manajemen pembangunan daerah, menjadikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan titik berat daerah tingkat II tidak dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penataan format baru hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah dibawah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 prospek otonomi kedepan tampaknya relatif akan lebih baik. Format baru struktur keuangan Pemerintah Daerah itu lebih diarahkan pada terciptanya kemandirian daerah dengan meletakkan suatu prinsip pemberian otonomi yang luas dan utuh. Bentuk otonomi yang luas diharapkan lebih menjamin kesatuan, karena selain menjawab tuntutan yang menguat atas pemerintahan yang lebih otonom, sebagian masalah-masalah terselesaikan pada tingkat lokal, juga akan memberi kemampuan yang besar kepada pemerintahan pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang berskala nasional dan kemampuan kompetitif dalam skala global yang sarat dengan kompetisi.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien sangat tergantung pada tersedianya sumber daya pendukungnya. E. Koswara (1998:160) memberikan pendapatnya berkaitan dengan arti penting sumber daya dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai berikut :

Sumber daya sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pada hakekatnya merupakan suatu tujuan politik yang sangat mendasar, karena peranannya dalam menentukan bobot kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut Daan Sugandha (1981:83) mengemukakan :

Agar tiap daerah dapat melaksanakan peyelenggaraan urusan-urusan yang diterimanya, maka daerah harus mempunyai keuangannya sendiri. Sudah tentu keuangan ini harus demikian rupa hingga mampu menutup kebutuhan pembiayaan tugas yang telah menjadi urusannya.

Sedangkan keuangan daerah sendiri seperti dikemukakan oleh D.J. Mamesah (1995:16), merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 merupakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan dalam rangka negara kesatuan. Mencakup pembagian keuangan antara pusat dan daerah, pemerataan daerah secara proporsional dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan termasuk pengawasannya.

Berdasarkan ketentuan UU No. 25/1999 (pasal 3), yang termasuk sumber-sumber pendapatan daerah yaitu;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:
 - a. hasil pajak daerah
 - b. hasil retribusi daerah
 - c. hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan dana perimbangan yang terdiri atas:
 - a. bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam dengan persentase tertentu.
 - b. dana alokasi umum
 - c. dana alokasi khusus

Dan yang termasuk sumber-sumber pendapatan non (asli) daerah yaitu;

1. Subsidi / bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan
2. Pinjaman Daerah
3. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember sendiri untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2001 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2001. (dalam ribu rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran					
		1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001
1	Pajak Daerah	3.459.199	3.600.844	3.699.583	5.408.902	5.015.314	7.161.840
2	Retribusi Daerah	6.124.769	6.967.387	9.747.856	11.239.034	9.195.041	14.086.001
3	Laba BUMD	4.237.476	1.669.413	2.319.428	8.177.515	2.262.633	2.234.400
4	Penerimaan Dinas	881.836	1.030.162	-	-	-	-
5	Penerimaan Lain-lain	344.792	749.499	4.374.492	786.461	1.005.612	2.897.200
Total PAD		15.048.075	14.017.30	20.141.359	25.611.912	17.478.600	26.469.441

Sumber : Dipenda Kabupaten Jember tahun 2001

Dari komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember diatas menunjukkan bahwa sumbangan dari sektor retribusi ternyata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember, yakni sebesar 48% dan mengalami perkembangan rata-rata 17,3% selama tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2001. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nick Devas (1982:31) :

Bagi pemerintah daerah tingkat II penerimaan dari berbagai retribusi dua kali lipat lebih penting daripada penerimaan hasil pajak.

Masih menurut Nick Devas (1982:31) :

Pendapatan asli daerah sendiri terdiri atas pajak daerah (23%), pungutan jasa (49%), iuran dan penerimaan dari dinas daerah (9%), laba perusahaan daerah (2%), penerimaan pembangunan (8%) dan penerimaan lain-lain (9%).

Pendapat diatas memberikan suatu gambaran bahwa sektor retribusi daerah menyumbang hampir lima puluh persen dari total pendapatan asli daerah. Selain itu retribusi juga memiliki berbagai keunggulan-keunggulan bila dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah dari sektor yang lain, khususnya

sektor pajak. Josef Riwo Kaho (1985:155) menyebutkan keunggulan-keunggulan retribusi tersebut antara lain :

1. Kekembaran dalam lapangan pajak tidak diperbolehkan sedangkan dalam retribusi kekembaran itu diperkenankan.
2. Pemungutan pajak sedikit banyak didasarkan pada paksaan dengan melalui perundan-undangan, sedangkan pungutan retribusi didapat pada pemberian jasa kepada pemakai jasa.
3. Pajak daerah dibayar oleh orang-orang tertentu, yaitu para wajib pajak tetapi retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah, baik anak-anak, orang dewasa dan sebagainya.
4. Pada umumnya pajak dikenakan satu tahun sekali, pembayarannya dapat dilakukan sekaligus, akan tetapi kadang-kadang dapat pula dicicil. Pungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali terhadap seseorang sepanjang ia berulang kali pula menikmati jasa yang telah disediakan. Karena retribusi biasanya kecil, maka pembayarannya jarang diangsur.

Di pemerintahan daerah banyak terdapat jenis retribusi, Pemerintah Kabupaten Jember sendiri mengelola sebanyak 29 macam retribusi. Tabel berikut ini menyajikan target dan realisasi dari kedua puluh sembilan macam retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember selama tahun anggaran 2001.

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2001

No	Jenis Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Prosentase
1	Pelayanan Kesehatan	9.415.000.000	9.337.559.629	98,82
2	Pelayanan Persampahan	72.000.000	136.934.470	190,19
3	Cetak KTP dan AKte Cat. Sipil	20.000.000	235.871.500	1.179,36
4	Pelayanan Pemakaman	500.000	500.000	100
5	Parkir Kendaraan	510.596.000	532.922.200	104,37
6	Pasar	1.800.000.000	1.926.424.245	107,02
7	Air Bersih	0,00	0,00	0,00
8	Pemeriksaan Alat PMK	1.500.000	2.500.000	166,67
9	Pengg. B. Cetak Peta	0,00	0,00	0,00
10	Pemakaian Kekayaan Daerah	67.000.000	76.110.280	113,60
11	Pertokoan	10.000.000	11.713.387	117,13
12	Terminal	525.000.000	571.021.800	108,77
13	Tempat Parkir Khusus	0,00	0,00	0,00
14	Tempat Penitipan Anak	0,00	0,00	0,00
15	Tempat Penginapan	172.500.000	165.000.000	95,65
16	Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
17	Tempat Potong Hewan	113.000.000	112.943.000	99,95
18	Tempat Pendaf. Kapal	0,00	0,00	0,00
19	Tempat Rekreasi	128.000.000	136.200.900	106,41
20	Penyeberangan di Atas Air	0,00	0,00	0,00
21	Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00
22	Penj. Produksi U. Daerah	47.000.000	55.172.000	116,15
23	Ijin Pengg. Tanah	0,00	0,00	0,00
24	Ijin Tempat Penj. Min. Alkohol	0,00	0,00	0,00
25	IMB	205.000.000	307.922.997	150,21
26	Ijin Trayek Kendaraan	18.000.000	19.167.500	106,49
27	Pengambilan Hasil Kayu	0,00	0,00	0,00
28	Jasa Tunggu	435.000.000	451.537.600	103,80
29	Ijin Gangguan	6.000.000	6.449.300	108,32
	Jumlah	13.546.596.000	14.086.000.808	103,98

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2002

Dari Kedua puluh sembilan jenis retribusi diatas Retribusi dari sektor retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar. Penerimaan retribusi pasar menduduki urutan kedua dalam hal penerimaan retribusi daerah.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nick Devas (1989:92) sebagai berikut :

Peningkatan penerimaan retribusi daerah ini tidak terlepas dari beberapa retribusi yang mempengaruhi seperti retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, terminal dan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB). Keempat retribusi ini menyumbangkan hampir 50% dari penerimaan retribusi daerah.

Dari pendapat diatas tampak bahwa retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan guna menopang keuangan daerah dimasa depan. Kontribusi retribusi pasar terhadap total pendapatan retribusi di Kabupaten Jember dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III Kontribusi Retribusi Pasar terhadap total pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember tahun anggaran 1996/1997 s/d tahun 2001

No	Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Daerah	Penerimaan Retribusi Pasar	Prosentase (%)	Prosentase rata-rata
1	1996/1997	6.124.769.000,00	1.125.419.443,00	18,37	16,26
2	1997/1998	6.967.387.000,00	1.320.798.605,00	18,96	
3	1998/1999	9.747.856.000,00	1.476.426.270,00	15,15	
4	1999/2000	11.239.034.000,00	1.634.146.980,00	14,54	
5	2000	9.195.041.100,00	1.317.383.945,00	14,33	
1	2001	13.240.495.658,00	1.926.424.245,00	14,55	

Sumber data diolah tahun 2002

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor retribusi pasar mampu menyumbangkan penerimaan sebesar 16,26 % terhadap total penerimaan retribusi Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 1996/1997 s/d 2001. Jadi penerimaan dari sektor retribusi daerah akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan dari retribusi pasar. Prosentase dari retribusi pasar terhadap penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu tahun 1998/1999 s/d 2001 cenderung menurun dibandingkan tahun anggaran sebelumnya disebabkan semakin meningkatnya penerimaan retribusi dari pos-

pos lainnya, namun demikian pos penerimaan dari retribusi pasar tetap menduduki peringkat kedua terhadap sumbangan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jember.

Dalam kaitannya dengan penerimaan retribusi pasar tidak dapat dipisahkan dari peranan Dinas Pasar sebagai bagian dari unsur administratif dari organisasi pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pasar Kabupaten Jember mempunyai tujuan melakukan kerjasama dengan pengguna pasar (masyarakat) dan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi pasar. Upaya pemungutan retribusi pasar dalam tahun-tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Hal ini akan terlihat dalam tabel empat berikut ini.

Tabel IV Target dan Realisasi Retribusi Tahun Anggaran 1996/1997 Sampai Dengan Tahun 2001

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	1996/1997	1.125.000.000,00	1.125.419.443,00	108,93
2	1997/1998	1.240.000.000,00	1.320.798.605,00	106,52
3	1998/1999	1.431.250.000,00	1.476.426.270,00	103,16
4	1999/2000	1.514.000.000,00	1.634.146.980,00	107,94
5	2000	1.249.050.000,00	1.317.383.945,00	105,47
6	2001	1.800.000.000,00	1.926.424.245,00	107,02

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2002

Dari data kinerja target dan realisasi diatas menunjukkan bahwa Dinas Pasar Kabupaten Jember, selama kurun waktu enam tahun perolehan penerimaan retribusi pasar selalu melampui target yang dibebankan.

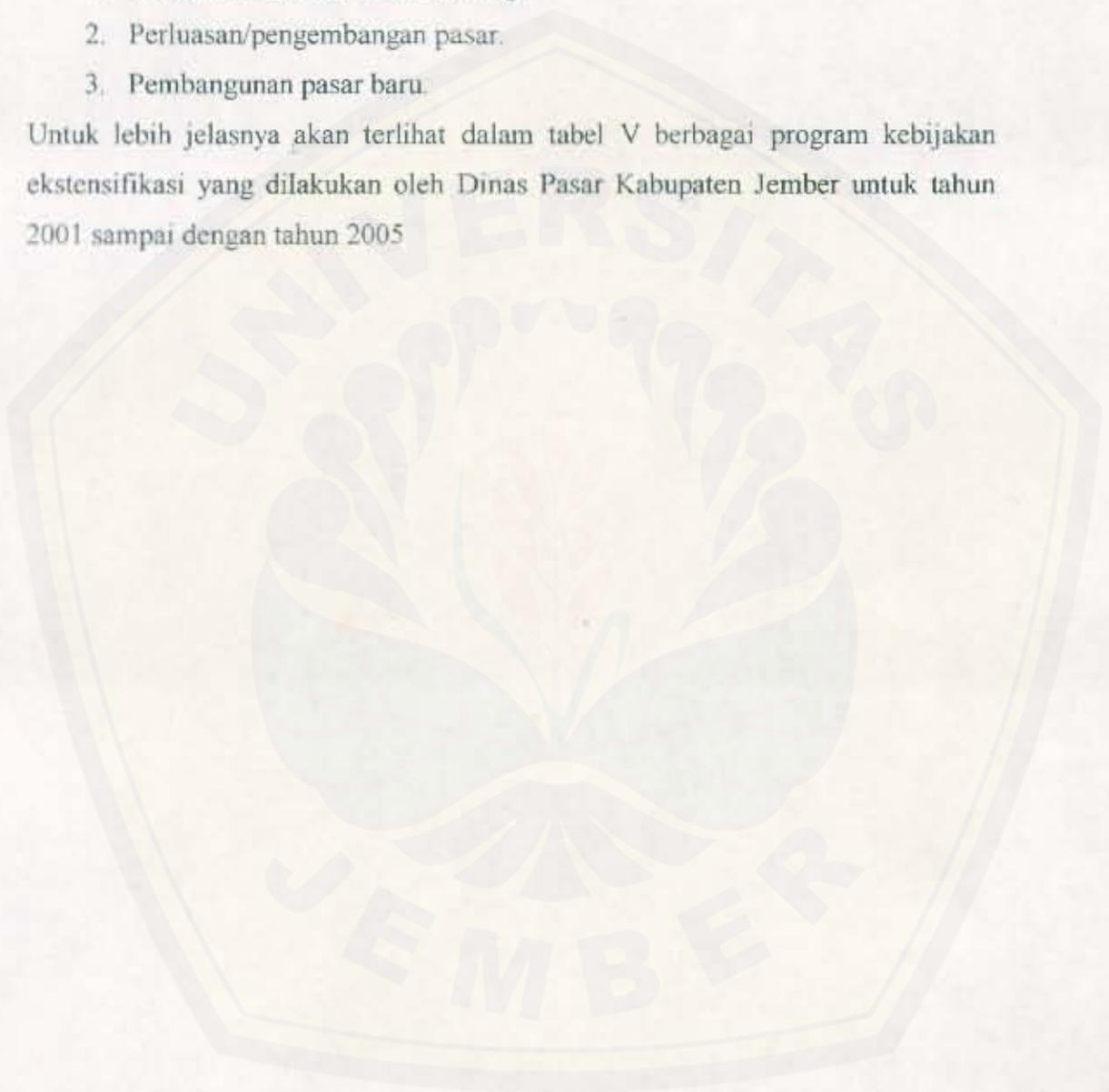
Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember menuntut agar penerimaan dari retribusi pasar ini ditingkatkan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, pungutan retribusi pasar sangat potensial digali dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dinas Pasar Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan dalam rangka

meningkatkan penerimaan retribusi pasar ini melalui kebijakan ekstensifikasi pungutan retribusi.

Ekstensifikasi pungutan retribusi pasar untuk peluang dan peningkatan pendapatan berupa;

1. Pemanfaatan lahan-lahan kosong.
2. Perluasan/pengembangan pasar.
3. Pembangunan pasar baru.

Untuk lebih jelasnya akan terlihat dalam tabel V berbagai program kebijakan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005



Tabel V Rencana Program Ekstensifikasi yang Dilakukan Oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2001 s/d 2005

No	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Alokasi Kebutuhan Biaya
		Bulan	Tahun	
1	Perluasan pasar			
	a. Pasar Kalisat	Juni	2001 dan 2002	Rp 250.000.000;
	b. Pasar Mangli			
	Tanah	Maret	2002	Rp 400.000.000;
	Fisik	Maret	2002, 2003 dan 2004	Rp 350.000.000;
	c. Pasar Kepatihan			
	Tanah	Juni	2002	Rp 700.000.000;
	Fisik	Juni	2003	Rp 350.000.000;
	d. Pasar Sempolan			
	Fisik	Juni	2001	Rp 100.000.000;
Tanah	Maret	2002	Rp 150.000.000;	
Fisik	Juni	2003	Rp 250.000.000;	
2	Pembuatan Pasar Baru			
	a. Bungur			
	Tanah	Juni	2001	Rp 450.000.000;
	Fisik	Juni	2002	Rp 500.000.000;
	b. Pasar Hewan Gladak Pakem			
	Tanah	Juni	2001	Rp 500.000.000;
Fisik	Juni	2003	Rp 750.000.000;	
3	Peningkatan Fisik Pengembangan Lantai Pasar Tanjung	Juni	2002	Rp 450.000.000;
	Porselinasi Lt. I, Lt. II Pasar Tanjung	April	2003 dan 2004	Rp 200.000.000;
	Pemanfaatan Lahan Kosong			
4	a. Pemanfaatan Lahan kosong	Juni	2001 s/d 2005	-----
	b. Perbaikan Los	Juni	2001 dan 2002	-----

Sumber Dinas Pasar Kabupaten Jember 2002

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi usaha ekstensifikasi ini. Berikut adalah alasan-alasan tersebut ;

- A. Perhitungan antara potensi, proyeksi target dan realisasi target yang sudah mencapai titik optimal (untuk lebih jelas lihat tabel IV).
- B. Prediksi perhitungan rencana target pendapatan retribusi pasar tahun anggaran 2002s/d 2006. Berikut ini adalah data potensi dalam proyeksi kemampuan penyerapan pendapatan retribusi pasar dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Prediksi Perhitungan Proyeksi Rencana Target tahun 2002 s/d 2006 :

1. Tahun Anggaran 2002 Ketetapan Target : Rp. 1.800.000.000,00
2. Tahun Anggaran 2003 Ketetapan Target : Rp. 1.980.000.000,00
3. Tahun Anggaran 2004 Ketetapan Target : Rp. 2.178.000.000,00
4. Tahun Anggaran 2005 Ketetapan Target : Rp. 2.395.000.000,00
5. Tahun Anggaran 2006 Ketetapan Target : Rp. 2.635.000.000,00

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember 2002

Dari prediksi perhitungan proyeksi target diatas terlihat bahwa ada kenaikan rata-rata 10% pertahun kemampuan penyerapan retribusi pasar.

- C. Dengan luasnya Kabupaten Jember dan sedangkan jumlah unit pasar daerah yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember belum menjangkau semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Berikut adalah data geografi unit pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Tabel.V Data Geografi Unit Pasar Kabupaten Jember

NO	PASAR UMUM	WILAYAH		LUAS TANAH
		KEL/DESA	KEC.	
1	2	3	4	5
A.	Pasar Dalam Kota			
1	Pasar Tanjung	Kel. Jember Kidul	Kaliwates	25.105 M ²
2	Pasar Johar	Kel. Jember Kidul	Kaliwates	620 M ²
3	Pasar Gebang Atas	Kel. Gebang Kel.	Patrang Kaliwates	4.070 M ²
	Pasar Gebang Bawah	Jember Kidul		5.776 M ²
4	Pasar Kreyongan	Kel. Jember lor	Patrang	2.067 M ²
5	Pasar Patrang	Kel. Patrang	Patrang	2.650 M ²
6	Pasar Tegalboto/	Kel. Kel. Tegalboto	Sumbersari	2.432 M ²
	Pasar Kepatihan	Kel. Kepatihan	Kaliwates	1.361 M ²
7	Pasar Mangli	Kel. Mangli	Kaliwates	4.148 M ²
8	Pasar Sukorejo	Kel. Sukorejo	Sumbersari	2.052 M ²
9	Pasar Tegalbesar	Kel. Tegalbesar	Kaliwates	4.825 M ²
10	Pasar Burung	Kel. Jember Kidul	Kaliwates	3.787 M ²
B.	Pasar Luar Kota			
1	Pasar Rambipuji	Ds. Rambipuji	Rambipuji	12.564 M ²
2	Pasar Jenggawah	Ds. Jenggawah	Jenggawah	6.400 M ²
3	Pasar Petung	Ds. Petung	Bangsalsari	2.400 M ²
4	Pasar Bangsalsari	Ds. Bangsalsari	Tanggul	9.879 M ²
5	Pasar Tanggul	Ds. Tanggul Kulon	Tanggul	9.510 M ²
6	Pasar Manggisari	Ds. Tanggul Kulon	Kencong	1.459 M ²
7	Pasar Kecong	Ds. Kencong	Puger	5.814 M ²
8	Pasar Puger	Ds. Puger Kulon	Umbulsari	6.336 M ²
9	Pasar Umbulsari	Ds. Umbulsari	Gumukmas	11.525 M ²
10	Pasar Menampu	Ds. Menampu	Gumukmas	4.427 M ²
11	Pasar Gladak Merah	Ds. Menampu	Balung	6.413 M ²
12	Pasar Balung/	Ds. Balung lor	Balung	11.525 M ²
	Tanah Tutul	Ds. Tutul	Balung	5.634 M ²
13	Pasar Ambulu	Ds. Ambulu	Ambulu	7.920 M ²
14	Pasar Kalisat	Ds. Kalisat	Kalisat	12.639 M ²
15	Pasar Sukosari	Ds. Balei Baru	Sukowono	1.800 M ²
16	Pasar Sukowono	Ds. Sukowono	Sukowono	6.300 M ²
17	Pasar Mayang	Ds. Tegalrejo	Mayang	3.937 M ²
18	Pasar Sempolan	Ds. Sempolan	Silo	3.054 M ²
C.	Pasar Hewan			
1	Pasar Hewan Balung	Ds. Balung Kulon	Balung	5.470 M ²
2	Pasar Hewan Ambulu	Ds. Tegalsari	Ambulu	-----
3	Pasar Hewan Rambipuji	Ds. Rowotamtu	Rambipuji	7.553 M ²
4	Pasar Hewan Kencong	Ds. Kencong	Kencong	4.236 M ²
5	Pasar Hewan Tanggul	Ds. Tanggul Wetan	Tanggul	3.610 M ²
6	Pasar Hewan Bangsalsari	Ds. Bangsalsari	Bangsalsari	1.609 M ²
7	Pasar Hewan Ajung	Ds. Klompangan	Ajung	5.880 M ²
8	Pasar Hewan Mayang	Ds. Tegalwaru	Mayang	4.798 M ²
9	Pasar Hewan Kalisat	Ds. Glagahwero	Kalisat	5.617 M ²
10	Pasar Hewan Sukowono	Ds. Sukowono	Sukowono	5.250 M ²
11	Pasar Hewan Menampu	Ds. Menampu	Gumukmas	-----

Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2000

Dari data geografi unit pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember terlihat bahwa tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Jember memiliki pasar baik pasar umum maupun pasar hewan. Adapun wilayah kecamatan yang belum ada pasarnya berjumlah 11 wilayah kecamatan. Kesebelas kecamatan tersebut adalah; Kecamatan Panti, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Ledokombo, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jelbug, Kecamatan Sumberbaru.

Dari kondisi geografis tersebut diatas disatu sisi merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun dilain sisi merupakan tantangan bagi Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai dinas yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pasar perlu untuk melakukan serangkaian kebijakan guna memberikan pelayanan terhadap penyediaan pasar bagi semua masyarakat di Kabupaten Jember.

Ekstensifikasi sendiri merupakan salah satu strategi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) khususnya retribusi pasar yang bertumpu pada pengelolaan yang demokratis, efisien dan pelayanan yang prima dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Agar pelaksanaan strategi ekstensifikasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan perlu didukung oleh struktur organisasi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember. Sebagaimana dikemukakan oleh Stephen Robbins (1994:)

Saat ini strategi dianggap sebagai salah satu variabel yang menentukan struktur dari organisasi selain dari keempat determinan struktur yang lain, yakni; besaran atau jumlah orang yang dipekerjakan oleh organisasi, tingkat kerutinan pada teknologi yang digunakan organisasi untuk mengubah masukannya ke produk-produk akhir atau jasa-jasa, tingkat kepastian dalam lingkungan organisasi, dan preferensi yang menguntungkan diri sendiri dari individu atau kelompok yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam organisasi.

Lebih lanjut Peter Drucker (dalam Stephen P. Robbins, 1994:134) mengemukakan ;

Struktur adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari sebuah lembaga. Setiap tindakan mengenai struktur oleh karenanya dimulai dengan tujuan dan strategi.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan , apabila tujuan organisasi telah ditetapkan, atau dirinci, maka pengembangan struktur, arus wewenang serta hubungan lain dengan jelas akan mengikuti pola yang logis.

Berdasarkan berbagai uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Pengaruh dari Strategi Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar terhadap Dimensi Struktur dari Dinas Pasar Kabupaten Jember.



1.2 Perumusan Masalah

Didalam perumusan masalah peneliti mengajukan pertanyaan pada dirinya tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Mohammad Natzir (1988:133) mengemukakan tujuan dari perumusan masalah ini, yaitu:

- Mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang;
- Memutuskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal baru;
- Meletakkan dasar-dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya;
- Memenuhi keinginan sosial;
- Menyediakan sesuatu yang bermanfaat.

Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Dampak Strategi Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar terhadap Dimensi Struktural dari Dinas Pasar Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian harus terdapat tujuan yang hendak dicapai karena dengan tujuan penelitian akan diketahui maksud dan arah dari penelitian tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1984:43) bahwa:

Suatu riset dengan ilmu-ilmu empiris pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, menemukan berarti untuk mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih jauh atau lebih luas apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi keraguan kebenarannya.

Sedangkan Suharsimi Arikunto (1998:52) memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi ekstensifikasi pungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak strategi ekstensifikasi terhadap dimensi struktur Dinas Pasar Kabupaten Jember.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- 1) Diharapkan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Ilmu Administrasi Negara.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi instansi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dimasa yang akan datang.
- 3) Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian serupa.

1.4. Kerangka Teori

Teori merupakan sifat yang terbuka, artinya teori sewaktu-waktu dapat diuji kebenarannya oleh siapapun. Oleh karena itu teori harus berkembang baik kualitas maupun jenisnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik pengujian maupun pengembangannya perlu adanya penelitian dan sebaiknya setiap penelitian ada hubungan dengan teori.

Singarimbun dan Effendi (1987:37) memberikan definisi tentang teori sebagai berikut: "Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menrangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep." Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa teori merupakan serangkaian konsep yang saling berhubungan sehingga menunjukkan hubungan yang sistematis.

1.4.1 Konsep Retribusi Daerah

Pemerintah memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan keamanan, keadilan, dan pekerjaan umum. Semua itu dimaksudkan untuk

memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau warganegaranya. Dalam menunjang program tersebut pemerintah membutuhkan dana yaitu keuangan negara. Ilmu keuangan negara mengikuti perkembangan kegiatan negara dan erat kaitannya dengan filsafat ekonomi. Ini artinya semakin luas kegiatan atau aktivitas suatu negara, maka akan semakin luas pula ruang lingkup ilmu keuangan negara. Keuangan Negara menurut Suparmoko (1982:5) adalah, "Keuangan negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan meningkatkan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja."

Sedangkan menurut Arsjad dkk (1992:2). Keuangan negara adalah, "Keuangan negara adalah segala kegiatan pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (*Sources of Fund*) dan kemudian bagaimana dana itu digunakan (*Uses of fund*) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah tertentu."

Berdasarkan pendapat diatas keuangan negara merupakan studi tentang pengaruh dari anggaran-anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian. Pengaruh keuangan negara sektor kehidupan masyarakat adalah kompleks sekali. Menurut Samuelson (Dalam Arsjad 1992:30) ada instrumen pokok yang dimiliki pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga instrumen itu adalah:

Pajak yang bisa mengurangi konsumsi atau investasi masyarakat

1. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bisa mendorong perusahaan dan pekerja memproduksi barang-barang dan jasa tertentu.
2. Peraturan-peraturan atau pengawasan pemerintah yang langsung mengarahkan masyarakat untuk berbuat sesuatu.

Sebagai suatu proses mencari sumber dana dan membelanjakannya negara memperoleh penerimaan dari: pendapatan dalam negeri yang berupa pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan. Sedangkan pengeluaran pemerintah berupa : pengeluaran rutin yang berupa belanja pegawai, belanja

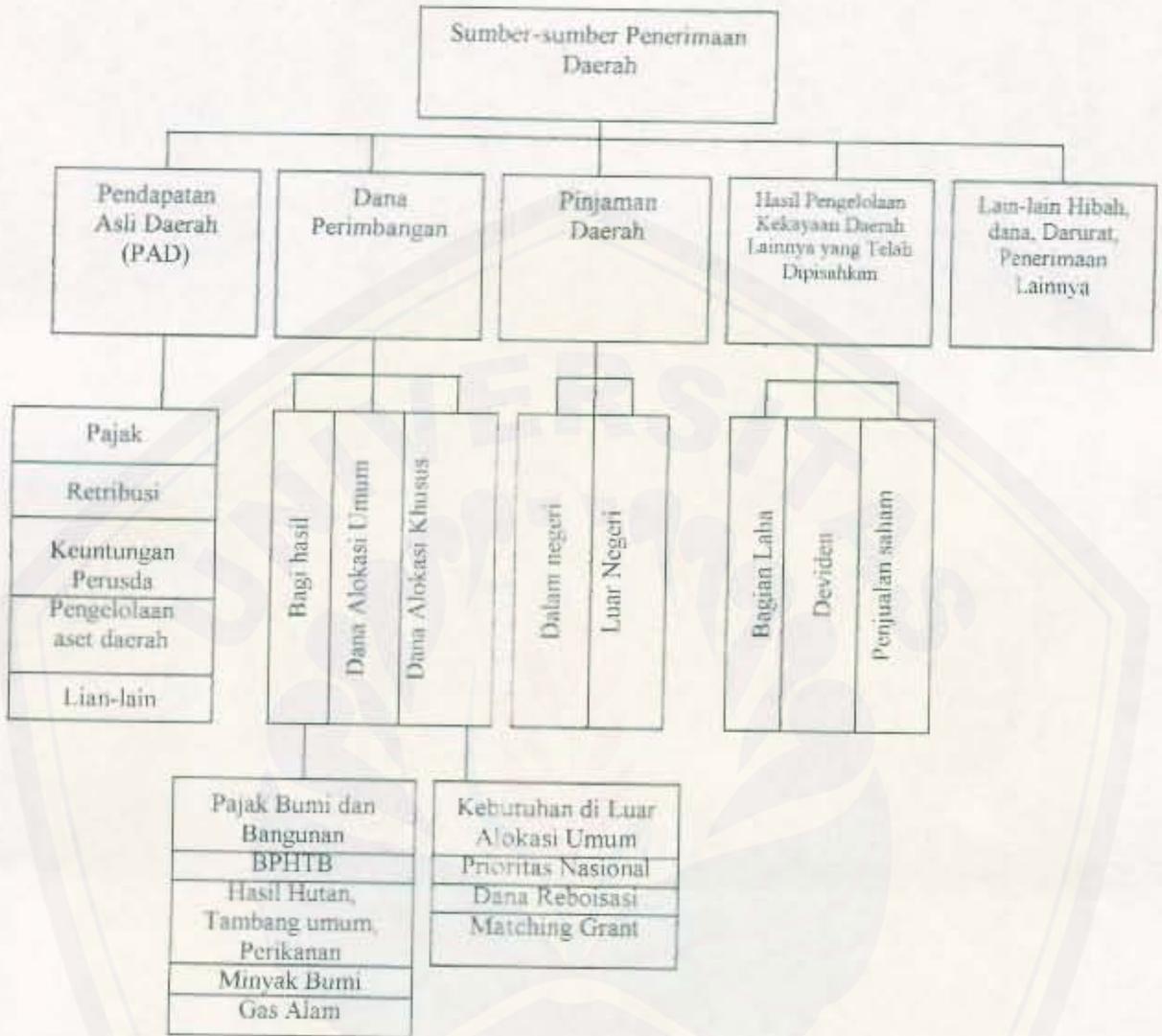
barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan hutang serta pengeluaran pembangunan.

Keuangan negara sebelum berlakunya UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sangat berpengaruh pada keuangan daerah karena banyak subsidi-subsidi yang mengalir dari pusat. Begitu juga pusat mendapat bagian pada sektor tertentu. Dengan berlakunya UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah otonom dan UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berarti daerah diberi wewenang penuh untuk mengali serta mengembangkan potensi yang ada didaerahnya. Disini peran Pendapatan Asli Daerah sangat berperan dalam mendukung tercapainya daerah otonom. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat pada gambar berikut :



JEMBER

Gambar 1. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah



Sumber : UU 25/99 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dari gambar diatas pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk pendapatan dari sektor pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten. Pajak daerah propinsi meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. BBNKB
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak daerah kabupaten meliputi :

1. Pajak Hotel dan Restoran
1. Pajak Hiburan
2. Pajak Reklame
3. Pajak Penerangan Jalan
4. Pajak Pengambilan dan Pengoajian Bahan Galian Golongan C
5. Pajak Pemanafaatan Air Bawah Tanah

Sedangkan retribusi daerah terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perijinan Tertentu

Peningkatan PAD baik dari sektor pajak, retribusi dan penerimaan daerah lainnya penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dimasa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang No 34 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Kaho (1985:152) kemudian mengikhtisarkan ciri-ciri Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah

Karena pendapatan asli daerah (PAD) semakin terasa kontribusinya yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dimasa yang akan datang, maka dengan demikian akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan PAD baik dari sektor pajak, retribusi dan penerimaan daerah lainnya. Demikian semakin meningkatnya PAD, memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan dan peningkatan pembangunan (dalam segala bidang) didaerahnya masing-masing. Dengan berlakunya undang-undan nomor 22 dan 25 tahun 1999 pelaksanaan otonomi daerah diharapkan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) akan lebih maksimal, karena kedua undang-undang tersebut memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

Dari Pendapatan Asli Daerah diatas retribusi daerah memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Karena diera otonomi sekarang ini daerah ini mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan retribusi apa yang memiliki potensi untuk menambah penerimaan daerah. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah. Retribusi daerah menurut undang-undang RI NO 22 Th 1999, adalah salah satu sumber Pendapatan asli daerah disamping pajak daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No 34 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari kedua pengertian diatas Josef Riwu Kaho (1985:152) kemudian mengikhtisarkan ciri-ciri Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah

- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Pungutan retribusi daerah berdasarkan UU No.34/2000 pasal 18 menggolongkan retribusi daerah menjadi tiga golongan, yaitu;

1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan sampah
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman
 - e. Retribusi parkir ditepi jalan umum
 - f. Retribusi pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Retribusi Jasa Usaha, Terdiri dari;
 - a. Retribusi grosir atau pertokoan
 - b. Retribusi terminal
 - c. Retribusi penitipan anak
 - d. Retribusi tempat rekreasi atau olahraga
 - e. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi perijinan tertentu, terdiri dari:
 - a. Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah
 - b. Retribusi ijin mendirikan bangunan
 - c. Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol
 - d. Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan

Pengolongan jenis-jenis retribusi diatas dimaksudkan oleh pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya dan tidak ada ketimpangan dalam pemungutan retribusi sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, menurut penggolongannya retribusi pasar termasuk dalam jenis jasa umum. Pengertian Retribusi Jasa Umum berdasarkan PP. No. 66 tahun

1.4.2 Konsep Retribusi Pasar

Menurut penggolongannya retribusi pasar termasuk dalam jenis jasa umum. Pengertian Retribusi Jasa Umum berdasarkan PP. No. 66 tahun 2001 (pasal 1) adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pungutan retribusi pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran baik tetap maupun tidak tetap di pasar. Yang dikenakan pungutan uang retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran tetap, disini adalah logika dalam pasar yang secara tetap (sekurang-kurangnya satu tahun sesuai dengan kebutuhan) dipergunakan oleh seseorang atau badan berjualan barang atau jasa. Orang atau badan yang dikenakan retribusi tidaklah terbatas kepada mereka yang menggunakan dasaran didalam pasar saja akan tetapi termasuk juga mereka yang menggunakan tempat dasaran diluar pasar sepanjang tempat dasaran tersebut masih termasuk dalam pengertian pasar.

Besarnya tarif retribusi pasar untuk tiap daerah dapat bervariasi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku pada tiap-tiap daerah pemungut. Besarnya tarif ditentukan dengan mempertimbangkan :

- Kelas pasar, semakin tinggi kelas pasar semakin besar jumlah retribusi.
- Kelas los, semakin tinggi kelas los yang ditempati pedagang, semakin tinggi jumlah retribusi.

Retribusi pasar dipungut berdasarkan sistem ketetapan-ketetapan tersebut bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk surat (untuk berlangganan tahunan atau bulanan) atau berbentuk karcis. Pelaksanaan pungutan uang retribusi persoalan pasar adalah sebagai berikut :

- a. Pada awal tahun bagi pedagang yang berlangganan tahunan.
- b. Pada awal bulan bagi pedagang yang berlangganan bulanan.
- c. Pada setiap hari bagi pedagang yang berlangganan harian.
- d. Pada setiap masuk pasar bagi mereka yang berjualan tidak tetap.

Pemungutan retribusi pasar tersebut dilaksanakan dipasar setempat oleh petugas dinas pasar (mantri pasar). Setiap hari pungutan retribusi tersebut harus disetor

petugas ke kas daerah selambat-lambatnya satu hari setelah pelaksanaan pungutan. Untuk memberikan gairah kerja kepada petugas dispenda, maka diberikan uang perangsang dalam jumlah presentase tertentu dari realisasi retribusi.

Adanya retribusi pasar ini dimaksudkan oleh pemerintah daerah untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Menurut Irawan Soejito (1990:85),

“Retribusi yang dibayarkan oleh pemakai jasa atau barang yang disediakan oleh pemerintah berhak mendapatkan kontraprestasi tertentu. kontraprestasi itu dapat berbentuk jasa maupun dalam bentuk pemberian ijin.”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas pelayanan retribusi pasar adalah penyediaan berupa tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan baik diwaktu siang maupun malam hari yang terdiri dari bangunan pasar, halaman dan fasilitas lainnya seperti toko, los, bedak, halaman terbuka, rumah toko dan bangunan lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Daerah dalam memungut retribusi pasar haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan pokok peraturan perundangan perpajakan dan retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Undang- Undang RI No. 22 tentang pemerintahan daerah, pasal 79 (a) dan Undang-Undang RI No 25 Th.1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pasal 4,, menyatakan tentang sumber pendapatan Asli Daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan daerah salah satunya adalah Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang RI no 34 tahun 2000 pasal 18 (1) :

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah . Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 1995 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Retribusi yang dipungut pemerintah daerah harus sesuai dengan kontraprestasi yang diberikan kepada pemakai retribusi. Seperti halnya pada pemungutan pajak. Pemungutan retribusi harus mencerminkan keadilan, mencari keadilan itu sangat sulit. Kita akan terbentur oleh kenyataan bahwa keadilan itu relatif, yang dulu dianggap adil sekarang tidak demikian halnya ataupun sebaliknya. Dalam mencari keadilan salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar pemungutannya diselenggarakan secara umum dan merata, untuk itu diperlukan tinjauan khusus untuk memberikan argumen kepada masyarakat tentang mengapa pemerintah menarik pungutan retribusi.

Asas keadilan dalam prinsip perundangan-undangan dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Hal ini dapat diambil dari teori-teori yang menjadi dasar keadilan pemungutan pajak (Rimsky K Judisseno 1997:8) terdiri dari:

1. Teori asuransi
Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya oleh karena itu rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak, tetapi sebetulnya negara tidak pernah memberikan ganti rugi andaikata terjadi musibah.
2. Teori kepentingan
Pemungutan pajak didasarkan atas kepentingan orang dalam negara, melalui besar kepentingannya maka besar pula pajaknya.
3. Teori Daya Pikul
Bahwa pajak dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang, untuk mengukur daya pikul, selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga besarnya pengeluaran seseorang.
4. Teori bakti
Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya yang menunjukkan bakti warga terhadap negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.
5. Teori Daya beli
Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara.

Dari apa yang dikemukakan mengenai teori-teori diatas, pertimbangan pemungutan pajak pada prinsipnya mempertimbangkan keadilan dan keabsahan

dalam pelaksanaannya. Demikian juga dengan asas-asas yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "An inquiry into the nature and cause of the wealth of nations" mengenai the four maxims (dalam Judisseno) terdiri dari :

1. Asas equality
Asas ini menekankan pada pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak. Jadi setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenai pajak yang sama pula tidak ada diskriminasi antara sesama wajib pajak.
2. Asas certainty
Asas ini menekankan pada kepastian pemungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subyek dan obyek pajak serta kepastian tentang tata cara pemungutannya. Dengan adanya asas ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak.
3. Asas convenience of payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu, saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan.
4. Asas efficiency
Asas ini menekankan pada pentingnya efisiensi pemungutan pajak artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang di pungut.

Berkaitan dengan asas-asas keadilan Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave (1982:233) mengemukakan dua macam asas yakni :

- a. Asas manfaat (Benefit Principle)
Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib harus membayar sejalan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.
- b. Asas Kemampuan membayar (Ability -to-pay Principle)
Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar pajak.

Kedua asas diatas sangat berguna dalam merancang struktur pajak yang adil, dan dapat diterima oleh kebanyakan orang serta jauh lebih disenangi dibandingkan dengan alternatif lainnya.

Meskipun pajak berdasarkan manfaat umum hanya merupakan konsep teoritis saja, tetapi penerapan prinsip manfaat dapat ditemukan dalam beberapa contoh kasus, dimana jasa-jasa publik disediakan berdasarkan prinsip manfaat Implementasi kebijakan pungutan retribusi pasar merupakan penerapan

Implementasi kebijakan pungutan retribusi pasar merupakan penerapan pembiayaan melalui pembebanan langsung (*direct charge*) atas pihak pemakai. Sebagaimana dikemukakan Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave (1982:235) sebagai berikut :

Dalam kasus pembiayaan melalui pembebanan langsung (*direct charge*) atas pihak pemakai, tampak dengan jelas bahwa barang atau jasa yang disediakan pemerintah mempunyai sifat sebagai barang-barang pribadi, yaitu yang konsumsinya bersaing secara ketat. Manfaat dapat diperoleh secara langsung oleh pemakai yang dapat membayar.

Sedangkan David Osborne dan Ted Gabler dalam bukunya '*Reinventing Government*' (1998:232) berpendapat bahwa :

Pungutan kepada pemakai tentu saja tidak selalu tepat, pungutan ini akan berjalan dibawah tiga kondisi; jika pelayanan tersebut terutama merupakan 'barang pribadi' (bersifat pribadi), menguntungkan individu yang menggunakannya, jika pihak yang tidak membayar dapat dipisahkan dalam menikmati manfaatnya, dan jika pungutan dapat dikumpulkan secara efisien.

Penyediaan jasa publik dengan cara ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan pemerintah. Dengan menggunakan mekanisme pasar, maka dimungkinkan adanya pencatutan tingkat penawaran yang tepat secara lebih efisien.

1.4.4 Konsep Strategi Ektensifikasi

Ekstensifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:223) diartikan sebagai perluasan. Yang dalam arti kata yang lain ekstensifikasi di sebut juga ekspansi. Berkaitan dengan pengertian ekspansi ini, Alex Soemadji Nitisemito (1984:141) memberikan pendapatnya .

Suatu perusahaan dikatakan melakukan ekspansi atau perluasan usaha apabila perusahaan tersebut telah mampu menaikkan tingkat produksinya dari barang-barang/jasa-jasanya yang diproduksi untuk dijual.

Perusahaan dikatakan mengadakan ekspansi atau perluasan jika perusahaan tersebut itu memperbesar kegiatan/operasinya secara permanen (Sudarsono 1996:290).

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan :

1. Ekstensifikasi dalam pengertian yang lain disebut juga ekspansi. Kebijakan ekspansi merupakan perluasan usaha produksi dari barang-barang atau jasa-jasa oleh suatu perusahaan.
2. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan ekspansi apabila perusahaan tersebut telah mampu menaikkan tingkat produksinya dari barang-barang/jasa-jasanya yang diproduksi untuk dijual.

Strategi seperti yang dikemukakan Stephen P. Robbins (1994:134) adalah :
Penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut.

Strategi ekstensifikasi termasuk dalam strategi pengembangan pasar. Strategi ini berupa memasarkan produk lama seringkali dengan sedikit modifikasi kosmetik, kepada pasar dengan menambah saluran distribusi atau dengan mengubah isi iklan promosi. Pearce dan Robinson (1997:298) menyatakan bahwa:

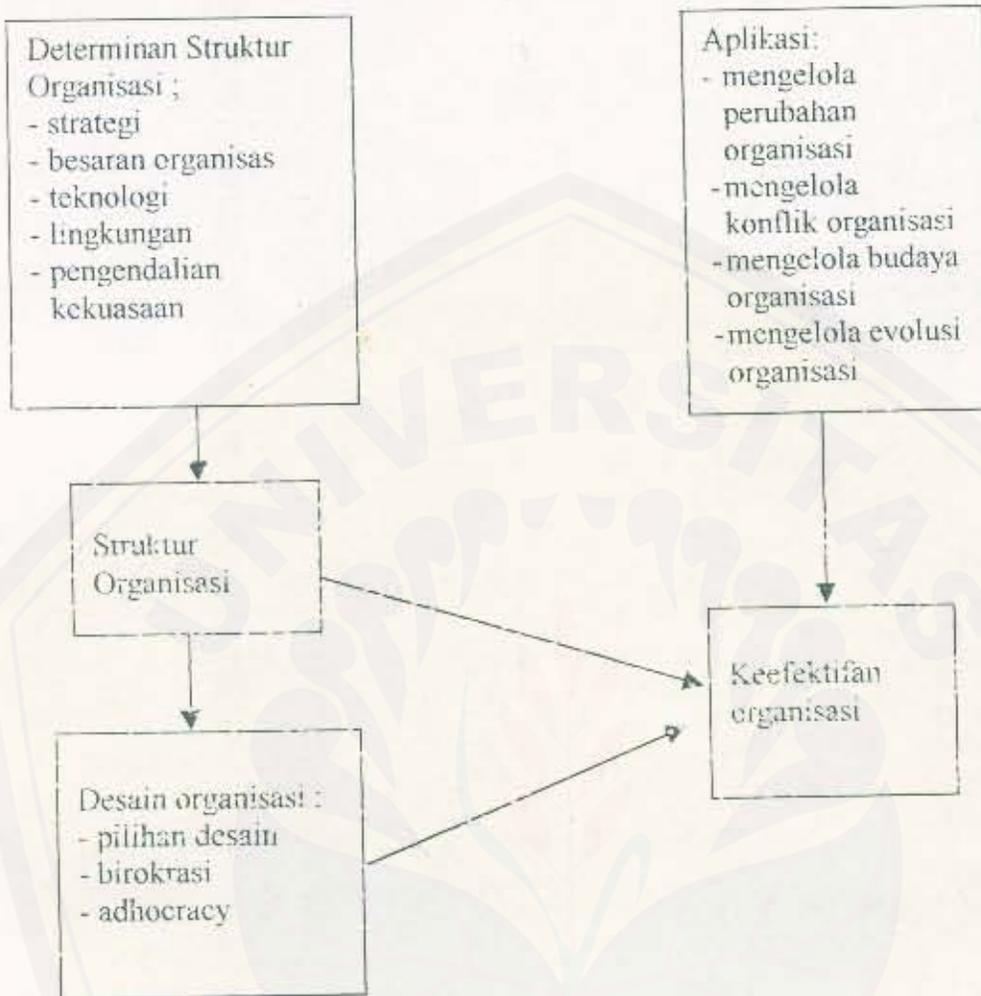
Pengembangan pasar memungkinkan perusahaan mempraktekan satu bentuk pertumbuhan terkonsentrasi dengan mengidentifikasi penggunaan-penggunaan baru untuk produk yang sudah ada serta pasar demografis, psikografis, atau geografis baru.

Dari pendapat diatas, strategi pengembangan pasar dapat diterapkan dengan mengidentifikasi penggunaan-penggunaan baru, pasar geografis baru, atau saluran baru untuk menjangkau para pemakai baru.

Saat ini strategi dianggap sebagai salah satu variabel yang menentukan struktur dari organisasi selain dari keempat determinan struktur yang lain, yakni; besaran atau jumlah orang yang dipekerjakan oleh organisasi, tingkat kerutinan pada teknologi yang digunakan organisasi untuk mengubah masukannya keproduk-produk akhir atau jasa-jasa; tingkat kepastian dalam lingkungan organisasi; dan preferensi yang menguntungkan diri sendiri dari individu atau kelompok yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam organisasi.

Empat yang pertama dari determinan diatas telah diberi nama "variabel kontingensi" karena para pendukungnya berargumentasi bahwa struktur akan berubah sebagai cerminan perubahan pada variabel-variabel tersebut. Untuk lebih jelas terlihat dalam gambar

Gambar 2. Kerangka kerja untuk menganalisis Teori Organisasi



(dalam Stephen Robbin, 1994:28)

Dari gambar diatas terlihat bahwa isu keberhasilan sebuah organisasi digolongkan dibawah topik keefektifan organisasi. Ini adalah variabel tak bebas. Perhatian ditujukan pada perihal dampak berbagai struktur terhadap keefektifan organisasi. Sedangkan apa yang menentukan struktur terdiri dari lima determinan yakni ; strategi umum organisasi, besaran atau jumlah orang yang dipekerjakan, tingkat kerutinan pada teknologi yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah masukannya keproduk-produk akhir atau jasa-jasa, tingkat ketakpasatian dalam lingkungan organisasi, dan kelompok yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam organisasi.

Kemudian dilanjutkan dengan berbagai pilihan desain yang dapat dibuat dari komponen-komponen struktural tersebut. Dari pilihan desain tersebut ditinjau kembali dan dinilai, dua diantaranya : birokrasi dan adhocracy. Yang pertama adalah desain yang saat ini paling populer di kalangan organisasi besar, yang terakhir makin populer dengan sebutan "desain masa depan." Dalam konsep Teori Organisasi beberapa masalah dihadapi para manajer saat ini meliputi: pengelolaan lingkungan, perubahan organisasi, konflik organisasi, budaya organisasi dan evolusi.

Awal penerimaan tujuan dan strategi sebagai faktor penentu struktur organisasi didasarkan atas asumsi yang terdapat pada teori ekonomi klasik. Termasuk didalamnya :

1. Organisasi mempunyai tujuan atau beberapa tujuan yang hendak dicapai.
2. Organisasi bergerak kearah tujuan-tujuannya secara "rasional".
3. Organisasi eksis untuk mengubah masukan ekonomi menjadi keluaran.
4. Lingkungan tempat beroperasinya organisasi merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan kebenaran dari asumsi-asumsi diatas, maka struktur sebuah organisasi dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari sebuah proses yang rasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Drucker (dalam Stephen P. Robbins, 1994:134) :

Struktur adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari sebuah lembaga. Setiap tindakan mengenai struktur oleh karenanya dimulai dengan tujuan dan strategi.

Sedangkan Henry T. Tosi (dalam Stephen P. Robbins, 1994:134) berpendapat ;

Jika tujuan organisasi telah ditetapkan, atau dirinci, maka pengembangan struktur, arus wewenang serta hubungan lain dengan jelas akan mengikuti pola yang logis.

Definisi tersebut tidak mengatakan kepada kita apakah strategi harus direncanakan terlebih dahulu ataukah timbul begitu saja. Henry Mintzberg (dalam Robbins 1994: 135) berpendapat, hal ini sebenarnya mewakili dua pandangan mengenai strategi yaitu;

1. Planning Mode (model perencanaan)
 Pandangan tersebut menjelaskan strategi sebagai sebuah model perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Para manajer mengidentifikasi arah tujuan mereka; kemudian mereka mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai hal itu.
2. Evolutionary Mode (model evolusi).
 Strategi tidak selalu harus merupakan rencana yang dipikirkan secara matang dan sistematis. Strategi bahkan berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dari arus keputusan yang bermakna.

Para penulis terdahulu yang melihat hubungan strategi struktur mengasumsikan bahwa planning mode adalah cara paling yang tepat untuk melihat strategi. Sedangkan prespektif evolusi yang lebih luas telah diterima pada tahun-tahun terakhir ini. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk menghadapi strategi-strategi yang statis maupun yang dinamis.

Dari kedua pandangan tersebut Stephen P. Robbins (1994:135) berpendapat bahwa;

Jika ada strategi imperative, maka strategi itu akan menentukan struktur. Juga, bersamaan dengan berubahnya strategi – baik direncanakan secara eksplisit ataupun berevolusi secara implisit – struktur harus mengikutinya.

Strategi memperhatikan cara maupun tujuan. Tujuan dan pengambilan keputusan mengenai strategi organisasi dapat direncanakan sebelumnya atau berevolusi begitu saja sebagai suatu pola dalam arus keputusan-keputusan yang bermakna. Pendapat dari Robbin tersebut akan terlihat jelas dari gambar berikut :

Gambar. 2 Strategi Imperative



(dalam Stephen Robbins,1994:136)

Dari gambar diatas terlihat bahwa proses transformasi organisasi, lingkungan merupakan determinan utama dari struktur. Walaupun proses transformasi sebuah organisasi serta lingkungan menentukan struktur, proses itu bukan sesuatu yang ditetapkan akan tetapi dipilih oleh para pengambil keputusan yang dominan di dalam organisasi tersebut.

Strategi ditetapkan sebagai sesuatu yang mencakup tujuan jangka panjang sebuah organisasi ditambah dengan arah tindakan yang akan memberikan cara ke arah pencapaiannya. Karya klasik mengenai hubungan antara strategi organisasi dan strukturnya dibuat oleh Alfred Candler. Seperti yang dikatakan Candler (dalam Robbins, 1994:140) sebagai berikut :

Strategi baru membutuhkan struktur yang baru atau, paling tidak, struktur yang diperbaharui jika perusahaan yang makin besar tersebut harus dapat dioperasikan secara efisien....kecuali jika struktur tidak mengikuti strategi, maka akan timbul ketakefisienan

Klain Candler bahwa strategi mempengaruhi struktur tampaknya ditopang dengan baik, tetapi generalisasi tersebut dihambat oleh keterbatasan dan definisi yang melekat pada karya Candler. Ia hanya melihat organisasi yang besar, organisasi yang mencari laba. Candler memfokuska diri pada pertumbuhan, bukan keuntungan, sebagai ukuran keefektifan.

Penelitian yang paling penting mengenai hubungan strategi-struktur dilakukan oleh Miles dan Snow. Miles dan Snow (dalam Robbins 1994:144) mengklasifikasikan organisasi berdasarkan tingkat sejauh mana mereka mengubah produk atau pasar mereka – kedaam salah satu dari keempat strategi : defenders, prospectors, analyzers, dan reactors.

1. Defender

Defender mencari stabilitas dengan hanya memproduksi hanya sejumlah produk yang terbatas yang ditujukan pada suatu segmen sempit dari seluruh pasar potensial. Di dalam ceruk (*niche*), atau domain, yang terbatas ini defenders berusaha secara agresif menahan para pesaing memasuki "lahan" mereka.

Manajemen mempersepsikan tidak ada atau hanya ada sedikit perubahan dan ketidakpastian lingkungan dibawah strategi defender. Struktur yang berhasil dibawah kondisi yang demikian harus dirancang untuk memperoleh efisiensi

optimum. Efisiensi tersebut paling baik dicapai melalui pembagian kerja yang tinggi, standardisasi, kegiatan formalisasi yang tinggi, dan pengambilan keputusan yang disentralisasikan.

2. *Prospector*

Prospector adalah hampir kebalikan dari defenders. Kekuatan mereka adalah menemukan dan mengsploitasi produk baru dan peluang pasar. Inovasi ini mungkin lebih penting daripada keuntungan besar. Keberhasilan prospector tergantung pada upaya mengembangkan dan kapasitas untuk melakukan survei yang luas atas kondisi lingkungan, kecenderungan dan kejadian. Oleh karena itu prospector menaruh investasi yang besar dalam personalia yang dapat meneliti lingkungan untuk menetapkan peluang-peluang potensial.

Strategi Prospector menuntut adanya tingkat fleksibilitas struktur yang paling tinggi. Ada banyak perubahan dan ketidakpastian sehingga struktur tersebut harus sangat adaptif. Hal ini berarti kompleksitas yang rendah, formalisasi yang rendah, dan pengambilan keputusan yang didesentralisasikan.

3. *Analyzer*

Analyzer mencoba mengambil yang terbaik dari kedua strategi yang diatas. Mereka mencoba meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang untuk memperoleh laba. Strategi mereka hanya akan bergerak ke produk baru atau pasar baru setelah keberhasilannya dibuktikan oleh prospector.

Manajer yang mengejar strategi-analyzer merasakan adanya perubahan dan ketidakpastian yang cukup besar, namun mereka menunggu hingga para pesaing mengembangkan tanggapan yang bersemangat dan kemudian dengan cepat mereka mengambil alih. Mengenai struktur, analyzer mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua dunia tersebut dengan menstruktur aktivitas mereka yang sekarang dan yang stabil secara ketat, sambil mengembangkan struktur yang fleksibel bagi aktivitas baru yang akan menghadapi ketidakpastian lebih besar.

4. *Reactor*

Reactor mewakili strategi sisa. Nama tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan pola-pola yang tidak konsisten dan tidak stabil yang timbul jika salah

satu dari ketiga strategi lainnya dikejar secara tidak benar. Organisasi yang mengikuti strategi reactor, menanggapi perubahan dengan tidak sepenuh hati. Manajemen merasakan adanya beberapa perubahan dan ketidakpastian, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan membuat penyesuaian yang substansial sampai mereka dipaksa karena tekanan lingkungan. Jadi struktur ini kemungkinan besar akan terlihat seperti yang dijelaskan bagi defender.

Dalam tabel VI dibawah ini meringkas tipologi strategik dari Miles dan Snow. Tabel tersebut menunjukkan tujuan dari masing-masing tipologi, jenis lingkungan yang dihadapi, serta mekanisme struktural yang akan dipilih oleh manajemen untuk mencapai tujuan. Strategi reactor dihapus demi alasan-alasan yang jelas, yaitu bahwa strategi itu akan menghasilkan performa yang tidak efektif.

Tabel V Tipologi Strategik Miles dan Snow

STRATEGI	TUJUAN	LINGKUNGAN	KARAKTERISTIK STRUTURAL
Defender	Stabilitas dan efisiensi	Stabil	Kontrol ketat, pembagian kerja yang ekstensif, formalisasi tinggi, terpusat
Analyzer	Stabilitas dan efisiensi	Perubahan	Kontrol cukup terpusat, kontrol ketat atas aktivitas yang ada, kontrol agak lepas untuk usaha baru.
Prospector	Fleksibilitas	Dinamis	Struktur lepas, pembagian kerja rendah, formalisasi rendah desentralisasi

Diadaptasi dari Raymond E. Miles (dalam Stephen Robbins, 1994:147)

Elemen utama dalam teori strategi-struktur dari Miles dan Snow adalah penilaian dari manajemen atas ketidakpastian lingkungan.

1.4.4 Konsep Dimensi Struktur

Struktur organisasi merupakan konsep abstrak. Tidak satupun orang yang sebetulnya pernah melihat hal yang sama. Apa yang kita lihat adalah bukti struktur. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.

Meskipun kesepakatan umum universal suatu set umum dimensi yang mengukur perbedaan struktur selain tidak mungkin dan tidak perlu beberapa saran dapat dibuat. Sebagaimana Gibson, Ivacevich dan Donnelly (1997:132) bahwa; Sekarang, tiga dimensi acapkali digunakan dalam riset dan praktek guna menjelaskan struktur; formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas. Sedangkan Stephen P. Robbins(1994:6) lebih lanjut mengemukakan; kita menetapkan bahwa bahwa sebuah struktur organisasi mempunyai tiga komponen: kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi.

1. Kompleksitas

Kompleksitas merujuk pada tingkat differensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Kompleksitas dibagi menjadi tiga yaitu;

a. Differensiasi Horisontal

Differensiasi horisontal merujuk pada tingkat differensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan dan tingkat pendidikan serta pelatihannya. Dapat dikatakan bahwa semakin semakin banyak pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang istimewa, semakin kompleks pula organisasi tersebut. Bukti yang paling nyata pada organisasi yang menekankan differensiasi horisontal adalah Spesialisasi dan departementalisasi.

Spesialisasi merujuk pada pegelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh satu individu.

Departementalisasi adalah proses dimana suatu organisasi secara struktural dibagi dengan mengkombinasikan pekerjaan dalam departemen berdasarkan beberapa andil karakteristik atau dasar tertentu.

b. Differensiasi Vertikal

Differensiasi vertikal merujuk pada kedalaman struktur. Differensiasi meningkat, demikian pula kompleksitasnya, karena jumlah tingkatan hirarki didalam organisasi bertambah. Makin banyak tingkatan yang ada di antara *top management* dan tingkat hirarki yang paling rendah, makin besar pula potensi terjadinya distorsi dalam komunikasi dan

makin sulit mengkoordinasi pengambilan keputusan dari pegawai manjerial, serta makin sukar bagi *top manajemen* untuk mengawasi kegiatan bawahanya. *Differensiasi vertikal* ditentukan oleh rentang kendali.

Rentang kendali menetapkan jumlah bawahan yang dapat diatur dengan efektif oleh seorang manajer. Jika rentangnya lebar, manajer akan mempunyai banyak bawahan yang melapor kepadanya. Jika sempit, para manjer hanya mempunyai sedikit bawahan. Jika hal-hal lainnya dianggap sama, maka makin kecil rentangnya makin, akan makin tinggi organisasinya.

c. *Differensiasi Spasial*

organisasi dapat melakukan aktivitas yang sama dengan tingkat differensiasi horisontal dan pengaturan hirarki yang sama diberbagai lokasi. Tetapi keberadaan berbagai lokasi tersebut meningkatkan kompleksitas. Oleh karena itu elemen ketiga dalam kompleksitas adalah differensiai spasial, yang merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi dari kantor, pabrik, dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis.

Differensiai spasial dapat dilihat sebagai perluasan dari dimensi dan differensiasi horinsontal dan vertikal. Artinya, adalah mungkin untuk memisahkan tugas dan pusat kekuasaan secara geografis. Pemisahan ini mencakup penyebaran jumlah maupun jarak.

2. *Formalisasi*

Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan didalam organisasi itu distandarisasikan. Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pemegang pekerjaan itu hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakannya dan bagaimana ia harus melakukannya.

Para manajer mempunyai sejumlah tehnik untuk dapat menstandarisasikan perilaku para pegawainya. Beberapa tehnik yang populer untuk menstandarisasikan perilaku pegawainya diantaranya :

a. Seleksi

Organisasi memilih para pegawainya bukan secara acak. Para pelamar diproses melalui sejumlah rintangan yang dirancang untuk membedakan para individu yang mungkin dapat berprestasi dari mereka yang mungkin tidak akan berhasil. Proses seleksi yang efektif dirancang untuk menentukan apakah calon pekerja cocok bagi organisasi.

b. Peraturan

Peraturan merupakan pernyataan eksplisit yang ditujukan bagi para pegawai tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Peraturan tidak memberi kesempatan kepada para pegawai untuk membuat pertimbangan atau mengambil kebijakan-kebijakan. Peraturan menetapkan pola perilaku tertentu dan spesifik yang disyaratkan.

c. Prosedur

Prosedur adalah rangkaian langkah yang saling berhubungan satu sama lain secara sekuensial yang diikuti para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Prosedur ditetapkan untuk memastikan terjadinya standarisasi poses kerja. Suatu masukan akan diproses dengan cara yang sama, keluarannya juga sama setiap hari.

d. Pelatihan

Pelatihan kepada para pegawainya termasuk didalamnya berbagai jenis pelatihan "*on the job*" dimana tugas, *coaching* dan magang digunakan untuk mengajarkan pada para pegawainya tentang ketrampilan kerja pilihannya, pengetahuan dan sikap. Maksud dari pelatihan ini adalah untuk memasukkan perilaku dan sikap kerja yang diinginkan oleh para pegawai. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Sentralisasi

Sentralisasi adalah yang paling problematikus diantara komponen.. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedang

konsentrasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah atau yang disebut desentralisasi. Ada juga kesepakatan bahwa desentralisasi sangat berbeda dari differensiasi spasial. Sentralisasi memperhatikan penyebaran kekuasaan untuk membuat keputusan dalam organisasi, bukan penyebaran secara geografis.

Menurut Robbins (1994: 118) sentralisasi adalah ;

Jenjang kepada siapa kekuasaan formal untuk membuat pilihan-pilihan secara leluasa dikonsentrasikan pada seorang individu, unit, atau tingkatan (biasanya berada tinggi pada organisasi), dengan demikian mengizinkan para pegawai (biasanya pada tingkat rendah dalam organisasi) untuk memberi masukan yang minimal kedalam pekerjaan mereka.

Organisasi merupakan sistem pengambilan keputusan dan pengolahan informasi sedangkan para manajer memiliki keterbatasan untuk memberi perhatian kepada data yang ia terima. Untuk menghindarkan titik dimana kapasitas manajer itu terlampaui, maka beberapa keputusan dapat diserahkan kepada orang lain. Konsentrasi dengan demikian dapat disebarkan, penyebaran atau transfer ini disebut desentralisasi.

Hanson (dalam Salusu, 2002 : 418) membedakan antara sentralisasi struktural dengan sentralisasi administratif.

- a. Sentralisasi struktural apabila dua atau lebih sistem diinkorporasikan dibawah komando satu mekanisme kendali tunggal, sedangkan desentralisasi struktural terjadi apabila satu sistem dibagi dalam dua atau lebih subsistem independen, masing-masing dengan kendali sendiri.
- b. Sentralisasi administrasi diartikan sebagai pemusatan wewenang pengambilan keputusan pada puncak hirarki organisasi; dan desentralisasi administrasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang pengambilan keputusan oleh pejabat pada yang lebih tinggi dari hirarki organisasi kepada pejabat pada tingkat yang lebih rendah.

Tentang sentralisasi administrasi dan desentralisasi administrasi, menurut Max Weber (dalam Salusu, 2002 :419) selalu ada kecenderungan bagi orang-orang yang menduduki posisi puncak hirarki organisasi untuk membuat keputusan-keputusan tentang kebijaksanaan, sedangkan orang-orang ditingkat menengah cenderung membuat keputusan-keputusan prosedural, dan mereka yang ada di tingkat bawah cenderung membuat keputusan yang pelaksanaan. Sehingga dapat diklasifikasikan *administratively centralized* (terusat secara administratif).

Di pihak lain, desentralisasi administratif terjadi apabila wewenang pengambilan keputusan didelegasikan ketingkat hirarki terendah yang masih mungkin diadakan koordinasi dan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dibuat.

Dari berbagai uraian di atas yang menjelaskan dampak strategi terhadap struktur organisasi. Dalam penelitian ini tiga dimensi struktur yaitu; kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi digunakan dalam menganalisis Dampak dari strategi ekstensifikasi pungutan retribusi pasar terhadap dimensi struktur Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu unsur yang penting dalam penulisan, dimana definisi operasional merupakan petunjuk dalam mengukur variabel. Agar konsep yang ada dapat diterapkan atau dioperasionalkan dengan jelas dan mudah. Dalam penulisan maka perlu adanya penjabaran pengertian, penentuan standart pengukuran, dan penganalisaan konsep tertentu dari konsep yang ada.

Definisi operasional tidak berarti mengartikan kata demi kata yang terdapat dalam judul secara harfiah, melainkan memberikan gambaran-gambaran variabel yang akan diberlakukan atau term-term yang digunakan dalam penelitian (Badan Penerbit Unej, 1998: 17). Sedangkan menurut Tjokrowinoto (1981:12) definisi operasional adalah :

Suatu penyusunan definisi tentang suatu variabel atau konsep secara empiris sehingga jelas dimensi-dimensi maupun indikator-indikator dan konsep atau variabel tadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengemukakan definisi konsep konsep sebagai berikut :

1.5.1 Tingkat kompleksitas

Kompleksitas merujuk pada tingkat differensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Operasionalisasi kompleksitas dalam penelitian ini adalah :

a. Diferensiasi horisontal operasionalisasinya adalah;

1. Pembagian kerja yang ada dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar. .
2. Dasar-dasar departementalisasi yang dipakai..

b. Diferensiasi Vertikal

1. Jumlah tingkatan hirarki .
2. Banyaknya jumlah bawahan yang dapat diatur secara efektif .

c. Diferensiasi Spasial

1. Penyebaran wilayah kerja, kantor dan personalia.
2. Jumlah kantor dan personalia.

1.5.2 Tingkat Formalisasi

Tehnik-tehnik yang dipakai untuk menstandarisasikan perilaku para pegawai meliputi :

1. Seleksi

- a. Proses penerimaan calon pegawai.
- b. Perkembangan jumlah pegawai.

2. Peraturan

- a. Peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada para pegawai
- b. Peraturan-peraturan baru yang mendukung strategi ekstensifikasi

3. Prosedur

- a. Rangkain langkah yang diikuti oleh pegawai dalam pemungutan retribusi
- b. Penyesuain prosedur yang dilakukan dengan adanya strategi ekstensifikasi

4. Pelatihan

- a. Jenis-jenis pelatihan yang diberikan pada para pegawai
- b. Penambahan jenis pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai

1.5.3 Sentralisasi

1. Level-level tingkatan dalam organisasi yang membuat keputusan strategis.
2. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi ekstensifikasi

1.6 Metode Penelitian

Satu hal penting dari kegiatan penelitian adalah metode penelitian. Karena metode ini digunakan sebagai landasan bergerak dalam mendapatkan data-data yang obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga suatu penelitian ilmiah mempunyai kebenaran yang dapat dibuktikan dengan kenyataan dilapangan. Koentjaraningrat (1987:7) mendefinisikan metode sebagai berikut:

Metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami obyek sasaran ilmu yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Sanapiah Faisal (1992:31) :

Penentuan metodologi penelitian, seringpula disebut strategi pemecahan masalah, karena dalam tahap ini, mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditentukan jawabannya.

Dari kedua pendapat diatas metodologi penelitian menentukan (1) jenis, atau format penelitian yang akan digunakan, (2) metode, sumber, dan alat pengumpulan (3) strategi analisa data.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moeloeng, 1995: 3) mengemukakan bahwa:

Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tertentu tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam studi ini tidak sekedar menggambarkan tetapi juga mengarahkan untuk kepentingan interpretasi dan berarti sebagai penelitian induktif karena penelitian ini dilakukan dengan didasarkan pada teori-teori tertentu yang mengarahkan atau membatasi proses penelitian itu sendiri

Tujuan penelitian ini tidak untuk menguji konsep-konsep yang ada sebagai suatu variabel atau preposisi hubungan antar variabel, tetapi konsep-konsep yang digunakan tersebut diartikan sebagai alat untuk menginterpretasikan hakikat

suatu gejala atau kenyataan yang ada di lapangan serta mengkonseptualkan teori yang memiliki tingkat abstraksi yang cukup tinggi yang dapat berlaku dalam penelitian-penelitian lainnya.

Penelitian pada dampak strategi ekstensifikasi terhadap dimensi struktur Dinas Pasar adalah selaras dengan ciri-ciri penelitian kualitatif penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penjajakan (eksplorasi), atau untuk mengidentifikasi informasi baru khususnya tentang pembangunan pasar baru. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah alami dan langsung dalam bentuk pernyataan dari informan yang terpilih dalam lingkup penelitian yang tidak berupa variabel-variabel yang telah ditentukan

1.6.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian disini adalah Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai instansi yang menangani retribusi pasar dan kebijakan dalam hal pengembangan pasar yang dikelola di Kabupaten Jember. Sehingga dapat dikatakan bahwa unit analisis penelitian ini adalah Dinas Pasar Kabupaten Jember.

1.6.3 Jenis Data

1. Jenis data primer, yaitu sumber yang dapat memberikan secara langsung data yang diperlukan atau data itu dari sumber pertama yaitu responden
2. Jenis data sekunder, yaitu sumber-sumber masukan yang didapat dari mengutip sumber lainnya, misalnya dokumentasi grafik dan sebagainya

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara atau Interview

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data – data secara lisan terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini mengajukan pertanyaan pada responden untuk mencari keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Natzir (1988 : 234) yang dimaksud dengan wawancara adalah :

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)

Adapun pedoman yang penulis pakai adalah wawancara informan, penulis akan berpedoman pada wawancara dengan jenis pertanyaan semi struktur yaitu mula-mula pewawancara mengajukan serentetan pertanyaan yang sudah berstruktur kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang didapat biasa meliputi semua variabel dengan keterangan lengkap dan mendalam.

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana peranan informan disini sangat penting. Data akan banyak digali dari orang-orang tertentu yang dinilai mempunyai keahlian atau setidaknya mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Spradley (dalam Faisal, 1990:17) yang menggunakan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan sampel awal termasuk didalamnya informan, yaitu :

- a. Subyek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas.
- b. Subyek yang masih terlibat aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
- c. Subyek mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan informasi tidak cenderung di kemas terlebih dahulu.
- d. Subyek yang dalam membrikan informasi tidak cenderung dikemas terlebih dahulu.
- e. Subyek yang sebelumnya masih tergolong asing dengan penulisan ini.

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa informan internal Dinas Pasar dan informan eksternal yaitu para pedagang. Dari proses pengumpulan informasi primer yang dilakukan berikut ini dijabarkan mengenai gambaran karakteristik informan sebagai kunci penelitian :

- a. Nama : Drs. Tombak P.R, S.H. M.S.i.
 Jabatan : Kepala Sub Dinas Retribusi
 Pendidikan : Sarjana S 2
 Usia : 42 tahun

Informan ini telah bekerja selama 8 tahun sebagai pegawai negeri di Dinas
Informan ini sesuai dengan jabatannya memiliki tanggung jawab dan
yang secara langsung untuk mengadakan usaha-usaha intensifikasi dan
sifikasi pendapatan pasar.

Nama : Drs. Nuril Anwar
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Pendidikan : Sarjana S 1
Usia : 47 tahun

Informan ini telah bekerja selama 16 tahun di Dinas pasar sesuai dengan
nya ia bertanggung jawab pada upaya mempersiapkan dan mengusahakan
dikan, pengetahuan dan ketrampilan pegawai, mengadakan analisis
awaian, menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai, dan
elenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data
awaian, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
dahan, pembinaan karier dan pemberhentian atau pensiun pegawai.
n ini memahami tentang masalah-masalah kepegawaian yang ada di
ngan Dinas Pasar karena semua aktivitas yang berhubungan dengan
awaian di tangannya.

Nama : Kasherin Prayitno
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pendapatan
Pendidikan : Diploma III
Usia : 52 tahun

Informan ini bersama dengan para pegawai di bagian sub dinas retribusi
tukan pengumpulan dan mengolah data guna bahan penyusunan
aksanaan teknik dan program bidang pendapatan pasar. Mengadakan
titan secara kontinu dan mengevaluasi tata cara dan teknik pemungutan
usi guna peningkatan pelayanan dan sumber-sumber pendapatan baru

Nama : Zainal Arifin, S.H
Jabatan : Mantri Pasar Tegalboto/ Kepatihan
Pendidikan : S1
Usia : 55 tahun

Informan ini telah menjadi mantri pasar selama 8 tahun, sebelumnya dia juga pernah memegang berbagai jabatan di kantor Dinas Pasar. Sesuai dengan tugasnya, ia bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan kebijakan ekstensifikasi yang dilakukan di unit Pasar di wilayah kerjanya. Pada tahun 2001 di wilayah kerjanya yaitu Unit Pasar Kepatihan diadakan kegiatan ekstensifikasi berupa pembelian tanah untuk menampung para pedagang yang ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

- e. Nama : Bambang Sadiono, S.Sos.
 Jabatan : Mantri Pasar Bungur
 Pendidikan : S1
 Usia : 47 tahun

Jabatan mantri pasar bukan yang pertama kali di pegang, dia juga sudah pernah menjadi Mantri Pasar Rambipuji. Mantri Pasar Ambulu Informan ini mengetahui banyak seluk-beluk permasalahan yang dihadapi Dinas Pasar terutama yang di tingkatan unit kerja yang selama ini belum dapat diatasi oleh Dinas Pasar. Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya ia bersinggungan langsung dengan para pedagang dan pembeli dan sedikit banyak mengetahui yang sering mereka keluhkan.

- f. Nama : Latif
 Jabatan : Pegawai Juru Pungut/PNS
 Pendidikan : SMP
 Usia : 52 tahun

Dalam tugas sehari-harinya memungkinkan informan ini untuk mendengar langsung komentar dari pedagang terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pasar dalam menyediakan pasar untuk berjual beli bagi masyarakat. Telah menjadi petugas juru pungut semenjak tahun 1980 dan telah menjadi juru pungut untuk lima unit pasar.

- g. Nama : Mustaim
 Jabatan : Pegawai Juru Pungut/PNS
 Pendidikan : SMA
 Usia : 37 tahun

Informan ini telah menjadi juru pungut selama 15 tahun dan telah banyak mengetahui karakteristik para pedagang berkaitan dengan kewajiban membayar retribusi. Menurutnya banyak persoalan-persoalan di dalam pelaksanaan pungutan retribusi yang perlu segera ditangani baik oleh Dinas Pasar maupun Pemkab Jember.

- h. Nama : Rusdi
 Jabatan : Petugas Keamanan/Rollstate
 Pendidikan : SD
 Usia : 38 tahun

Telah bekerja sebagai petugas keamanan selama 10 tahun tapi sampai sekarang belum diangkat sebagai PNS. Menurut informan ini sudah seharusnya pemerintah Pemkab Jember memperhatikan kesejahteraan para pegawai yang masih berstatus rollstate.

- i. Nama : Burodi
 Jabatan : Petugas Kebersihan/Rollstate
 Pendidikan : SMP
 Usia : 40 tahun

Informan ini telah bekerja menjadi petugas kebersihan dengan status tenaga rollstate hampir 4 tahun. Menurutnya kesadaran para pedagang sebenarnya sudah cukup baik tapi terbatasnya sarana dan sarana kebersihan yang ada membuat pelaksanaan tugasnya sering kurang lancar.

- j. Nama : Sholikhatul
 Jabatan : Pedagang
 Pendidikan : SMP
 Usia : 35 tahun

Informan ini telah berjualan di Pasar Kepatihan sebelum di pasar tersebut disediakan tempat berjualan oleh Pemkab Jember. Informan ini banyak mengeluhkan lambatnya penanganan terhadap sarana dan prasarana pasar yang ada di pasar tersebut. Informan ini juga mengharapkan agar pihak dinas meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang keamanan dagangan para pedagang.

- k. Nama : Siti Aminah
 Jabatan : Pedagang
 Pendidikan : SD
 Usia : 53 tahun

Informan ini baru 1 bulan berjualan di Pasar Bungur, setelah adanya pasar tersebut. Informan ini merasa senang dengan menempati pasar baru Bungur, tapi saat ini kurang ramainya pedagang dan pembeli menjadi kendala utama untuk membuka usaha di Pasar Bungur.

- l. Nama : Sri
 Jabatan : Pedagang
 Pendidikan : SMA
 Usia : 36 tahun

Informan ini merasa cukup senang dengan tempat berjualan yang disediakan oleh pihak Dinas Pasar. Menurut pengakuan informan yang mendapatkan tempat berjualan di Pasar Tanjung dari tempat yang dulunya bekas tempat berjualan kakaknya, pedagang di Pasar rata-rata tidak keberatan dengan tarif yang dibebankan pada pedagang meskipun mereka banyak yang tidak tahu peraturannya.

2. Teknik observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi dimana penelitian tersebut diadakan sebagai usaha untuk memperoleh informasi data yang berkenaan dalam permasalahan penelitian. Pengertian observasi menurut Sutrisno Hadi (1984:36) adalah:

Sebagai metode ilmiah observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan mata kepala saja, melainkan juga semua jenis pengamatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap realita yang terjadi di masyarakat dan data-data sekunder yang ada di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data.

Dari
bagai
kan
ku-

apai
akai

gan
dan
tiao
lam
cara
kan
nen
atau
oses

kata
ntuk
alam
dari

cara
tema
995:

pilan



II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2.1 Pengantar

Deskripsi lokasi penelitian adalah suatu gambaran umum tentang lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Deskripsi lokasi penelitian akan memberikan pemahaman terhadap obyek penelitian. Berdasarkan deskripsi lokasi penelitian ini, maka akan dapat diperoleh informasi atau data dalam bentuk sekunder. Data yang dimaksud tersebut diantaranya berupa kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan dan tata kerja organisasi, keadaan pegawai serta struktur dari organisasi tersebut.

Dalam penulisan ini, penulis mengambil Dinas Pasar Daerah Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian. Sedangkan yang menjadi sasaran atau obyek penelitian adalah seluruh pegawai di Kantor Dinas Pasar Daerah Kabupaten Jember.

2.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 85 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Daerah Kabupaten Jember, maka dibentuklah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pasar Daerah Kabupaten Jember berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pasar. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pasar Kabupaten Jember mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Program Kerja Organisasi 2001

- 1. Melaksanakan ketetapan target APBD tahun anggaran 2001 dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas secara intensifikasi dan eksentifikasi.
- 2. Meningkatkan obyek pungutan retribusi pengguna jasa pasar.
- 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk memaksimalkan pendapatan guna menekan kebocoran.
- 4. Meningkatkan tertib administrasi, tertib pembukuan pemasukan dan setoran pendapatan retribusi pasar.
- 5. Meningkatkan keterampilan, kedisiplinan dan kualitas sumber daya manusia bagi petugas pemungut.
- 6. Memberikan motivasi dan pelayanan yang prima kepada pedagang, agar memenuhi kewajiban untuk membayar retribusi, serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain selaku mitra kerja dan pengguna tempat usaha dalam pasar.
- 7. Melakukan koordinasi baik intern maupun dengan instansi terkait guna terlaksana tugas pokok dengan sebaik-baiknya.

Wilayah Kerja Dinas Pasar

Merupakan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jember dengan klasifikasi:

Pasar umum: sebanyak 29 unit;

Pasar hewan: sebanyak 11 unit;

Pasar khusus: sebanyak 1 unit berupa pasar burung

2.5 Susunan Organisasi

Berdasarkan Perda No 85 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember, maka susunan organisasi dinas ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Dinas Retribusi
- d. Sub Dinas Ketertiban
- e. Sub Dinas Perawatan
- f. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.6 Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab

Adapun masing-masing bagian tersebut mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina, melaksanakan koordinasi serta melaksanakan kegiatan di bidang pasar.

b. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan;
- 2) Membantu mengkoordinasikan rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pasar;
- 3) Melaksanakan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktivitas peningkatan aparatur Dinas Pasar;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas protokolier dan perjalanan dinas;
- 6) Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pasar;

- 7) Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personel, material, finansial dan informasi;
- 8) Mengusahakan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasia, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pasar;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai fungsi :

- a) Mempersiapkan dan mengusahakan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan pegawai;
- b) Mengadakan analisis kepegawaian;
- c) Menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- d) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pembinaan karier dan pemberhentian atau pensiun pegawai;
- e) Mengurus kesejahteraan pegawai dan menyelenggarakan peningkatan disiplin pegawai;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

2) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan tata usaha keuangan, urusan otorisasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pasar;
- b) Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun penggunaan keuangan dari pos anggaran Dinas Pasar;
- c) Mengerjakan rekening, menyiapkan daftar rekening dan karcis atau tanda penerimaan lainnya yang harus ditagih;

- d) Mengurus dan menyelesaikan keuangan dinas, penyelenggaraan penggajian dan pembaharuan hak-hak keuangan pegawai;
- e) Membuat laporan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan Dinas Pasar;
- f) Menyetorkan seluruh pendapatan/penerimaan ke Kas Kabupaten;
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

3) Sub Bagian Umum

Mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan perencanaan pengadaan peralatan serta menyiapkan daftar standart harga pasar bagi barang-barang yang diperlukan oleh Dinas Pasar;
- b) Menyelenggarakan pengadaan, penyempurnaan dan pengeluaran barang serta melaksanakan administrasi perbekalan;
- c) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan serta keperluan rumah tangga Dinas Pasar;
- d) Mempersiapkan dan mengatur peralatan dan perbekalan untuk menunjang kegiatan organisasi Dinas Pasar;
- e) Mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, alat-alat pengangkutan, kantor dan bangunan lain milik Dinas Pasar;
- f) Menyelenggarakan tata usaha umum;
- g) Menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Pasar;
- h) Menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas;
- i) Menyelenggarakan usaha penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- j) Melaksanakan tugas-tugas protokoler;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

c. Sub Dinas Retribusi

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan, inenyusun secara sistematis dan mengolah data di bidang pendapatan dan jumlah pedagang di lingkungan pasar;
- 2) Menyelenggarakan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- 3) Melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih (DRD) yang telah diterbitkan;
- 4) Membukukan semua penerimaan pada buku harian, bulanan dan tahunan;
- 5) Mengadakan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Retribusi terdiri dari :

- 1) Seksi Penerimaan dan Penagihan.

Mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pungutan retribusi terhadap para pedagang yang berjualan di lingkungan pasar;
- b) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung kepada pembantu bendaharawan khusus penerima;
- c) Melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih (DRD) yang telah diterbitkan terhadap pelanggan sampai jangka waktu yang telah ditetapkan;
- d) Melaksanakan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar;
- e) Menyampaikan hasil pungutan retribusi serta sewa los atau bedak pasar kepada Seksi Pembukuan;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pasar.

- 2) Seksi Pembukuan dan Perijinan.

Mempunyai fungsi :

- a) Melaporkan semua hasil penerimaan dan pendapatan terhadap pengelolaan pasar;

- b) Menyelenggarakan pembukuan terhadap segala hasil pendapatan dan pengelolaan pasar;
- c) Membukukan persediaan karcis, pengeluaran karcis dan formulir-formulir untuk pungutan retribusi dan pendapatan lainnya;
- d) Mengolah, menerbitkan dan menertibkan surat paksa dan surat ijin penggunaan bedak atau stand dan fasilitas pasar lainnya;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Retribusi.

3) Seksi Perencanaan Pendapatan

Mempunyai fungsi :

- a) Mengumpulkan dan mengolah data guna bahan penyusunan kebijaksanaan teknik dan program bidang pendapatan pasar;
- b) Mengadakan penelitian secara kontinyu dan mengevaluasi tata cara dan teknik pemungutan retribusi guna peningkatan pelayanan dan sumber-sumber pendapatan baru;
- c) Mengadakan penelitian dan perencanaan tentang jenis barang-barang dagangan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati;
- d) Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pasar;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Retribusi.

d. Sub Dinas Ketertiban

Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan usaha dan kegiatan pengawasan dan pengamanan teknis operasional serta tugas pokok Dinas Pasar;
- 2) Mengadakan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Daerah yang menyangkut keamanan dan ketertiban pasar serta melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar;
- 3) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban serta mengambil tindakan-tindakan terhadap kejadian-kejadian dalam pasar;

- 4) Melakukan tindakan awal penyegelan dan pembukuan kembali stand atau bedak serta fasilitas pasar lainnya yang diperoleh dari Dinas Pasar;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Ketertiban terdiri atas :

1) Seksi Keamanan

Mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan serta usaha meningkatkan keamanan dalam lingkungan pasar;
- b) Bertanggung jawab terhadap keamanan pasar dan mengambil tindakan terhadap kejadian di lingkungan pasar;
- c) Memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan legalitas dan pemberian ijin yang menyangkut keamanan dalam pasar;
- d) Melaksanakan ronda dalam usaha menjaga stabilitas keamanan di dalam pasar;
- e) Melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan pencurian maupun bahaya kebakaran;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban.

2) Seksi Ketertiban

Mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan membimbing dan membina ketertiban pedagang di dalam pasar;
- b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban dalam pasar;
- c. Melakukan pemindahan para pedagang yang berada di luar lokasi ke dalam pasar yang telah disediakan;
- d. Bertanggung jawab terhadap ketertiban di dalam pasar;
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian ketertiban pasar;
- f. Melakukan tindakan awal penyegelan dan pembukaan kembali bedak atau stand serta fasilitas pasar lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d atau

usaha

dakan

es dan

an di

rhada

Dinas

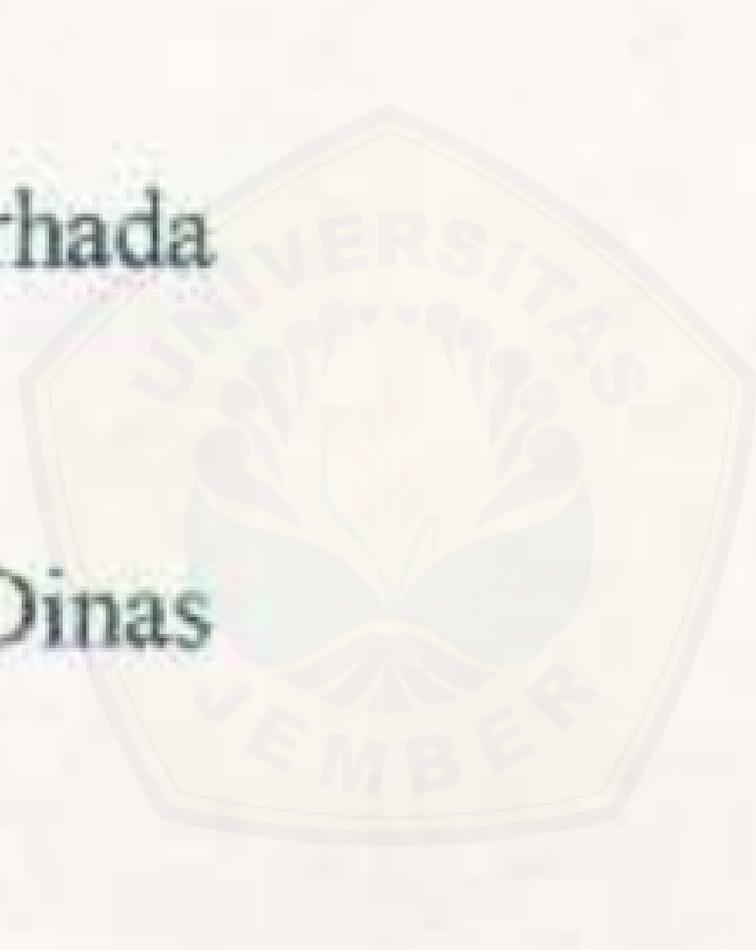
rtiban

ntapan

asi ke

bedak

aratan



- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban.

e. Sub Dinas Perawatan

Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kebersihan fisik dan pemeliharaan pada prasarana sarana fisik;
- 2) Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan usaha-usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Melaksanakan pemeliharaan gedung-gedung pasar, air dan penerangan serta fasilitas-fasilitas milik Dinas Pasar;
- 4) Menyelenggarakan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ke tempat penampungan sementara;
- 5) Mengadakan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Perawatan terdiri atas :

1) Seksi Kebersihan

Mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan usaha dalam rangka menggalakkan dan membina kebersihan pasar;
- b) Menyelenggarakan pembersihan got-got, saluran pembuangan serta kamar mandi atau WC milik Dinas Pasar;
- c) Melaksanakan pembersihan sampah dalam pasar;
- d) Menyelenggarakan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ke tempat penampungan sementara;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perawatan.

2) Seksi Pemeliharaan

Mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan usaha-usaha untuk mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya;
- b) Mengadakan pemeliharaan dan peralatan bedak atau los pasar;
- c) Memelihara dan menjaga kerapian bangunan-bangunan pasar;
- d) Memelihara bak-bak dan tong-tong sampah dalam pasar;
- e) Mengadakan inventarisasi bangunan atau stand dan atau bedak pasar serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) Menyelenggarakan pelaksanaan kebutuhan peralatan untuk pemeliharaan air dan penerangan dalam pasar;
- g) Melaksanakan pemeliharaan instalasi air dan listrik dalam pasar;
- h) Melakukan usaha-usaha pemeliharaan instalasi listrik guna mencegah terjadinya kebakaran akibat aliran listrik.
- i) Melakukan usaha-usaha pemeliharaan instalasi air agar air tetap mengalir;
- j) Mengadakan pengawasan sarana air dan penerangan dalam pasar;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perawatan.

f. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- 2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- 3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

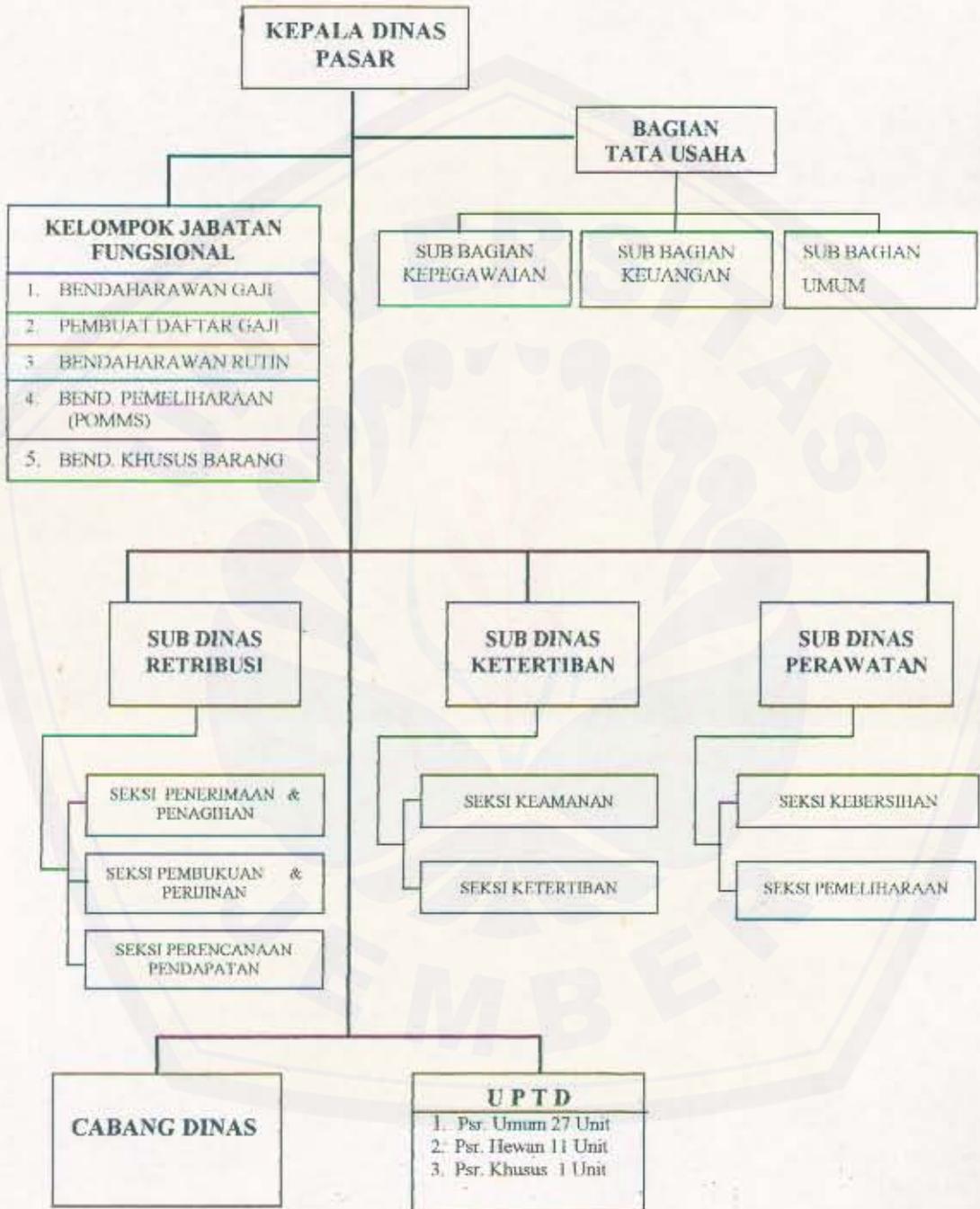
3 Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pasar harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

4 Bagan Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 85 Tahun 2000, maka bagan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember seperti dibawah ini:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DAERAH KAB. JEMBER NO. 85 TAHUN 2000 TGL.23/12/2000



Sumber: Data Primer diolah 2002

5 Keadaan dan Komposisi Pegawai

Data pegawai kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Masa Kerjanya

Pegawai merupakan unsur utama yang ada dalam organisasi. Organisasi tidak akan berfungsi bila tidak ditangani oleh pegawai.

Untuk itulah maka perlu kiranya untuk mengetahui keadaan pegawai yang ada di lingkungan Kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember. Adapun jumlah pegawai pada Kantor Dinas Pasar adalah 34 orang selain Kepala Dinas seperti yang tertera dibawah ini:



Data Pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember Menurut Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Nama	Golongan
1.	Ka. Dinas Pasar	Drs. Sutjipto	IV / b
2.	Ka. Bagian T.U.	Drs. Muctarom	IV / a
3.	Kasubag Kepegawaian	Drs. Nuril Anwar	III / c
4.	Staff	Drs. Rochmatul Ummah	III / b
5.	Staff	Siti Aminatus Z.	II / b
6.	Staff	Sudarno	II / a
7.	Kasubag. Keuangan	Ismaningrum	III / b
8.	Staf	Saiful Nuri	III / a
9.	Staf	Moch. Yasin	III / a
10.	Staf	Djasuli	II / d
11.	Staf	Nining Retno Ponco P.	I / c
12.	Kasubag. Umum	Djuhari Legianto, SH.	III / b
13.	Staf	Ariman	III / a
14.	Staf	Moch. Hafid	II / d
15.	Staf	Teguh Roesiono	I / d
16.	Staf	Diana Satriani	Rollstat
17.	Staf	Abd. Rochman	Rollstat
18.	Staf	Sri Juhairiyah	Rollstat
19.	Staf	Dedi Sucipto	Rollstat
20.	Staf	Hozin Mukhtar	Rollstat
21.	Kasubdin. Retribusi	Tombak P.R, SH,MSi.	III / c
22.	Kasi. Penerimaan & Penagihan	Abdul Mukti, BA.	III / b
23.	Staf	Agus Minanto	Rollstat
24.	Kasi. Pembukuan & Perijinan	Chairus Saleh	III / b
25.	Staf	Armistatie	Rollstat
26.	Kasi. Perencanaan & Pendapatan	Kasherin Prayitno	III / b
27.	Kasubdin. Ketertiban	Drs. Saiful Bari	III / c
28.	Kasi. Keamanan	Drs. Eko Nurbano	III / b
29.	Kasi Kerertiban	Drs. Soediyanto	III / c
30.	Staff	Mohammad Ilyas, CH.	II / d
31.	Kasubdin Perawatan	Drs. Bambang Hartanto	III / d
32.	Kasi. Kebersihan	Drs. Kremun. AR	III / c
33.	Staff	Adi Sutrisna	III / a
34.	Kasi. Pemeliharaan	Wiyono	III / a
35.	Staff	Wahyu Budi P.	II / d

ut

%
2,86
2,86
11,43
14,29
25,71
2,86
5,71
5,71
2,86
2,86
2,86
5,71
2,86
5,71
5,71
100

ut

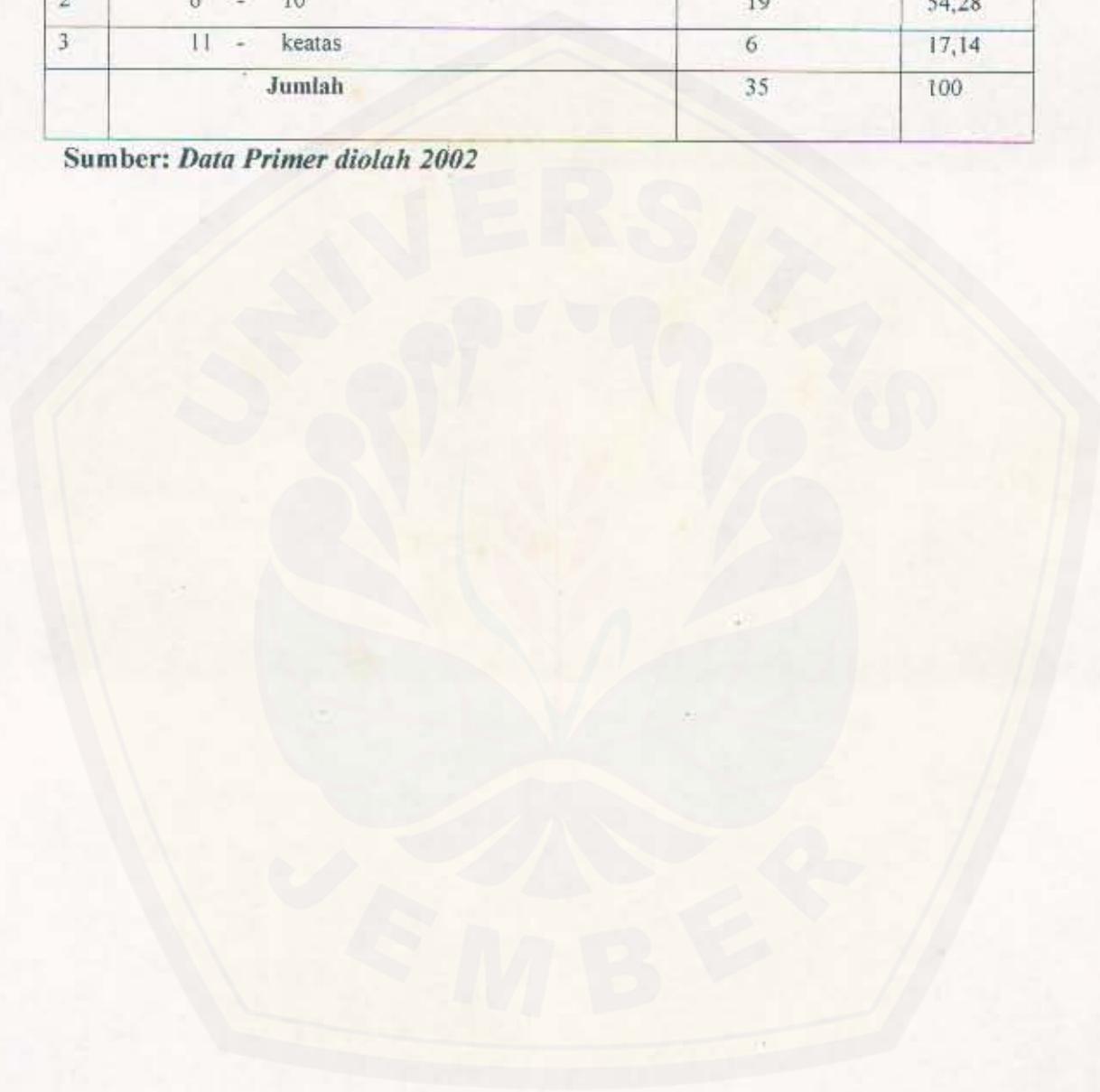
2,86
11,43
2,86
71
5,71
86
57
100



Tabel 8 Data Pegawai Kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember Menurut Masa Kerja

No	Masa Dinas	Jumlah	%
1	1 - 5	10	28,57
2	6 - 10	19	54,28
3	11 - keatas	6	17,14
	Jumlah	35	100

Sumber: Data Primer diolah 2002



III. PEMBAHASAN

3.1. Dampak Strategi Ektensifikasi Pungutan Retribusi Pasar Terhadap Dimensi Struktural Dinas Pasar Kabupaten Jember

Seperti yang disebutkan dalam BAB I, bahwa peneliti memfokuskan penelitiannya pada Dampak Strategi Ektensifikasi Pungutan Retribusi Pasar Terhadap Dimensi Struktural Dinas Pasar Kabupaten Jember, untuk lebih jelasnya sebagai berikut;

3.1.1 Tujuan Strategi Ektensifikasi Pungutan Retribusi Pasar

Batasan mengenai pungutan retribusi pasar dimulai dengan pengertian retribusi itu sendiri dalam Administrasi Negara. Retribusi berkaitan dengan Administrasi Negara yang mengelola tentang Keuangan Negara. Karena Adminitrasi tersebut bertitik tolak pada pencapaian tujuan negara dibidang keuangan negara, maka dalam praktek sehari-hari disebut Administrasi Keuangan Negara, yaitu Administrasi yang berkaitan dengan keuangan negara.

Sedang ilmu atau pengetahuan yang digunakan untuk mempelajari keuangan negara disebut Ilmu Keuangan Negara, yaitu ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang penerimaan-penerimaan atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau negara. Secara sederhana Administrasi Keuangan dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil guna (pengelolaan keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan-pembiayaan).

Keuangan negara merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Maka untuk keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai bentuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula



adikan

luasaan

langan

laerah,

sesuai

menjadi

r atau

dalam

tugas

untuk

makan

si lain

untuk

ayanan

akukan

ri dari

erbuka,

Tahun

umum

untuk

orang

untuk

ember

tugas

utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pasar. Disamping itu keberadaan dinas pasar merupakan dinas penghasil yang berorientasikan pada penggalan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) berupa retribusi pasar.

Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah merupakan dinas pelayanan masyarakat yang langsung bersinggungan dengan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya diperlukan adanya kiat-kiat serta langkah kebijakan yang harus mampu menjabarkan misi dan visi Bupati Jember.

Visi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) khususnya retribusi pasar yang bertumpu pada pengelolaan yang demokratis, efisien dan pelayanan yang prima dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Sedangkan Misi dari Dinas Pasar adalah :

1. Pemberdayaan peran dan partisipasi pedagang sebagai penerima fasilitas berupa sarana bangunan sebagai tempat kegiatan usahanya, guna ikut membangun dan memperbaiki sarana yang sudah ada berupa toko/kios/bedak yang ada di pasar;
2. Mewujudkan pelaksanaan mekanisme kerja yaitu dengan pengawasan dan pengendalian dalam upaya peningkatan pendapatan dan menekan kebocoran;
3. Mewujudkan tertib administrasi pemasukan retribusi pasar;
4. Mewujudkan ketrampilan dan kedisiplinan petugas pemungut selaku ujung tombak dalam memungut retribusi pasar;
5. Mewujudkan kesadaran masyarakat/pedagang untuk membayar retribusi dan perijinan pemilikan SIM;
6. Mewujudkan ketertiban kebersihan, keindahan dan nyaman serta keamanan pasar;
7. Mewujudkan pelayanan yang prima kepada para pengguna fasilitas pasar baik para pedagang maupun konsumen/pembeli;
8. Mewujudkan peningkatan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Dinas Pasar sebagai bagian dari unsur administratif dari organisasi pemerintah Kabupaten Jember, mempunyai tujuan melakukan kerjasama dengan pengguna pasar (masyarakat) dan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi pasar. Upaya pemungutan retribusi pasar dalam tahun-tahun terakhir juga mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel IV dimana perolehan retribusi pasar selalu mengalami peningkatan perolehan.

Untuk tahun 2002 beban target yang dibebankan pada Dinas Pasar sebesar Rp 1.800.000.000,00 sedangkan realisasi perolehan retribusi pasar sebesar Rp 2.282. 648. 812,00. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan retribusi pada tahun 2002 dapat melampaui target yang dibebankan, realisasi perolehan retribusi meningkat sebanyak Rp 356.224.567 dari perolehan retribusi tahun 2001.

Potensi pungutan retribusi pasar di Kabupaten Jember terdiri dari tiga bagian :

- a. Potensi pasar umum meliputi ;
 - Karcis Bulanan
 - Karcis Harian
 - Pendapatan lain-lain terdiri dari ; jasa KM/WC, surat ijin menempati (SIM) putih dan kuning, biaya balik nama (BBN), jasa parkir, pendapatan sewa ruko, toko, dan tanah.
- b. Potensi pasar hewan meliputi ;
 - Karcis hewan sapi
 - Karcis hewan kambing
 - Pendapatan lain-lain
- c. Potensi pasar desa meliputi ;
 - Potensi pasar umum desa
 - Potensi pasar hewan desa

Dari potensi pungutan retribusi pasar selama tiga tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 juga selalu mengalami peningkatan, untuk lebih jelas akan terlihat dari tabel berikut :

Tabel 12 Perolchan Pungutan dari Berbagai Potensi Pungutan Retribusi Pasar di Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2000 s/d 2002

Jenis Potensi Pungutan	Tahun Anggaran Pelaksanaan Pungutan		
	2000	2001	2002
1. Pasar Umum			
a. Karcis harian	746.616.300	1.133.826.500	1.301.425.360
b. Klarcis bulanan	370.649.760	548.882.445	670.878.052
c. Pendapatan lain-lain	71.159.350	126.066.300	208.104.300
2. Pasar Hewan			
a. Karcis hewan sapi	92.020.000	97.771.000	83.982.000
b. Karcis hewan kambing	10.006.000	11.745.000	10.742.500
c. Pendapatan lain-lain	5.977.500	7.133.000	7.516.600
3. Pasar Desa	22.677.085	-----	-----
Jumlah	1.319.105.995	1.926.424.245	2.282.648.812

Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2002

Pada tutup Anggaran Tahun 2000 tanggal 31 Desember 2000 bertepatan dengan hari Minggu sehingga antara pendapatan pungutan di unit kerja dan nilai setoran pada Kasda terdapat selisih :

- a. Nilai pendapatan Rp 1.319.105.995,00
- b. Nilai setor Kasda Rp 1.317.383.945,00
- c. Saldo Rp 1.722.050,00

Dengan perincian :

- a. Pasar Umum Rp 919.950,00
- b. Pasar Hewan Rp 239.000,00
- c. Pasar Desa Rp 563.100,00

Disetor pada bulan Januari 2001 masuk dalam nilai setoran target tahun 2001. Tahun anggaran 2000 skala target untuk 9 bulan dimulai tanggal 1 April 2000 s/d 31 Desember 2001.

Dari potensi pungutan retribusi pasar diatas tampak bahwa penyumbang terbesar pungutan retribusi diperoleh dari karcis harian yang menyumbang rata-rata 57,48 % total pendapatan retribusi pasar selama masa tiga tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2002 pendapatan untuk potensi pungutan pasar hewan justru menurun hal ini disebabkan jumlah hewan yang diperdagangkan di pasar-pasar hewan mengalami penurunan.

Mulai tahun 2001 potensi pungutan retribusi berkurang dengan diberlakukannya Perda nomor 16 tahun 2000 tentang pasar desa. Dalam perda tersebut pengelolaan untuk pasar desa yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pasar beralih dikelola pemerintah desa yang bersangkutan. Dengan pemberlakuan perda tersebut Dinas Pasar tidak lagi mengelola pasar desa di wilayah Kabupaten Jember.

Dinas Pasar dalam mengelola pasar-pasar di Kabupaten Jember mengklasifikasikan pasar-pasar tersebut baik pasar umum, pasar khusus, maupun pasar darurat menjadi kelas utama, kelas I, Kelas II, kelas III. Tingkat kelas masing-masing pasar yang ada didasarkan atas kemampuan perolehan pungutan pasar-pasar tersebut dengan ketentuan :

1. Pasar Kelas III kemampuan perolehan pungutan dari Rp 1.000.000,00 s/d Rp 20.000.000,00
2. Pasar Kelas II kemampuan perolehan pungutan dari Rp 21.000.000,00 s/d Rp 30.000.000,00
3. Pasar Kelas I kemampuan perolehan pungutan dari Rp 31.000.000,00 s/d Rp 175.000.000,00
4. Pasar Kelas Utama kemampuan perolehan pungutan Rp 175.000.000,00 keatas.

Dari kedua puluh sembilan unit pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pasar Kelas Utama : Pasar Tanjung
2. Pasar Kelas I : Pasar Kalisat, Pasar Rambipuji, Pasar Balung, Pasar Ambulu, Pasar Gebang, Pasar Kencong, Pasar Tanggul.
3. Pasar Kelas II : Pasar Sukowono, Pasar Mayang, Pasar Mangli, Pasar Manggisan, Pasar Umbulsari, Pasar Gladak Merah, Pasar Puger, Pasar Jenggawah, Pasar Bangsalsari, Pasar Johar, Pasar Menampu, Pasar Tegalboto
4. Pasar Kelas III : Pasar Sukosari, Pasar Sempolan, Pasar Sukorejo, Pasar Patrang, Pasar Kreyongan, Pasar Tegalbesar, Pasar Bungur, Pasar Khusus Burung.

Dari klasifikasi pasar diatas tampak bahwa pasar kelas utama hanya ada satu unit, pasar kelas I sebanyak tujuh unit, pasar kelas II sebanyak 12 unit, pasar kelas III sebanyak 9 unit.

Meningkatnya perolehan pungutan retribusi pasar tidak terlepas dari strategi yang dilakukan untuk meningkatkan hasil capaian sesuai dengan target yang telah dibebankan, salah satu strategi tersebut adalah strategi ekstensifikasi. Strategi ekstensifikasi meliputi kegiatan pembangunan pasar baru dan pengembangan pasar.

Selama tahun anggaran 1999/2000 s/d tahun 2002 Dinas Pasar telah melakukan kegiatan pembangunan pasar baru dan pengembangan pasar sebagai berikut :

I. Pembangunan pasar baru

a. Pembangunan Pasar Khusus Burung di Gebang

Pasar burung yang berlokasi di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates dirintis mulai tahun 1998. Pendirian pasar khusus burung ini

...mnya
...pung
...telah
...7 m²
...2000
...4.800
...diakan
...pasar
...besar
...manen
...sar di

...seluas
...lengan
...lagang
...gunaan
...tempat
...anggal
...m² di
...ersebut
...kukan
...upaten

...361m²
...untuk
...Tanah



o yang berada di Jalan Ahmad Yani luasnya 728m² menampung para pedagang yang berjumlah sekitar 168 pedagang. Sebelum adanya tanah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jember para pedagang berjualan di pinggir jalan sepanjang Jalan Admad Yani sampai Gladak Kembar. Disatu sisi kondisi tersebut membahayakan para pembeli dan pedagang sedangkan disisi lain akan menimbulkan kemacetan karena lalu-lalang orang yang ada di pasar. Dengan tertampungnya para pedagang di satu lokasi dan tidak lagi di pinggir jalan akan dapat mengurangi kemacetan dan keselamatan para pedagang dan pembeli dapat lebih terjamin.

- b. Pada tahun 2002 unit Pasar Kalisat dikembangkan dengan memperluas lahannya. Luas tanah yang dikembangkan seluas 2.920 m² dengan perluasan Pasar Kalisat yang semula luasnya 9.749 m² sekarang luasnya menjadi 10.669m².

Kegiatan ekstensifikasi terutama pembangunan pasar baru yang dilakukan oleh Dinas Pasar telah mempengaruhi jumlah dari pasar yang dikelolanya. Berikut adalah jumlah masing-masing kelas dari tahun anggaran 1999/2000 s/d tahun anggaran 2002.

Tabel 13 Perkembangan Jumlah Pasar yang Dikelola oleh Dinas Pasar Menurut Klasifikasinya dari Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2002

No	Tahun Anggaran	Klasifikasi Pasar				
		Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Pasar Hewan
1	1999/2000	1	7	12	6	11
2	2000	1	7	12	7	11
3	2001	1	7	12	8	11
4	2002	1	7	12	9	11
	Jumlah	1	7	12	9	11

Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember 2002

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2002 jumlah pasar yang mengalami peningkatan adalah unit pasar kelas III, hal ini dikarenakan kegiatan ekstensifikasi berupa pembangunan pasar baru mulai tahun 1999 s/d tahun 2002 sebanyak tiga pasar baru telah dibangun oleh Dinas Pasar. Ketiga pasar baru tersebut adalah Pasar Bungur, Pasar Tegalbesar dan Pasar Khusus Burung.

Sedangkan kegiatan ekstensifikasi yang berupa pengembangan pasar di Pasar Kepatihan dan Pasar Kalisat tidak mengubah kelas dari kedua pasar tersebut. Pasar Kepatihan yang masuk dalam wilayah kerja Unit kerja Pasar Tegalboto masih berada di kelas II dengan capaian pungutan antara Rp 21.000.000,00 s/d Rp 30.000.000,00. Demikian juga dengan Unit Pasar Kalisat masih termasuk pada kelas I dimana capaian pungutan retribusinya masih berkisar antara Rp 31.000.000,00 s/d Rp 175.000.000,00

Sebagai organisasi nirlaba, strategi ekstensifikasi sebagaimana tersebutkan diatas yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Jember bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi kemanfaatan bagi masyarakat di lain pihak. Meskipun organisasi ini berusaha mempengaruhi tukar-menukar uang untuk barang dan pelayanan seperti pada organisasi laba, tetapi tetap unik karena konsentrasinya pada pertukaran yang menyangkut biaya nonmoneter di satu pihak dan kemanfaatan sosial dan psikologis di lain pihak.

Berdasarkan kondisi di atas, dalam hal ini kebijakan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember bertujuan :

1. Meningkatkan pendapatan retribusi pasar sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), disamping itu pendapatan retribusi pasar target pencapaiannya mengalami kenaikan rata-rata 10% setiap tahunnya.
2. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pengguna jasa maupun pengguna *commodity* pasar.

3.1.3. Dimensi Struktural

Dalam mencapai tujuan dari strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember ini perlu didukung oleh struktur dari Dinas Pasar itu sendiri. Hal ini mengingat strategi dianggap sebagai salah satu variabel yang menentukan struktur dari organisasi selain dari keempat determinan struktur yang lain, yakni; besaran atau jumlah orang yang dipekerjakan oleh organisasi, tingkat kerutinan pada teknologi yang digunakan organisasi untuk mengubah masukannya keproduk-produk akhir atau jasa-jasa; tingkat kepastian dalam lingkungan organisasi; dan preferensi yang menguntungkan diri sendiri dari individu atau kelompok yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam organisasi.

Struktur adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari sebuah lembaga. Setiap tindakan mengenai struktur oleh karenanya dimulai dengan tujuan dan strategi. Jadi, apabila tujuan organisasi telah ditetapkan, atau dirinci, maka pengembangan struktur, arus wewenang serta hubungan lain dengan jelas akan mengikuti pola yang logis.

Pada dasarnya, struktur organisasi menyelesaikan dua hal :

1. Struktur organisasi menetapkan alokasi peran tugas secara formal untuk menentukan anggota-anggota organisasi yang akan menjalankan masing-masing kegiatan.
2. Struktur organisasi menetapkan garis wewenang untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.

Struktur organisasi dari Dinas Pasar didasarkan pada peraturan daerah yang ada. Dinas pasar sebelum diberlakukannya perda nomor 15 tahun 1990 merupakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember. Mekansime kerja dan tehnik operasional berada dibawah koordinasi dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kabupaten Jember. Dinas pasar berdiri sendiri setelah diberlakukannya Perda Nomor 15 tahun 1990 yang diundangkan pada tanggal 4 september 1991. Dengan perda tersebut kepala

dinas pasar bertanggung jawab langsung pada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan tidak lagi kepada kepala dinas pendapatan daerah. Dinas pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam mengelola pasar dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah kepada kepala dinas.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, maka sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai kewenangan daerah kabupaten, maka perlu dibentuk Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pasar yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

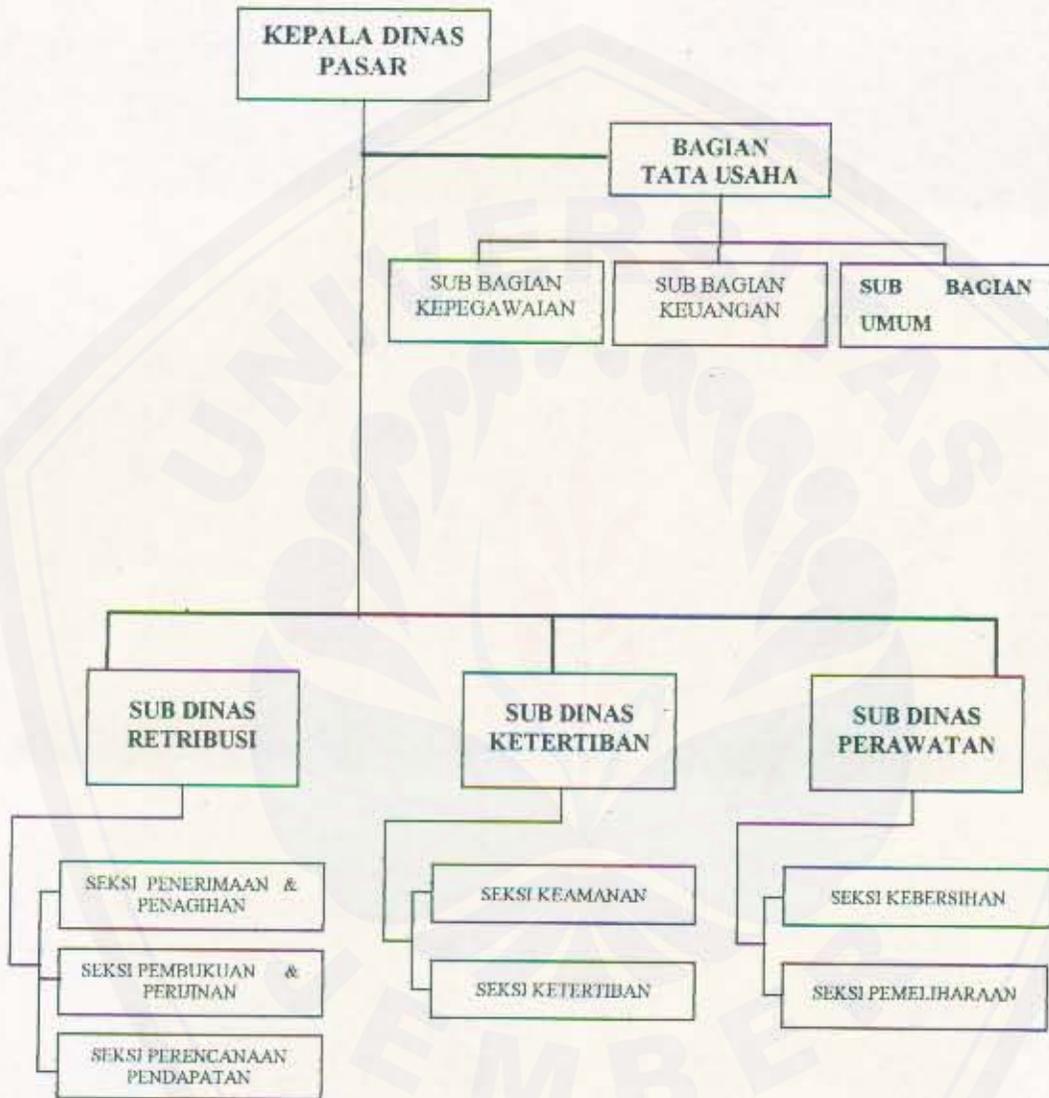
Perda Nomor 39 tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember yang diundangkan Tanggal 28 Agustus 2000 merupakan kebijakan daerah Kabupaten Jember guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan tempat berjualan dilingkungan pasar dan pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangan dan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda Nomor 39 Tahun 2000 menggantikan Perda Nomor 15 Tahun 1990.. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember menurut Perda Nomor 39 tahun 2000 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi-seksi Retribusi
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban
5. Seksi Perawatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sebagai berikut ;

Gambar IV BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PASAR
KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KAB. JEMBER NO. 39
TAHUN 2000 TGL.28/08/2000



Sumber: Data Primer diolah 2002

Namun dalam perkembangannya, demi untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta upaya peningkatan pelayanan dibidang pasar sesuai dengan perkembangan dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu merubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Pada Tanggal 23 Desember 2000 Perda Nomor 39 Tahun 2000 akhirnya dirubah menjadi Perda Nomor 85 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember, diubah sebagai berikut :

1. Penyebutan Nomenklatur Sub Bagian Tata Usaha diubah menjadi Bagian Tata Usaha;
2. Penyebutan Nomenklatur Urusan Diubah menjadi Sub Bagian;
3. Penyebutan Nomenklatur Seksi diubah menjadi Sub Dinas;
4. Penyebutan Nomenklatur Sub Seksi menjadi Seksi;
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 39 Tahun 2000 ditambah huruf g yang berbunyi sebagai berikut :
g. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Diantara Pasal 20 dan 21 disisipkan satu (1) pasal yakni pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20 A
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - (4) Jenis dan Jenjang Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Diantara pasal 20 A dan 21 disisipkan 1 (satu) pasal 20 B yang berbunyi sebagai berikut :

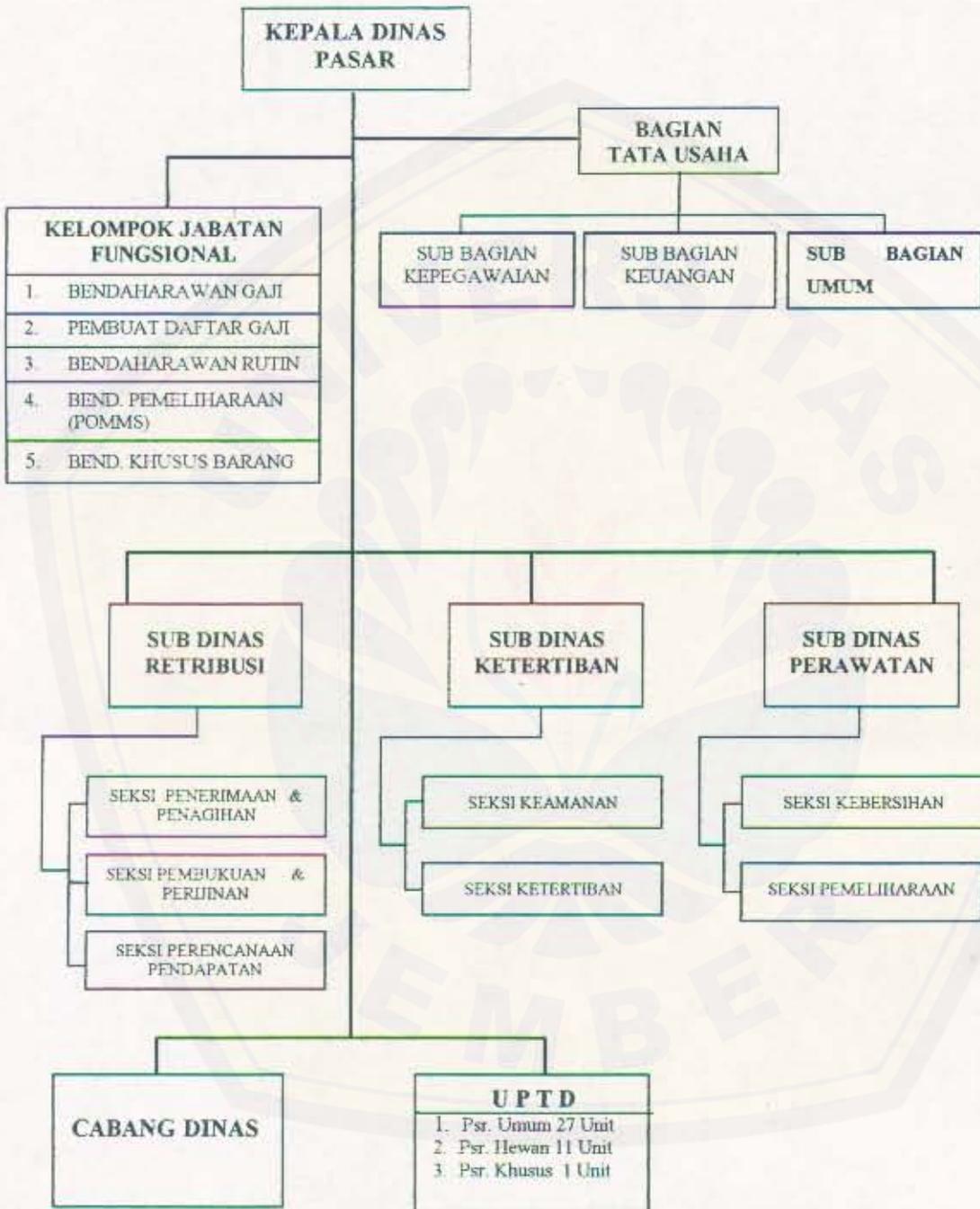
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2 B

- (1) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas;
- (2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Sedangkan Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar Kabupten Jember sesuai dengan Perda Nomor 85 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Gambar V BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KAB. JEMBER NO. 85 TAHUN 2000 TGL.23/12/2000



Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2001

Penyesuaian yang terjadi di Dinas Pasar terlihat dari perubahan Perda Nomor 39 Tahun 2000 ke Perda Nomor 85 Tahun 2000. Dalam perda nomor 85 ditambahkan pasal yang menyebutkan ketentuan tentang kelompok jabatan fungsional dimana kelompok jabatan fungsional bertugas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari Dinas Pasar terutama yang berkaitan dengan urusan administrasi keuangan. Kelompok jabatan fungsional di Dinas Pasar terdiri dari :

- 1) Bendaharawan Gaji bertugas untuk mengurus administrasi dan membukukan penyelenggaraan penggajian para pegawai di lingkungan dinas pasar, baik pegawai yang sifatnya pegawai PNS maupun para pegawai yang statusnya rollstate.
- 2) Pembuat daftar Gaji bertugas membuat daftar gaji bagi para pegawai di Dinas Pasar. Pembuat daftar gaji dalam pelaksanaan tugasnya membantu bendaharawan gaji untuk mengurus administrasi dan membukukan penyelenggaraan penggajian para pegawai di lingkungan dinas pasar, baik pegawai yang sifatnya pegawai PNS maupun para pegawai yang statusnya rollstate .
- 3) Bendaharawan Rutin menyelenggarakan administrasi dan pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan Dinas Pasar.
- 4) Bendahara Pemeliharaan bertugas untuk menyelenggarakan administrasi dan pembukuan terhadap kebutuhan-kebutuhan biaya yang berkaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pasar.
- 5) Bendaharawan Khusus Barang menyelenggarakan administrasi dan pembukuan terhadap barang-barang yang diperlukan oleh tiap-tiap satuan organisasi dalam lingkungan dinas pasar dan mencatat setiap pengeluaran untuk pembelian barang-barang tersebut.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jabatan fungsional diangkat dengan Surat Keputusan Bupati, orang-orang yang ada dalam kelompok jabatan

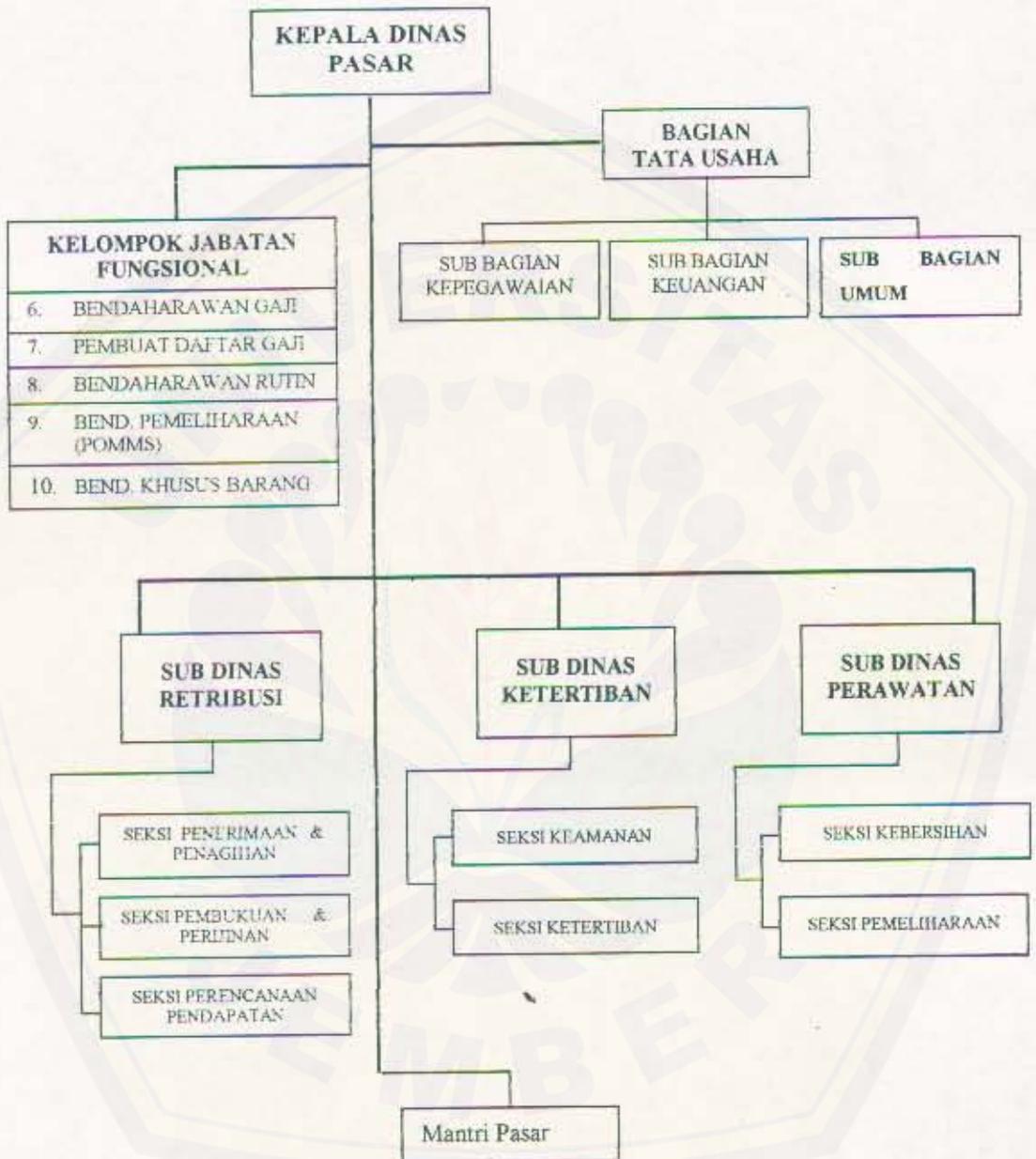
fungsional tersebut tidak menerima uang tunjangan akan tetapi diberi uang insentif tiap tiga bulan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya para bendahrawan tersebut berada dibawah koordinasi Kabag Tata Usaha Dinas Pasar.

Penambahan yang lain tampak dari pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai unit kerja di dinas pasar yang akan melakukan pengelolaan pasar untuk tiap kecamatan di Kabupaten Jember. Akan tetapi pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dalam Perda Nomor 85 tahun 2000 hingga saat ini belum dapat terbentuk. Ada beberapa kendala yang dihadapi :

1. Pemungutan retribusi pasar di kecamatan-kecamatan masih dapat ditangani dengan adanya unit kerja yang dipimpin oleh mantri pasar.
2. Sumber daya manusia yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. Biaya yang timbul akibat pembentukan UPTD belum tersedia.

Sebagai gantinya Dinas Pasar mengambil kebijakan dengan penunjukan seorang mantri pasar sebagai pegawai yang ditempatkan di pasar-pasar daerah. Mantri Pasar ini ditunjuk oleh Kepala Dinas Pasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya terutama untuk pengelolaan pasar-pasar daerah. Penunjukan mantri pasar berarti penempatan pejabat fungsional di tiap unit pasar yang dikuasai, karena mantri pasar bukan pejabat struktural melainkan pejabat fungsional dalam struktur organisasi dinas pasar dimana kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahliannya dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan. Untuk lebih jelas tentang penyesuaian tersebut akan terlihat dari struktur organisasi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai berikut;

Gambar V BAGAN STRUKTUR ORGANISASI YANG DITERAPKAN OLEH DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER



Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2002

Pengelolaan pasar-pasar di Kabupaten Jember Dinas Pasar dengan mekanisme kerja dan koordinasi kerja dengan wilayah kerja selama ini dapat berjalan dengan efektif dan terkendali. Efektifitas dari penunjukkan mantri pasar dalam pengelolaan unit-unit pasar tersebut dapat terlihat dari tercapainya target penerimaan retribusi pasar selama ini sebagaimana terlihat dari tabel 4. Realisasi penerimaan Retribusi pasar untuk Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun 2001 selalu dapat melampaui target yang dibebankan.

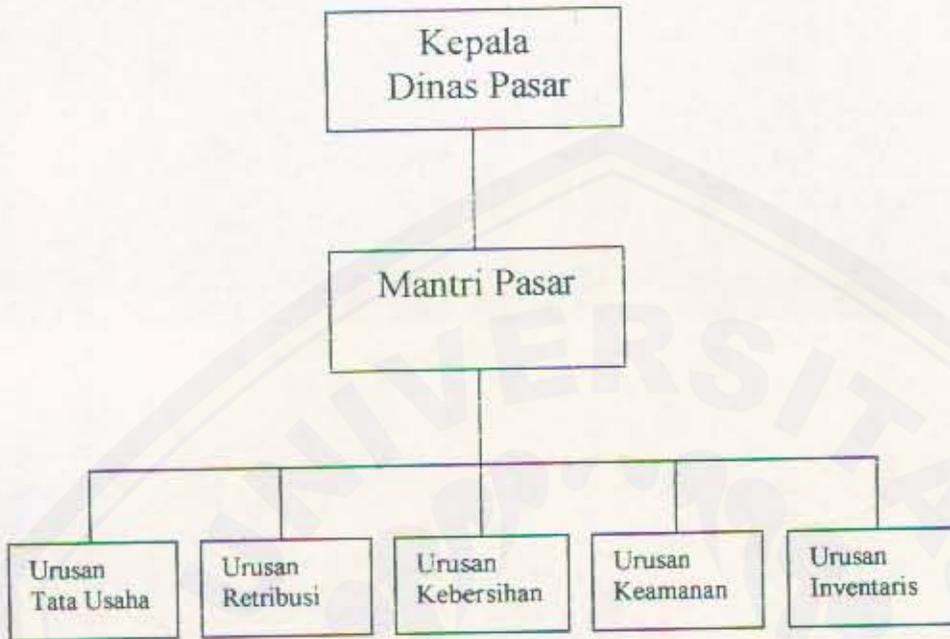
Pertimbangan yang lain, dengan penunjukkan mantri pasar dalam pengelolaan pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Jember adalah keberhasilan dari peran para mantri pasar dalam mengelola unit-unit pasar yang ada di wilayah kerjanya. Dalam melakukan pengelolaan atas unit pasar kepada para mantri pasar diwajibkan untuk dapat memenuhi target penerimaan retribusi pasar tiap tahunnya atas unit pasar yang dikelolanya. Pada tahun anggaran 2000 dan tahun anggaran 2001 realisasi penerimaan retribusi dari masing-masing pasar di Kabupaten Jember dapat mencapai target dan bahkan dapat melampaui dari target yang dibebankan. Penerimaan retribusi dari jenis pasar umum yang menjadi sumber utama dari retribusi pasar selama dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan dari para mantri pasar tersebut. Hal ini akan terlihat dalam lampiran.

Keberhasilan dari para mantri pasar atas tiap unit pasar yang dikelolanya menjadi alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan kebijakan penunjukkan mantri pasar dan bukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 85 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember. Para mantri pasar dalam melakukan pengelolaan pasar di wilayah kerjanya dibantu oleh para pegawai yang terbagi dalam tugas dan fungsi seperti yang ada dalam struktur dinas pasar. Unit-unit bagian yang membantu tugas mantri pasar terdiri dari :

1. Urusan Tata Usaha melaksanakan tugas administrasi dan urusan kerumaha-tangaan, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan pasar yang dikelola.;
2. Urusan Retribusi ini mempunyai tugas melakukan pungutan retribusi pada pedagang setiap harinya, melaksanakan penyusunan data pendapatan, mendata jumlah pedagang, perencanaan penerimaan pasar, usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pasar;
3. Urusan Keamanan melaksanakan tugas usaha dan kegiatan pengawasan, pengamanan teknis operasional serta melaksanakan tindakan preventif maupun refresif dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar;
4. Urusan Inventaris mempunyai tugas mengadakan inventarisir terhadap barang-barang yang dimiliki oleh tiap unit pasar;
5. Urusan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit Pasar.

Unit-unit urusan dalam struktur mantri pasar tersebut membantu para mantri pasar agar pelaksanaan pengelolaan di tiap unit dapat berjalan dengan efektif dan terkendali. Struktur organisasi dari para mantri pasar sebagai berikut :

Gambar VI Struktur Organisasi Pengelolaan Unit Pasar Oleh Mantri Pasar di Dinas Pasar Kabupaten Jember



Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2002

Keberadaan mantri pasar adalah mengkoordinasikan setiap urusan yang ada di tiap unit pasar, sedangkan mekanisme kerja urusan-urusan yang ada di tiap unit pasar berkoordinasi dengan bagian dan sub dinas di dinas pasar. Untuk urusan retribusi berhubungan dengan sub dinas retribusi di dinas pasar, urusan tata usaha dan urusan inventaris berhubungan dengan bagian tata usaha dinas pasar, urusan kebersihan berhubungan dengan sub dinas perawatan dan urusan keamanan berhubungan dengan sub dinas ketertiban.

Dengan adanya strategi ekstensifikasi berarti semakin menambah banyak unit pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Penambahan unit pasar tersebut berdampak pada struktur organisasi dari Dinas Pasar yang harus disesuaikan agar pengelolaan pasar-pasar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Struktur organisasi pada dasarnya menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi merupakan konsep abstrak. Tidak satupun orang yang sebetulnya pernah melihat hal yang sama. Apa yang

kita lihat adalah bukti struktur. Semua organisasi mempunyai struktur pekerjaan sendiri. Kenyataannya keberadaan struktur ini membedakan organisasi. Struktur organisasi dihasilkan dari keputusan manajerial mengenai empat atribut penting dari seluruh organisasi; pembagian pekerjaan, dasar departementalisasi, ukuran departemen dan pedelegasian wewenang.

Meskipun kesepakatan umum universal suatu set umum dimensi yang mengukur perbedaan struktur selain tidak mungkin dan tidak perlu beberapa saran dapat dibuat. Tiga dimensi acapkali digunakan dalam riset dan praktek guna menjelaskan struktur yakni; formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas.

3.1.3.1. Kompleksitas

Kompleksitas merujuk pada tingkat differensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini menunjukkan banyaknya kegiatan (sub sistem) dalam organisasi. Kompleksitas merupakan gambaran tentang seberapa banyak perbedaan-perbedaan dalam tingkatan pembagian tugas dan jumlah level-level dalam suatu organisasi. Kompleksitas yang ada di Dinas Pasar terbagi menjadi tiga, yakni;

3.1.3.1.a Diferensiasi Horisontal

Diferensiasi horisontal merujuk pada tingkat differensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan dan tingkat pendidikan serta pelatihannya.

Struktur organisasi Dinas Pasar terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Dinas Retribusi
- d. Sub Dinas Ketertiban
- e. Sub Dinas Perawatan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Mantri Pasar.

Bukti adanya differensiasi horisontal adalah spesialisasi dan departementalisasi. Spesialisasi merujuk pada pengelompokkan aktivitas tertentu yang dilakukan satu individu. Dari dua bentuk spesialisasi yakni spesialisasi

fungsional dan spesialisasi sosial, bentuk spesialisasi yang diterapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah bentuk spesialisasi fungsional yang dalam istilah yang lain disebut pembagian kerja (*division of labour*) dimana pekerjaan dipecah-pecah menjadi tugas yang sederhana dan berulang. Para pegawai Dinas Pasar terbagi total tugas organisasi kedalam pekerjaan yang spesifik dan mempunyai aktivitas yang spesifik. Aktivitas didefinisikan atas apa yang dilakukan orang dalam melakukan pekerjaan.

Struktur organisasi Dinas Pasar menetapkan 15 pembagian kerja yang terdiri dari :

1. Bendaharawan Gaji
2. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji
3. Bendaharawan Rutin
4. Bendaharawan Pemeliharaan
5. Bendaharawan Khusus Barang
6. Bagian Kepegawaian
7. Bagian Keuangan
8. Bagian Umum
9. Seksi Penerimaan dan Penagihan
10. Seksi Pembukuan dan Perijinan
11. Seksi Perencanaan Pendapatan
12. Seksi Keamanan
13. Seksi Keamanan
14. Seksi Ketertiban
15. Seksi Kebersihan dan Seksi Pemeliharaan.

Sedangkan pada unit kerja terdapat lima pembagian kerja yang terdiri dari :

1. Urusan Tata Usaha
2. Urusan Retribusi
3. Urusan Kebersihan
4. Urusan Keamanan
5. Urusan Inventaris.

adanya

Pasar

dengan

andil

anisasi

secara

n ynag

eil dan

najeral

tapkan

n yang

itorial.

lankan

untuk

sarana,

hadap

upaten

kerjaan

rtiban,

t- unit

okkan

gi lagi

Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas administrasi dan urusan kerumah-tanggaan, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan kerja Dinas Pasar dan melaksanakan program kerja Dinas Pasar.

Sub Dinas Retribusi terdiri dari ;

1. Seksi Penerimaan dan Penagihan.
2. Seksi Pembukuan dan Perijinan.
3. Seksi Perencanaan Pendapatan.

Seksi Dinas retribusi ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data pendapatan, jumlah pedagang, perencanaan penerimaan pasar, usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pasar.

Sub Dinas Ketertiban terdiri dari :

1. Sub Seksi Keamanan.
2. Sub Seksi Ketertiban.

Sub Dinas Ketertiban melaksanakan tugas usaha dan kegiatan pengawasan, pengamanan teknis operasional serta melaksanakan tindakan preventif maupun refresif dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar.

Sub Dinas Perawatan terdiri dari :

1. Seksi Kebersihan
2. Seksi Pemeliharaan.

Sub Dinas Perawatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pasar.

Unit kerja terdiri dari :

1. Urusan Tata Usaha
2. Urusan Retribusi
3. Urusan Kebersihan
4. Urusan Keamanan
5. Urusan Inventaris.

Unit kerja dipimpin oleh mantri pasar untuk melaksanakan tugas pokok dari dinas pasar dalam pengelolaan unit-unit pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Departementalisasi yang lain didasarkan atas dasar teritorial. Departementalisasi ini dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok atas dasar wilayah geografis. Penunjukkan mantri pasar untuk melaksanakan pengelolaan tiap unit pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember. Mantri pasar bertanggung jawab atas segala aktivitas dalam wilayah itu. Pembagian wilayah kerja mantri pasar tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 14.

Dengan adanya strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar berarti ada penambahan unit kerja dalam struktur organisasinya. Tambahan tersebut adalah adanya pembentukan unit kerja baru, yakni :

1. Unit kerja Pasar Khusus Burung yang dibentuk pada tahun 2000 untuk mengelola pasar khusus burung yang telah dibangun di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates.
2. Unit kerja Pasar Tegalbesar yang dibentuk pada tahun 2001 untuk mengelola pasar baru tersebut.
3. Unit kerja Pasar Bungur yang dibentuk pada tahun 2002 untuk mengelola unit Pasar Bungur.

Strategi ekstensifikasi memang berdampak pada semakin bertambahnya jumlah unit kerja yang ada di Dinas Pasar yakni dari 26 unit kerja pada tahun 1999 menjadi 29 unit kerja di tahun 2002. Pembentukan ketiga unit kerja baru tersebut akan meningkatkan kompleksitas dalam struktur organisasi di Dinas Pasar.

Peningkatan kompleksitas secara horisontal juga dipengaruhi oleh banyaknya pegawai yang dipekerjakan masih berstatus rollstate yang rata-rata berpendidikan rendah dan tidak memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus dari Dinas Pasar. Para pegawai ini hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang harus mereka kerjakan. Seorang informan mengungkapkan :

Sampai saat ini belum ada rincian tugas yang jelas dari Dinas Pasar bagi para pegawai di unit kerja. Seringkali saya memberikan arahan dan bimbingan pada para pegawai terutama dalam aktivitas pemungutan retribusi pada para pedagang dan melakukan penerbitan pada pedagang yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan raya.

asar disini sangat penting untuk dapat menterjemahkan kebijakan-
Dinas Pasar untuk selanjutnya memberikan petunjuk-petunjuk
gas bagi para bawahannya.

gunan pasar baru seperti yang terlihat di pasar Bungur dimana
masih bersifat darurat, yakni tempat untuk menampung para
sebelumnya berjualan di sepanjang rel kereta api di Desa Bungur.
na-pasar seperti bangunan kios,bedak, los, kantor unit kerja pasar,
bangun atas dana swadaya dari para pedagang. Hal membuat Dinas
ambil kebijakan untuk menempatkan seorang pegawai yang
ngetahuan dan ketrampilan khusus untuk menangani keberadaan
ebut. Hal ini seperti diungkapkan seorang informan;

inas Pasar saya diberi tugas khusus, yakni bagaimana dapat
ketkan keramaian pasar, karena saat ini Pasar Bungur masih sepi
ri penjual maupun para pembelinya. Selain itu saya harus bisa
rikan pelayanan yang prima kepada para pedagang meskipun
i sarana prasana pasar sampai saat ini belum dibangun.

Mantri Pasar Bungur mempunyai tugas untuk upaya penertiban
Seperti daegaskan seorang informan :

minta Dinas Pasar untuk dapat menertibkan para pedagang yang
berjualan disepanjang rel kereta api di Kampung Ledok. Meskipun
edagang telah disediakan pasar baru tetapi mereka belum mau
padahal dengan menempati pasar yang telah disediakan oleh
ntah Kabupaten Jember keselamatan para pedagang dan pembeli
bih terjamin.

ban para pedagang baru berhasil dilakukan pada tanggal 25 Juli
embelian tanah kosong seluas 2.800m² di Kelurahan Gebang yang
untuk menampung para pedagang.

ng sama juga terjadi dengan pembangunan pasar khusus burung di
a sebagian para pedagang yang disediakan pasar baru tidak mau pin
menempati lokasi yang lama di sebuah gang Jaian Gato: Subroto.

Pasar Tegalbesar kebanyakan kios-kios yang dibangun belum
rиси. Para pedagang lebih suka berjualan di halaman depan dan
asar. Kondisi ini tentu saja akan bisa menimbulkan kemacetan dan
di sekitar lokasi pasar.

3.1.3.1.b Diferensiasi Vertikal

Diferensiasi vertikal yang merujuk pada kedalaman struktur. Diferensiasi Vertikal ini ditentukan oleh rentang kendali. Rentang kendali menetapkan jumlah bawahan yang dapat diatur efektif oleh seorang manajer.

Pelaksanaan pungutan retribusi pasar ini Kepala Dinas Pasar yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pasar membawahi 374 personil yang terbagi dalam setiap unit-unit dalam struktur Dinas Pasar. Kepala Dinas bertanggung jawab pada bupati melalui sekretaris daerah sedang pada sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi.

Sampai dengan saat ini untuk melayani wilayah kerja pasar yang meliputi 29 unit pasar umum, 11 unit pasar hewan dan 1 unit pasar khusus burung Dinas Pasar memiliki personil sebanyak 374 orang yang terdiri dari :

- | | | |
|---------------|-------|--------|
| 1. PNS | : 163 | orang |
| 2. Rollstat | : 201 | orang |
| 2. PP. 31 | : 8 | orang |
| 3. Honor ABRI | : 2 | orang. |

Yang hampir tersebar diseluruh kecamatan se-Kabupaten Jember.

Berkaitan dengan banyaknya bawahan yang dapat diatur oleh seorang pimpinan, pada dasarnya dalam melaksanakan tugas kepala dinas pasar bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sedangkan setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas pasar bawahan mempunyai bawahan sesuai dengan departemetalisai yang ada di dinas pasar. Di Dinas Pasar Kabupaten Jember jumlah bawahan yang dipimpin oleh para pimpinan tiap-tiap satuan unit tidak sama. Dalam struktur organisasi dinas pasar terdapat tiga tingkatan hirarki pimpinan.

Pada tingkatan hirarki pertama Kepala Dinas Pasar memiliki empat pimpinan yang melapor kepadanya terdiri kepala tata usaha, kasubdin perawatan, kasubdin retribusi dan kasubdin ketertiban. Pada tingkatan hirarki yang pertama kepala dinas pasar memiliki 4 (empat) pimpinan satuan organisasi yang melapor kepadanya.

Pada tingkatan hirarki kedua, kepala bagian tata usaha membawahi tiga kepala bagian yang terdiri dari kepala bagian kepegawaian, kepala bagian keuangan dan kepala bagian umum. Untuk kepala sub dinas retribusi memiliki tiga orang kepala seksi yang melapor kepadanya yang terdiri dari kepala seksi penerimaan dan penagihan, kepala pembukuan dan perijinan, dan kepala seksi perencanaan dan pendapatan. Sub dinas perawatan memiliki dua orang seksi yang melapor kepadanya yakni seksi kebersihan dan seksi pemeliharaan. Sub dinas ketertiban memiliki dua orang seksi yang melapor kepadanya yakni seksi keamanan dan seksi ketertiban. Jadi pada tingkatan hirarki kedua terdapat 4 (empat) pimpinan yang membawahi 10 (sepuluh) pimpinan untuk tiap unitnya.

Pada tingkatan hirarki ketiga terdiri dari kepala bagian kepegawaian mempunyai tiga orang bawahan, kepala bagian keuangan empat orang bawahan dan kepala bagian umum membawahi delapan orang. Seksi perawatan memiliki satu orang bawahan dan seksi kebersihan satu orang bawahan. Pada tingkatan hirarki ketiga terdapat 10 pimpinan (sepuluh) yang memiliki 20 orang bawahan.

Untuk tingkatan hirarki antara kepala dinas pasar dan mantri pasar terdapat dua tingkatan hirarki. Pada tingkatan hirarki pertama kepala dinas pasar membawahi 29 (dua puluh sembilan) mantri pasar. Sedangkan tingkatan hirarki kedua ke-29 (dua puluh sembilan) mantri pasar tersebut memiliki 343 bawahan yang melapor kepadanya. Bawahan dari mantri pasar untuk tiap unit pasar tidak sama, hal tersebut disesuaikan dengan luas, keramaian, kondisi dan situasi pasarnya.

Struktur organisasi yang diterapkan menggunakan struktur yang lebar dan bukan struktur yang tinggi. Hal ini terlihat dari tingkatan hirarki antara kepala dinas pasar dengan mantri pasar dimana kepala dinas pasar memiliki 29 mantri pasar yang melapor kepadanya. Struktur ini mempunyai rantai komunikasi yang lebih singkat dan sederhana dimana mantri pasar dapat langsung berkomunikasi dengan kepala dinas pasar tanpa melalui tingkatan hirarki yang ada di atasnya. Namun struktur ini mempersempit peluang kenaikan jabatan bagi para mantri pasar karena tingkatan manajemen yang lebih sedikit.

Adanya strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh dinas pasar tentu saja menambah bawahan baik bagi kepala dinas pasar. Adanya penambahan jumlah pegawai ini tampak dengan bertambahnya jumlah mantri pasar dan jumlah pegawai untuk pasar baru tersebut. Mantri pasar yang baru adalah Mantri Pasar Burung, Mantri Pasar Tegalbesar dan Mantri Pasar Bungur. Meskipun tidak terdapat penambahan jumlah pegawai karena para pegawai untuk ketiga unit pasar baru tersebut pasar Bungur diambilkan dari unit kerja lain, penunjukkan mantri pasar baru tersebut membuat rentang yang semakin lebar antara kepala dinas pasar dengan mantri pasar. Dari 26 mantri pasar yang dipimpinnya menjadi 29 mantri pasar yang kini berada dibawahnya.

Dengan semakin bertambah lebarnya rentang dan besaran organisasi Dinas Pasar maka berkurang pula efektifitasnya. Peningkatan besaran organisasi akan mengakibatkan kompleksitas dan tuntutan waktu yang lebih banyak dari para pimpinan Dinas Pasar. Sebagaimana dikemukakan oleh Robbins (Robbins, 1994: 98).

Semakin besar organisasi keefektifan organisasinya akan berkurang. Bukti menunjukkan bahwa makin besar organisasi, maka kurang efektif pula keefektifan organisasi yang lebar. Peningkatan besaran akan mengakibatkan kompleksitas dan tuntutan waktu lebih banyak dari para manajer.

Besaran organisasi meningkat dengan pembentukan unit kerja baru tersebut, tentu saja ini akan menambah kompleksitas dalam organisasi Dinas Pasar.

Untuk saat ini Dinas Pasar belum dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidang perawatan, aparatur, kebersihan, keamanan dan ketertiban. Meskipun antara para mantri pasar kepala dinas pasar tidak ada tingkatan hirarki lagi, namun berbagai persoalan tersebut lebih sering diselesaikan sendiri oleh mantri pasar. Seperti dituturkan seorang informan ;

Perhatian dari pihak dinas masih bisa dibilang kurang. Saya lebih sering menyelesaikan sendiri berbagai persoalan di unit kerja saya meskipun persoalan tersebut juga menjadi tanggung jawab pihak dinas.

Seorang informan lain menegaskan :

Sampai saat ini belum pernah diadakan suatu pertemuan antara mantri pasar dengan kepala dinas dimana para mantri pasar dapat dengan bebas

mengungkapkan persoalan-persoalan yang dihadapi di tingkatan unit kerja. Dalam setiap pertemuan yang diadakan di kantor dinas pasar setiap bulannya, kepala dinas hanya menekankan pada upaya-upaya pencapaian target perolehan pungutan retribusi tanpa mau mengetahui kendala yang dihadapi para pegawainya di lapangan.

Dari kedua pendapat diatas terlihat bahwa perhatian yang diberikan dinas pasar kepada para pegawainya di tingkatan unit kerja masih kurang. Disisi lain komunikasi yang terjadi lebih bersifat satu arah, yakni dari atasan kepada para bawahan.

Kondisi diatas masih ditambah dengan kebijakan dari dinas yakni akan memutasi para pegawainya yang diangkat jadi mantri pasar bila selama enam bulan tidak dapat mencapai perolehan pungutan retribusi dari target yang telah dibebankan. Kebijakan ini tentu saja akan berpengaruh pada kinerja para mantri pasar dan para pegawainya yang lebih berorientasi pada pencapaian hasil pungutan daripada memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disamping itu pengangkatan para mantri pasar baru tersebut sesuai kedudukannya sebagai pimpinan di tiap unit pasar akan meningkatkan kompleksitas karena tugas para mantri pasar tersebut tidak bersifat sederhana dan berulang-ulang, membutuhkan ketrampilan dan keahlian khusus.

3.1.2.1.c Difrensiasi Spasial

Organisasi dapat melakukan aktivitas yang sama dengan tingkat differensiasi horizontal dan pengaturan hirarki yang sama diberbagai lokasi. Tetapi keberadaan berbagai lokasi tersebut meningkatkan kompleksitas. Oleh karena itu, elemen ketiga dalam kompleksitas adalah differensiasi spasial, yang merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi dari pabrik, kantor dan personalia sebuah organisai tersebar secara geografis. Differensiasi spasial dapat dilihat sebagai perluasan dari differensiasi horizontal dan vertikal. Artinya adalah, mungkin untuk memisahkan tugas dan pusat kekuasaan secara geografis. Pemisahan ini mencakup penyebaran jumlah maupun jarak.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama untuk pengelolaan pasar-pasar daerah Kepala Dinas Pasar menunjuk seorang mantri pasar. Penyebaran mantri pasar yang disesuaikan dengan pasar yang dikelolanya adalah untuk memisahkan tugas dari pusat kekuasaan secara geografis. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyebaran tugas dari kepala dinas kepada mantri pasar. Setiap mantri pasar harus dapat menjabarkan visi dan misi dari dinas pasar dalam menjalankan tugas pokok di tiap-tiap unit pasar.

Berdasarkan wilayah kerjanya mantri pasar mengelola pasar ada yang terdiri dari satu unit pasar dan lebih satu unit pasar. Dengan adanya strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh dinas pasar menjadikan jumlah dan luas pasar menjadi bertambah, ini juga menambah jumlah mantri pasar dalam pengelolaannya.

Pada tahun 1999 wilayah kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember meliputi :

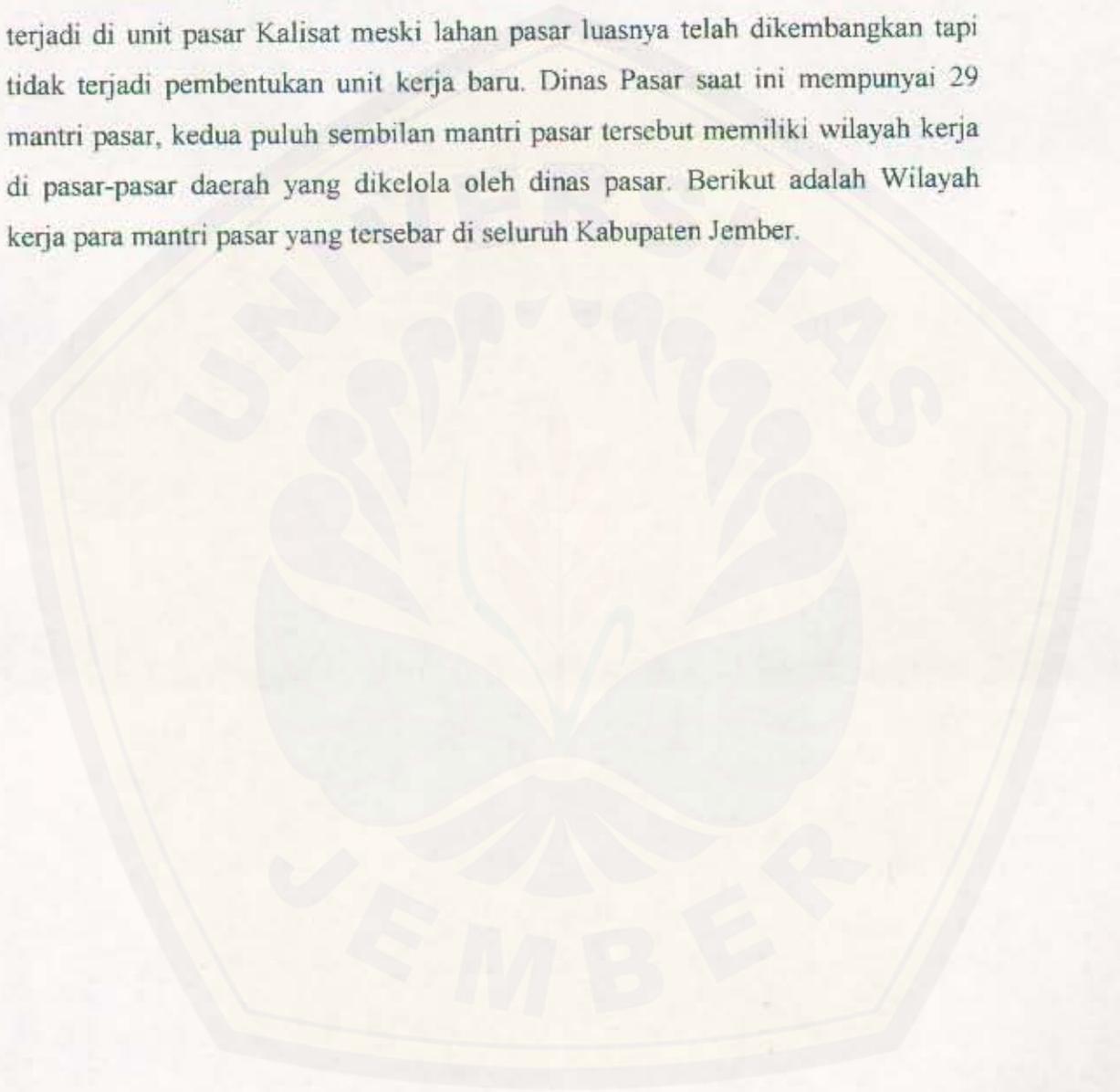
- a. Pasar Umum = 26 unit
- b. Pasar Hewan = 11 unit

Sedangkan pada tahun 2002 Dinas Pasar Kabupaten Jember memiliki wilayah kerja yang meliputi :

- a. Pasar Umum = 28 unit
- b. Pasar Hewan = 11 unit
- c. Pasar Khusus Burung = 1 unit

Ada penambahan jumlah pasar umum yang dikelola oleh Dinas Pasar yakni Pasar Khusus Burung, Pasar Umum Tegalbesar dan Pasar Umum Bungur.

Sedangkan Pasar Kepatihan sebelum diadakannya pengadaan tanah untuk menmpung para pedagang sudah berada dalam pengelolaan dinas pasar dan berada dalam wilayah kerja wilayah Mantri Pasar Tegalboto. Hal yang sama terjadi di unit pasar Kalisat meski lahan pasar luasnya telah dikembangkan tapi tidak terjadi pembentukan unit kerja baru. Dinas Pasar saat ini mempunyai 29 mantri pasar, kedua puluh sembilan mantri pasar tersebut memiliki wilayah kerja di pasar-pasar daerah yang dikelola oleh dinas pasar. Berikut adalah Wilayah kerja para mantri pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember.



Tabel 14. Wilayah Kerja Mantri Pasar dalam Pengelolaan Pasar-pasar Daerah di Kabupaten Jember

NO	Mantri Pasar	Wilayah kerja	Desa	Kecamatan
1	MP Rambipuji	Ps. Rambipuji	Ds. Rambipuji	Kec. Rambipuji
		Ps. Hewan Rambipuji	Ds. Rowotamtu	Kec. Rambipuji
2	MP Umbul Sari	Ps. Umbul Sari	Ds. Umbul Sari	Kec. Umbulsari
3	MP Patrang	Ps. Patrang	Kel. Patrang	Kec. Patrang
4	MP Bangsalsari	Ps. Bangsalsari	Ds. Bangsalsari	Kec. Bangsalsari
		Ps. Hewan Bangsalsari	Ds. Bangsalsari	Kec. Bangsalsari
5	MP Manggisari	Ps. Manggisari	Ds. Tanggul Kulon	Kec. Tanggul
6	MP. Tegalboto	Ps. Kepatihan	Kel. Kepatihan	Kec. Kaliwates
		Ps. Tegalboto	Kel. Tegalboto	Kec. Sumpalsari
7	MP. Tanggul	Ps. Tanggul	Ds. Tanggul Kulon	Kec. Tanggul
		Ps. Hewan Tanggul	Ds. Tanggul Wetan	Kec. Tanggul
8	MP. Sempolan	Ps. Sempolan	Ds. Sempolan	Kec. Silo
9	MP. Sukosari	Ps. Sukosari	Ds. Walet Baru	Kec. Sukowono
10	MP. Tanjung	Ps. Tanjung	Kel. Jember Kidul	Kec. Kaliwates
11	MP. Johar	Ps. Johar	Kel. Jember Kidul	Kec. Kaliwates
12	MP. Mangli	Ps. Mangli	Kel. Mangli	Kec. Kaliwates
13	MP. Kencong	Ps. Kencong	Ds. Kencong	Kec. Kencong
		Ps. Hewan Kencong	Ds. Kencong	Kec. Kencong
14	MP. Sukowono	Ps. Sukowono	Ds. Sukowono	Kec. Sukowono
		Ps. Hewan Sukowono	Ds. Sukowono	Kec. Sukowono
15	MP. Petung	Ps. Petung	Ds. Petung	Kec. Bangsalsari
16	MP. Balung	Ps. Balung	Ds. Balung Lor	Kec. Balung
		Ps. Hewan Balung	Ds. Balung Kulon	Kec. Balung
17	MP. Puger	Ps. Puger	Ds. Puger Kulon	Kec. Puger
18	MP. Menampu	Ps. Menampu	Ds. Menampu	Kec. Gumukmas
		Ps. Hewan Ps. Menampu	Ds. Menampu	Kec. Gumukmas
19	MP. Ambulu	Ps. Ambulu	Ds. Ambulu	Kec. Ambulu
		Ps. Hewan Ambulu	Ds. Tegalsari	Kec. Ambulu
20	MP. Gladak Merah	Ps. Gladak Merah	Ds. Menampu	Kec. Gumukmas
21	MP. Sukorejo	Ps. Sukorejo	Ds. Sukorejo	Kec. Sumpalsari
22	MP. Bungur	Ps. Bungur	Ds. Gebang	Kec. Patrang
23	MP. Burung	Ps. Burung	Ds. Jember Kidul	Kec. Kaliwates
24	MP. Kalisat	Ps. Kalisat	Ds. Kalisat	Kec. Kalisat
		Ps. Hewan Kalisat	Ds. Glagahwero	Kec. Kalisat
25	MP. Gebang	Ps. Gebang Atas	Kel. Gebang	Kec. Patrang
		Ps. Gebang Bawah	Kel. Jember Lor	Kec. Kaliwates
26	MP. Tegalbesar	Ps. Tegalbesar	Kel. Tegalbesar	Kec. Kaliwates
27	MP. Mayang	Ps. Mayang	Ds. Tegalrejo	Kec. Mayang
		Ps. Hewan Mayang	Ds. Tegalwaru	Kec. Mayang
28	MP. Jenggawah	Ps. Jenggawah	Ds. Jenggawah	Kec. Jenggawah
		Ps. Hewan Ajung	Ds. Klompangan	Kec. Ajung
29	MP. Kreyongan	Ps. Kreyongan	Kel. Jember Lor	Kec. Patrang

Sumber data primer diolah tahun 2002

Dari data tersebut diatas tampak bahwa nama-nama mantri pasar disesuaikan dengan unit pasar yang dikelolanya. Pembagian wilayah kerja mantri pasar didasarkan atas unit-unit pasar yang dikelolanya.

Wilayah kerja para mantri pasar yang mengelola pasar umum dan sekaligus pasar hewan terdapat di pasar-pasar yang terletak diluar kota. Mantri pasar yang mengelola pasar hewan dan pasar umum adalah Mantri Pasar Rambipuji, Mantri Pasar Bangsalsari, Mantri Pasar Tanggul, Mantri Pasar Kencong, Mantri Pasar Balung, Mantri Pasar Ambulu, Mantri Pasar Menampu, Mantri Pasar Sukowono, Mantri Pasar Mayang, Mantri Pasar Jenggawah dan Mantri Pasar Kalisat.

Sistem pemungutan retribusi pasar dari pasar hewan dilakukan oleh para mantri pasar dan para pegawainya dengan melihat hari pasaran dari pasar hewan tersebut. Pada saat hari pasaran hewan mantri pasar membagi para pegawainya, sebagian pegawai memungut pasar umum yang dikelolanya dan sebagian memungut retribusi di pasar hewan.

Tabel 15. Daftar Hari Pasaran dari Pasar Hewan yang Dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember;

No	Unit Pasar Hewan	Wilayah Kerja Mantri Pasar	Hari Pasaran
1	Pasar Hewan Ambulu	Mantri Pasar Ambulu	Minggu
2	Pasar Hewan Rambipuji	Mantri Pasar Rambipuji	Jum'at
3	Pasar Hewan Kencong	Mantri Pasar Kencong	Rabu dan Sabtu
4	Pasar Hewan Tanggul	Mantri Pasar Tanggul	Senin
5	Pasar Hewan Bangsalsari	Mantri Pasar Bangsalsari	Rabu dan Sabtu
6	Pasar Hewan Ajung	Mantri Pasar Ajung	Sabtu
7	Pasar Hewan Mayang	Mantri Pasar Mayang	Minggu
8	Pasar Hewan Kalisat	Mantri Pasar Kalisat	Rabu
9	Pasar Hewan Sukowono	Mantri Pasar Sukowono	Senin
10	Pasar Hewan Menampu	Mantri Pasar Menampu	Senin Senin
11	Pasar Hewan Balung	Mantri Pasar Balung	Senin

Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2002

wa

lam

am

tan

unit

tan

tegi

ung

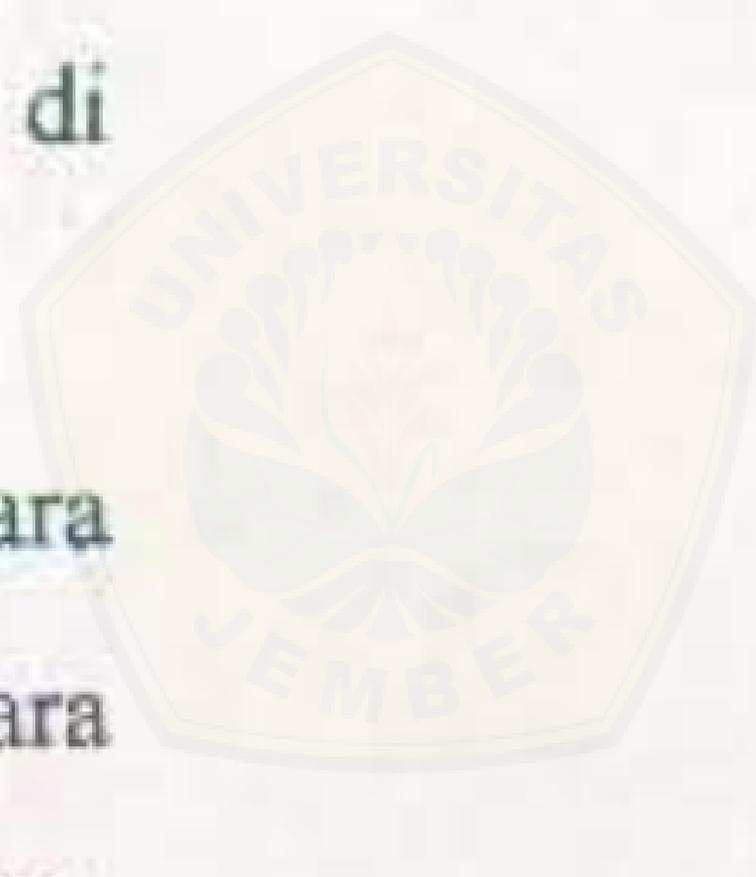
esar

di

cara

para

der.



Tabel 16 Rekapitulasi Data Kepegawaian Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2002.

No.	Unit Kerja	PNS	PP.31 Th. 1954	Tenaga Rollstate	Honorer ABRI	Jumlah
1	Dinas Pasar	27	-	9	-	36
2	Pasar Tanjung	22	6	66	1	95
3	Pasar Johar	2	-	4	-	6
4	Pasar Gebang	5	2	9	-	16
5	Pasar Kreyongan	3	-	3	-	6
6	Pasar Patrang	3	-	1	-	4
7	Pasar Tegalboto	4	-	4	-	8
8	Pasar Sukorejo	1	-	3	-	4
9	Pasar Mangli	3	-	3	-	6
10	Pasar Burung	4	-	2	-	6
11	Pasar Tegalbesar	3	-	4	-	7
12	Pasar Bungur	2	-	3	-	5
13	Pasar Kalisat	7	-	9	-	16
14	Pasar Sukowono	1	-	5	-	6
15	Pasar Sukosari	1	-	1	-	2
16	Pasar Mayang	3	-	6	-	9
17	Pasar Silo/Sempolan	2	-	5	-	7
18	Pasar Rambipuji	6	-	4	-	10
19	Pasar Petung	2	-	1	-	3
20	Pasar Bangsalsari	5	-	6	-	11
21	Pasar Manggisan	4	-	4	1	9
22	Pasar Tanggul	9	-	5	-	14
23	Pasar Umbulsari	4	-	5	-	9
24	Pasar Kencong	9	-	6	-	15
25	Pasar Menampu	1	-	3	-	4
26	Pasar Gladak Merah	2	-	4	-	6
27	Pasar Puger	3	-	9	-	12
28	Pasar Balung	17	-	6	-	23
29	Pasar Ambulu	4	-	8	-	12
30	Pasar Jenggawah	4	-	3	-	7
	Jumlah	163	8	201	2	374

Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember 2002

para

awai

PNS

PNS

PNS

arena

aten

baru

unit-

ngsi

k ini

olaan

bagi

juga

an di

n jasa

utama

ribusi

ampung

engan

anyak

untuk

yang

roduk

04

akan

egera

unan

akan

atkan

ntal,

ikasi

sitas

entuk

kerja

SSSI

Dinas



3.1.2.2 Formalisasi

Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan didalam organisasi itu distandarisasikan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya para pegawai di Dinas Pasar Kabupaten Jember para pegawai mengacu pada peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya peraturan dan prosedur tersebut para pegawai diharapkan untuk selalu menangani masukan yang sama dan menghasilkan keluaran yang sama dengan cara yang sama dan konsisten, dalam aturan dan prosedur tersebut juga terdapat uraian pekerjaan yang eksplisit.

Strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar yang bertujuan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan retribusi pasar serta memberikan pelayanan yang prima pada para pengguna fasilitas pasar perlu diimbangi dengan formalisasi yang sesuai agar tercapainya tujuan tersebut. Dinas Pasar dalam menstandarisasikan perilaku para pegawainya mempunyai beberapa tehnik. Tehnik-tehnik tersebut meliputi :

3.1.2.2.a Seleksi

Pengadaan pegawai di Dinas Pasar terdiri dari dua macam jenis pegawai yakni pegawai negeri sipil dan tenaga rollstate. Pengadaan pegawai adalah proses untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi negara pada umumnya disebabkan oleh adanya pegawai yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan, dan adanya pengembangan organisasi. Karena pengadaan pegawai dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong, pengadaan didasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Pengadaan pegawai dilakukan mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan.

Karena Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana dari tugas kepala daerah maka pengadaan pegawai dilingkungan dinas pasar dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Jember. Dinas Pasar hanya berwenang untuk mengadakan analisis kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai, menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pembinaan karier dan pemberhentian

data pegawai, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pembinaan karier dan pemberhentian atau pensiun pegawai, mengurus kesejahteraan pegawai dan menyelenggarakan peningkatan disiplin pegawai.

Untuk mengetahui keadaan jumlah pegawai dari tahun anggaran 1999/2000 s/d 2002 yang ada di Dinas Pasar akan terlihat dari tabel berikut :

Tabel 17 Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Pasar mulai tahun anggaran 1999/2000 s/d 2002

No	Tahun anggaran	PNS	Rollstate	PP. 31	Honorer ABRI	CPNS	Jumlah
1	1999/2000	177	201	8	4	-	390
2	2000	174	201	8	4	2	389
3	2001	167	201	9	2	-	389
4	2002	163	201	8	2	-	374

Sumber Data : Dinas Pasar Tahun 2002

Dari data pegawai diatas tampak bahwa Dinas pasar dalam melakukan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Jember masih kekurangan pegawai dengan status PNS. Jumlah pegawai yang berstatus PNS yang adapun tiap tahun selalu mengalami penurunan. Penurunan jumlah pegawai dari pegawai yang berstatus PNS sampai dengan tahun 2002 sebanyak 14 pegawai, pegawai Honorer ABRI sebanyak 2 orang sedangkan untuk jumlah pegawai rollstate masih sama yakni 201 pegawai.

Dengan adanya strategi ekstensifikasi tentu saja akan meningkatkan jumlah pegawai yang diperlukan terutama pegawai dengan status PNS. Saat ini untuk mengantisipasi kekurangan pegawai terutama di unit-unit kerja Dinas Pasar mengangkat tenaga kerja honorer ABRI untuk tugas keamanan dan tenaga kerja rollstate meskipun dalam peraturan sebenarnya tidak diperbolehkan. Jumlah pegawai rollstate yang dipekerjakan di lingkungan Dinas Pasar mulai tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2002 jumlahnya tidak mengalami peningkatan sebanyak 201 pegawai.

Untuk pengangkatan pegawai rollstate sebelum tahun 2002 dilakukan oleh Dinas Pasar. Mulai tahun 2002 untuk tenaga kerja yang sifatnya rollstate pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh kepala daerah atas usul kepala dinas. Tenaga rollstat bekerja selama satu tahun sesuai kontrak yang dibuat dengan Pemerintah Kabupaten Jember untuk dipekerjakan dalam lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Jember. Kepada tenaga rollstat diberikan honorarium sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| a. Upah harian tetap | (31 hari x Rp 5.400; 00) = Rp | 167.400;00 |
| b. Tunjangan pangan kawin | (25 kg x Rp 2.100;00) = Rp | 52.500;00 |
| c. Tunjangan pangan tidak kawin | (10 kg x Rp 2.100;00) =Rp | 21.000;00 |
| d. Tambahan kesejahteraan | =Rp | 27.800;00 |

Kebutuhan tenaga kerja yang ada di tiap unit kerja ditetapkan oleh Dinas Pasar. Penetapan ini didasarkan atas luas, kondisi dan keramaian pasar serta atas usulan dari mantri pasar.

Berdasarkan surat keputusan bupati yang tertuang dalam perjanjian kontrak kerja antara para pegawai dengan Pemerintah Kabupaten Jember honorarium yang diterima oleh para pegawai yang berstatus rollstate hanya sebesar Rp. 247.700;00 bagi tenaga kerja yang sudah kawin dan Rp. 216.200;00 yang belum kawin. Minimnya gaji yang diterima para pegawai yang berstatus rollstate kurang bisa memberi jaminan kesejahteraan para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Besarnya gaji yang diperoleh bahkan masih dibawah upah minimum regional (UMR) di Kabupaten Jember yang ditetapkan sebesar Rp. 380.000;00.

Untuk mengantisipasi kekurangan jumlah pegawai dengan status PNS akibat strategi ekstensifikasi tersebut Dinas Pasar menetapkan dua kegiatan untuk mengantisipasinya, meliputi ;

1. Penambahan PNS Dinas Pasar secara bertahap untuk memenuhi adanya aparatur yang berstatus PNS terutama pada unit-unit unit kerja.

Penambahan PNS yang dipekerjakan di Dinas Pasar mulai tahun 1999 s/d 2002 sebanyak 4 orang pegawai. Penambahan ini terjadi pada tahun 2002 para

pegawai tersebut hasil mutasi dari Pegawai yang dulunya berdinasi di kantor Kecamatan Kencong sebanyak 3 orang sedangkan satu orang dari kantor Diknas Jember.

Untuk tahun-tahun mendatang pihak dinas mengagendakan penambahan PNS sebanyak 24 pegawai PNS kepada Pemerintah Kabupaten Jember secara bertahap.

2. Meningkatkan status tenaga Rollstat yang telah mengabdikan cukup lama untuk direkrut menjadi PNS apabila memungkinkan

Kegiatan ini dilakukan dengan mengikutkan para pegawai dengan status rollstate untuk mengikuti seleksi pegawai yang diadakan oleh pihak Pemkab Jember. Pada seleksi pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan Pemkab Jember tahun 2002 Dinas Pasar mengikutkan sebanyak 201 pegawai rollstatenya untuk diterima jadi PNS tapi tidak ada satupun pegawai rollstate tersebut yang diterima jadi PNS.

Strategi ekstensifikasi tentu saja akan meningkatkan kekurangan jumlah pegawai khususnya yang berstatus PNS, namun dari kedua kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pasar hasilnya hanya terdapat penambahan jumlah PNS sebanyak 4 orang pegawai. Untuk kegiatan perubahan status rollstate menjadi PNS sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemkab Jember. Kondisi inilah yang membuat Dinas Pasar masih mempertahankan menggunakan pegawai dengan status rollstate dalam menjalankan fungsinya melakukan pengelolaan pasar-pasar di Kabupaten Jember.

3.1.2.2.b Peraturan

Peraturan merupakan pernyataan eksplisit yang ditujukan pada seorang pegawai tentang apa yang harus atau tidak dilakukan oleh para pegawai. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar, Dinas Pasar Kabupaten Jember didasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1995 yang mengatur tentang pengelolaan pasar- pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Jember.

Perda nomor 3 tahun 1995 selain berisi tentang ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar-pasar daerah. Perda nomor 3 tahun 1995 diantaranya berisi tentang berbagai ketentuan yang diantaranya mengatur tentang Pendirian pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember baik pasar umum, pasar khusus maupun pasar darurat, yang kemudian diklasifikasikan menjadi kelas utama, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang kriterianya di atur lebih lanjut.

Tingkat kelas masing-masing pasar yang ada berdasarkan fasilitas bangunan serta jumlah jenis barang yang diperdagangkan ditetapkan oleh kepala daerah. Berdasarkan jenis dagangan yang dipergunakan di pasar umum, diadakan penggolongan jenis sebagai berikut :

- 1) Golongan A : Logam mulia, tekstil, dan yang disamakan;
- 2) Golongan B : Konfeksi, kelontong, alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan, daging, ikan dan yang disamakan;
- 3) Golongan C : Hasil bumi, buah-buahan, sayur-mayur, unggas, rempah-rempah, makanan, jasa, yang disamakan;
- 4) Golongan D : Gerabah, anyam-anyaman, barang bekas, alat pertanian, klitikan dan yang disamakan.

Berdasarkan letak tempat usaha (LTU) yang dipergunakan di pasar umum diadakan penggolongan sebagai berikut :

- a. LTU 1 yakni toko/kios yang menghadap keluar;
- b. LTU 2 yakni toko/kios yang menghadap kedalam
- c. LTU 3 yakni toko/kios, bedak, didalam los pasar;
- d. LTU 4 yakni los terbuka didalam pasar;

Sedangkan ternak atau hewan yang dibawa masuk kedalam pasar hewan untuk diperjualbelikan atau keperluan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Ternak besar seperti kuda, sapi kerbau sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
- b. Ternak kecil seperti domba, kambing sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor.

Untuk menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar daerah pemakai terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan ijin dari kepala daerah, ijin sebagaimana yang dimaksud diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan setiap penerbitan surat ijin menempati dikenakan retribusi. Dalam surat ijin menempati ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin selama menggunakan tempat-tempat dalam pasar serta pemegang ijin wajib memperbaharui kembali setiap tiga tahun.

Setiap pemakai yang akan menempati kembali toko/kios, rumah toko, bangunan bedak dan warung yang dibangun oleh pemerintah daerah dikenakan kontribusi kepada pemerintah daerah sebesar harga bangunan. Sedangkan untuk pemakai yang akan menempati kembali petak-petak dalam pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah dikenakan kontribusi kepada pemerintah daerah sebesar lima permil setiap meter persegi dari harga bangunan. Apabila terjadi pemindahan hak dan mendapat persetujuan dari kepala daerah dikenakan retribusi :

- a. Untuk pasar kelas utama dan kelas 1 sebesar 30 (tiga puluh) kali ketentuan retribusi bulanan.
- b. Untuk pasar kelas 2 dan kelas 3 sebesar 15 (lima belas) kali ketentuan retribusi bulanan.

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat ijin diterimakan kepada pemohon pemegang ijin harus melaksanakan usahanya di tempat yang telah ditentukan.

Setiap penerbitan surat ijin menempati (SIM) atas pemanfaatan bangunan dalam pasar dikenakan retribusi :

- a. Toko/kios, rumah toko sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

b. Bedak/bedak dalam los pasar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagi para pedagang dan pemilik toko/kios,ruko yang berada di lingkungan pasar dikenakan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku. Bagi para padagang yang ingin mengurus surat ijin menempati (SIM) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui dinas pasar.

Bagi para pedagang yang memerlukan tempat didalam pasar untuk membangun atas biaya sendiri sebuah warung atau bedak sepanjang lokasi memungkinkan, dapat mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada kepala daerah dengan persyaratan yang ditentukan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perda Nomor 3 tahun 1995 menjadi landasan penarikan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pasar.

2. Perda Nomor 85 tahun 2000

Peraturan daerah yang mejadi dasar hukum dari pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Jember adalah Peraturan Daerah Nomor 85 tahun 2000 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja dari dinas pasar di dalamnya memuat kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian di Dinas Pasar Kabupaten Jember, tata-kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, keuangan dan ketentuan lainnya.

Menurut Perda nomor 85 tahun 2000 yang merupakan perubahan Perda Nomor 39 tahun 2000 menyebutkan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini UPTD tersebut belum terbentuk. Perda nomor 85 tahun 2000 yang mengatur tentang pembentukan UPTD dan Cabang Dinas tidak dapat diterapkan di Dinas Pasar disebabkan yang berada dalam wilayah kerja para mantri pasar bukan wilayah kecamatan melainkan tiap unit pasar.

tan

van

dan

asar

85

ng-

dan

nya

kni

ana

nya

an.

ola

0%

tah

nas

hal

ang

tuk

nya

ain

nan

000

sar.



Selain berbagai Perda yang ada untuk mengatur pengelolaan pasar-pasar di kabupaten jember Dinas Pasar juga membuat peraturan-peraturan untuk mendukung strategi ekstensifikasi yang dilakukan, diantaranya :

1. Dari Perda nomor 3 tahun 1995 juga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang. Besarnya tarif retribusi yang dipungut bagi pedagang jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian saat ini banyak yang tidak sesuai. Jika mengacu pada perda yang ada yakni Perda Nomor 5 tahun 1995 perolehan retribusi hanya akan kecil dan tidak dapat memenuhi target yang dibebankan. Dinas Pasar kemudian mengeluarkan kebijakan baru yang diberlakukan bagi para pedagang dengan ketentuan;
 - a. untuk pedagang lesehan dan tidak memiliki bedak sebesar Rp. 500;00
 - b. para pedagang yang memiliki bedak dalam pasar ditarik Rp. 1000;00.Ketentuan ini diberlakukan disemua unit pasar yang dikelola Dinas Pasar.
2. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi yang berupa pembuatan pasar baru seperti yang terjadi di Pasar Bungur dan pemantapan Pasar Kepatihan berupa penyediaan tanah, para pedagang di berikan surat ijin menempati sementara, (SIM Sementara) kebijakan ini diambil mengingat pemerintah Kabupaten Jember belum dapat membangun berbagai bangunan pasar seperti kios, los dan fasilitas penunjang pasar lainnya di kedua pasar umum tersebut. Kondisi dari Pasar Bungur dan Pasar Kepatihan masih sangat sederhana, bangunan-bangunan berupa bedak dan kios masih dibuat semi permanen dan di bangun atas dana swadaya dari para pedagang. Diberikannya surat ijin menempati sementara yang diberikan kepada pedagang di kedua pasar tersebut untuk memberikan kepastian akan tempat berjualan.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas pasar Kabupaten Jember No : 947/436.327/2000 Tanggal 1 Januari 2000 Tentang Pembentukan Tim Operasional Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar. Tim operasional ini terdiri dari para pegawai di Sub Dinas Ketertiban dan Sub Dinas Kebersihan, Sub Dinas Retribusi dan orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pasar. Tim ini bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan peran dan partisipasi pedagang sebagai penerima fasilitas berupa sarana bangunan

sebagai tempat kegiatan usahanya, guna ikut membangun dan memperbaiki sarana yang sudah ada berupa toko/kios/bedak yang ada di pasar, meningkatkan kesadaran masyarakat/pedagang untuk membayar retribusi dan perijinan pemilikan SIM.

4. Penetapan wilayah pungutan, waktu pungutan dan nilai pungutan berdasarkan letak tempat usaha dan komoditi dagangan dilaksanakan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
5. Pelaksanaan sewa toko, ruko, lahan dan utilitas pelayanan km/wc dalam pasar tepat waktu dan sasaran dilakukan pada bulan Januari setiap tahunnya.
6. Pencertiban dan penjarangan perijinan dilaksanakan pada bulan Juni setiap tahunnya.
7. Penjarangan tunggakan retribusi setiap tiga bulan setiap tahunnya.
8. Kondisi diatas masih ditambah dengan kebijakan dari dinas yakni akan memutasi para pegawainya yang diangkat jadi mantri pasar bila selama enam bulan tidak dapat mencapai perolehan pungutan retribusi dari target yang telah dibebankan. Kebijakan ini tentu saja akan berpengaruh pada kinerja para mantri pasar dan para pegawainya yang lebih berorientasi pada pencapaian hasil pungutan disamping memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan yang di tetapkan oleh Dinas Pasar tersebut harus diikuti oleh para pegawainya dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pasar-pasar agar perolehan retribusi dapat mencapai target yang telah dibebankan.

cara

lam

erja

nas

tiap

wab

bagi

lam

asi,

alui

asar

ang

ulan

uan

ijin

ijin

ang

aan

ang

luar



Pemungutan Obyek pungutan retribusi yang sifatnya tiap hari dan bulanan dilakukan oleh juru pungut/petugas pemungut retribusi, oleh koordinator pemungut hasil pungutan tersebut tiap hari dicatat dalam buku bend. 16. Buku bend. 16 disebut juga Buku Perjenis. Buku ini berisi tentang laporan banyaknya karcis harian, karcis hewan dan karcis parkir yang telah terpakai dan penerimaan lainnya yang telah di peroleh setiap hari. Kemudian dibukukan dalam buku bend 10, Buku bend. 10 berisi tentang banyaknya karcis yang terjual, sisa karcis yang masih ada, kartu sewa bulanan yang masih ada. Di samping itu mantri pasar juga berfungsi sebagai bendahara pembantu khusus penerimaan dan buku yang digunakan untuk mencatatnya disebut buku model DPD II 62 yang berisi tentang laporan harian bendahara pembantu khusus penerimaan.

Setelah dicatat, mantri pasar kemudian menyetorkan hasil penerimaan retribusi pasar tersebut ke Kas Daerah untuk pasar-pasar di dalam kota sedangkan untuk pasar-pasar diluar kota di setorkan ke bank keliling setiap bulannya. Demikian juga mantri pasar melaporkan hasil penerimaan retribusi dari pasar yang dikelolanya kepada kepala bagian tata usaha dinas pasar setiap bulan. Dalam setiap laporannya mantri pasar melampirkan laporan kepada Kas Daerah dan Kabag tata usaha dinas pasar yaitu berupa buku laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang dikenal dengan buku model DPD 63 dan Buku rincian realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga. Buku ini dikenal dengan buku model DPD II 74 berisi tentang persediaan karcis dan jumlah karcis yang telah terpakai serta saldo dari karcis tiap bulan, persediaan kartu langganan bulanan, jumlah kartu langganan yang telah terpakai dan saldo dari karcis tiap bulannya. Di samping itu juga di lampirkan buku model DPD II 62 yang berisi tentang laporan harian bendahara pembantu khusus penerimaan.

Kepala bagian tata usaha dinas pasar melaporkan hasil penerimaan retribusi seluruh pasar yang dikelola kepada Kepala dinas pasar, kepala bagian keuangan pemerintah daerah, inspektorat kabupaten setiap bulannya.

Prosedur di Dinas Pasar bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi satuan-satuan organisasi dan unit-unit kerja yang ada di Dinas Pasar. Dengan 29 unit kerja yang ada wilayah kerja Dinas Pasar perlu menerapkan

prosedur kerja yang dapat menciptakan pola kerja yang dinamis baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh dinas dalam upaya peningkatan PAD.

Mekanisme kerja pengelolaan pasar yang dilakukan oleh unit kerja berada dibawah koordinasi dan pengawasan Dinas Pasar. Mekanisme untuk pengelolaan dibidang retribusi dikoordinasikan oleh Sub Dinas Retribusi, pengelolaan yang berkaitan dengan bidang sarana dan prasarana serta bidang kebersihan di koordinasikan oleh Sub Dinas Perawatan, dalam bidang keamanan dan ketertiban dikoordinasikan oleh Sub Dinas Ketertiban dan untuk bidang kepegawaian, keuangan, umum dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha.

Strategi ekstensifikasi tidak merubah prosedur dalam hal penarikan retribusi dan penyetoran hasil pungutan dan dalam tugas-tugas pengelolaan unit pasar oleh unit kerja. Kegiatan pengelolaan pasar yang menyangkut mengenai kegiatan perbaikan dan pembuatan sarana pasar dikoordinasikan oleh Dinas Pasar. Bagi unit pasar yang akan melakukan kegiatan perbaikan dan pembuatan sarana pasar di diajukan dulu ke Dinas Pasar, Dinas pasar kemudian mengagendakan perbaikan dan pembangunan tersebut dan membuat prioritas pasar-pasar yang akan ditangani.

Meskipun sudah dibuat rencana yang menyangkut upaya perbaikan dan penyediaan sarana ada fasilitas pasar namun rencana tersebut dalam prakteknya terkadang tidak bisa dijalankan. Unit-unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap upaya perbaikan dan pemeliharaan tidak bisa menangani langsung, karena harus mengajukan dulu kegiatan tersebut kepada Dinas Pasar. Prosedur yang harus diikuti para pegawai di tingkatan unit kerja tersebut terkadang menghambat pelaksanaan tugas.

Saat ini Dinas Pasar dihadapkan pada kendala-kendala yang belum bisa diatasi. Kendala terutama menyangkut penyediaan sarana dan prasarana pasar yang mendukung demi terciptanya pasar yang representatif bagi masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Pasar banyak melakukan berbagai kegiatan pembinaan pada pedagang untuk dapat menangani permasalahan sarana dan fasilitas pasar secara swadaya. Para mantri pasar dan pegawai yang ada di

tingkatan kerja yang langsung bersinggungan langsung dengan para pedagang diminta untuk lebih sering mengadakan pembinaan pada pedagang.

Keterbatasan dana yang dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk pelaksanaan tugas dinas pasar memang masih belum dapat menutup semua anggaran kegiatan yang telah direncanakan. Keterbatasan dana tersebut menyebabkan Dinas Pasar saat ini belum bisa menciptakan pasar yang representatif bagi para pengguna jasa pasar.

d. Pelatihan

Dinas Pasar memberikan pelatihan kepada para pegawainya termasuk didalamnya berbagai jenis pelatihan "*on the job*" dimana tugas, *coaching* dan magang digunakan untuk mengajarkan pada para pegawainya tentang ketrampilan kerja pilihannya, pengetahuan dan sikap. Maksud dari pelatihan ini adalah untuk memasukkan perilaku dan sikap kerja yang diinginkan oleh para pegawai.

Pegawai Dinas Pasar Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang sifatnya tidak tetap (*rollstate*). Para pegawai di Dinas Pasar sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Adapun sosok pegawai yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan adalah para pegawai yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur pemerintah, abdi masyarakat, dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis.

Diklat yang ada di lingkungan Dinas Pasar terdiri dari dua macam, yaitu diklat untuk jabatan struktural dan diklat untuk jabatan fungsional. Diklat dalam jabatan struktural terdiri dari :

a. Diklat Kepemimpinan

Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. PNS yang telah memenuhi persyaratan

kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberi sertifikat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.

Diklatpim yang telah diikuti para pegawai Dinas Pasar terdiri dari :

1. Diklatpim Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV sebanyak 10 orang pegawai.
2. Diklatpim Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III sebanyak 2 orang pegawai.
3. Diklatpim Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II sebanyak 1 orang pegawai.
4. Diklatpim Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I belum ada.

b. Diklat Jabatan Fungsional

Sedangkan Diklat Jabatan Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan Fungsional tersebut ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Disamping itu, Dinas pasar melaksanakan kegiatan pelatihan yang ditujukan pada para pegawainya yang meliputi :

1. Pembinaan personil secara rutin maupun secara berkala kepada staf dinas maupun aparatur yang ada di wilayah kerja/ unit kerja. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tiga bulannya pihak Dinas Pasar terutama ditujukan terhadap para pegawai yang ada di unit kerja.
2. Pembentukan dan pelatihan tenaga khusus keamanan/satpam pada masing-masing unit pasar. Kegiatan ini dilakukan oleh Sub Dinas Ketertiban setiap satu bulan sekali.

Mengingat kedudukan Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Jember pihak dinas tidak dapat mengadakan kegiatan pelatihan dan pendidikan sendiri. Para pegawai diikutkan dalam pelatihan dan pendidikan yang ada berdasarkan surat edaran dari Bupati Jember. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap para pegawainya untuk meningkatkan

kemampuan dan ketrampilannya berupa pembinaan baik secara rutin maupun secara berkala.

Strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar yang bertujuan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan retribusi pasar serta memberikan pelayanan yang prima pada para pengguna fasilitas pasar perlu diimbangi dengan formalisasi yang sesuai agar tercapainya tujuan tersebut. Dari tehnik-tehnik yang diterapkan bagi para pegawai Dinas Pasar masih terdapat beberapa kelemahan.

1. Seleksi

Kedudukan Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana dari tugas bupati untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pasar yang tidak mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan seleksi bagi para pegawai yang akan bekerja di lingkungan organisasinya membuat Dinas Pasar tidak mempunyai standarisasi mengenai pegawai yang akan bekerja di instansinya. Seperti diungkapkan seorang informan:

Syarat-syarat terhadap penerimaan pegawai baru sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember. Kami hanya berhak mengusulkan rencana kebutuhan pegawai di dinas kami.

Karena kedudukannya sebagai unsur pelaksana Dinas Pasar pengangkatan pegawai baru berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Meskipun Dinas Pasar memerlukan jumlah tambahan pegawai, pihak dinas tidak dapat mengadakan kegiatan seleksi pegawai.

Minimnya gaji yang diterima para pegawai yang bersiatus rollstate juga kurang bisa memberi jaminan kesejahteraan para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana dituturkan seorang informan :

Gaji yang saya terima tentu saja hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok setiap harinya, sedangkan untuk keperluan lainnya saya kerja sampingan setelah pulang kerja dari pasar.

Sedangkan informan yang lain menambahkan :

Meskipun honorarium yang saya terima sedikit, saya berharap setelah lama bekerja di Dinas pasar ini saya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dengan status pegawai negeri mungkin ekonomi keluarga saya akan lebih baik.

Berdasarkan surat keputusan bupati yang tertuang dalam perjanjian kontrak kerja antara para pegawai dengan Pemerintah Kabupaten Jember honorarium yang diterima oleh para pegawai yang berstatus rollstate hanya sebesar Rp. 247.700;00 bagi tenaga kerja yang sudah kawin dan Rp. 216.200;00 yang belum kawin. Besarnya gaji yang diperoleh bahkan masih dibawah upah minimum regional (UMR) di Kabupaten Jember yang ditetapkan sebesar Rp. 380.000;00.

2. Peraturan

Peraturan daerah yang mejadi dasar hukum dari pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Jember adalah Peraturan Daerah Nomor 85 tahun 2000 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja dari dinas pasar di dalamnya memuat kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian di Dinas Pasar Kabupaten Jember, tata-kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, keuangan dan ketentuan lainnya dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1995 yang mengatur tentang pengelolaan pasar- pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Jember.

Menurut Perda nomor 85 tahun 2000 yang merupakan perubahan Perda Nomor 39 tahun 2000 menyebutkan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini UPTD tersebut belum terbentuk. Disamping itu dari lima jenis jabatan fungsional yang ada baru jabatan Bendaharawan Gaji yang sudah terisi, sedangkan jabatan untuk Bendaharwan Pembuat Daftar Gaji, Bendaharawan Pemeliharaan, Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Khusus Barang belum terisi. Berkaitan dengan hal tersebut seorang informan menuturkan ;

Penunjukkan pegawai baru untuk mengisi jumlah jabatan yang kosong dilakukan apabila beban kerja dan urusan yang diserahkan pada Dinas Pasar tidak dapat lagi secara efektif dilakukan. Sedangkan saat ini tugas-tugas yang diberikan masih dapat ditangani oleh para pegawai yang ada di Dinas Pasar.

Tugas dan Fungsi dari mantri pasar sebagai Pimpinan dari tiap unit kerja juga belum diatur. Dalam perda nomor 85 tahun 2000 hanya disebutkan bahwa

untuk melakukan pengelolaan masing-masing pasar di daerah kecamatan dapat ditunjuk seorang mantri pasar dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas pasar. Seperti yang dituturkan seorang informan ;

Sampai saat ini memang belum ada aturan yang jelas mengenai tugas dan fungsi mantri pasar di tiap unit pasarnya. Mantri pasar lebih banyak diberi intruksi dan arahan oleh Kepala Dinas Pasar untuk menjalankan tugas-tugas pokok dari Dinas Pasar. Peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi seperti para pegawai yang ada di Dinas Pasar belum dibuat.

Lebih lanjut seorang informan menegaskan ;

Saya lebih banyak menerjemahkan sendiri intruksi dari Kepala Dinas Pasar tersebut. Dalam setiap pertemuan mantri pasar yang diadakan setiap bulannya, kepala dinas hanya menekankan pada para pegawainya untuk menjalankan tugas sesuai dengan misi dan visi Dinas Pasar.

Perda nomor 85 tahun 2000 hanya mengatur para pegawai yang ada di tingkatan kantor Dinas Pasar, sedangkan para pegawai yang ada di tingkatan unit kerja sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang jelas mengaturnya. Para pegawai lebih banyak mendapatkan masukan atas pekerjaannya dari bimbingan dan arahan dari mantri pasar.

Dari Perda nomor 3 tahun 1995 juga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang. Besarnya tarif retribusi yang dipungut bagi pedagang jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian saat ini banyak yang tidak sesuai. Seperti yang dituturkan seorang informan;

Jika mengacu pada perda yang ada yakni Perda Nomor 5 tahun 1995 perolehan retribusi hanya akan kecil dan tidak dapat memenuhi target yang dibebankan.

Salah seorang informan lain menegaskan ;

Kami memungut retribusi pasar pada pedagang memang tidak didasarkan pada perda nomor 3 tahun 1995. Tetapi berdasarkan kebijakan dari Dinas Pasar dengan ketentuan; untuk pedagang lesehan dan tidak memiliki bedak sebesar Rp. 500;00 sedangkan para pedagang yang memiliki bedak dalam pasar ditarik Rp. 1000;00.

Disamping belum ada perda baru yang mengatur tentang besarnya tarif retribusi yang dikenakan bagi para pedagang yang berjualan di pasar daerah, sulitnya mengetrapkan makna dari peraturan perundangan pada pedagang disebabkan adanya krisis kepercayaan dan berkembangnya pola pikir serta karakteristik

pedagang menjadi persoalan tersendiri bagi Dinas Pasar. Hal ini seperti yang diungkapkan seorang informan ;

Peraturan yang dibuat memang sebagai dasar hukum bagi para petugas juru pungut untuk melakukan pungutan retribusi pada para pedagang. Tapi kondisi di lapangan yang membuat saya lebih menekankan kesadaran dan pendekatan secara persuasif pada pedagang akan kewajiban mereka untuk membayar retribusi.

Hal yang sama juga dialami para petugas yang bertugas menertibkan para pedagang yang berjualan bukan pada tempat yang telah disediakan untuk berjualan. Seperti diungkapkan seorang informan ;

Jangan bicara hukum atau peraturan pada para pedagang karena rendahnya kesadaran mereka untuk menciptakan pasar yang representatif dan terbina. Untuk menertibkan mereka lebih banyak menggunakan pendekatan secara emosional dan persuasif untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Strategi ekstensifikasi juga menghadapi kendala, karena sulitnya mengembangkan pasar yang lahannya sudah jenuh. Alternatif kegiatan lain yakni dengan membangun pasar baru masih sangat terbatas disamping terbatasnya dana juga dengan diberlakukannya Perda No. 16 Tahun 2000 Tentang Pasar Desa. Sebagaimana dituturkan seorang informan ;

Pasar desa dengan diberlakukannya perda nomor 16 tahun 2000 sepenuhnya pengelolaannya ditangani dan dikuasai oleh pihak pemerintah desa bersangkutan. Sebelum perda nomor 16 tahun 2000 diterapkan pasar-pasar desa tersebut dikelola oleh Dinas Pasar. Hasil dari perolehan pungutan retribusi pasar desa tersebut 30% diberikan untuk desa yang bersangkutan dan 70% di setorkan ke pemerintah kabupaten.

Sedangkan informan yang lain menegaskan;

Dengan beralihnya pengelolaan pasar desa ke pemerintah desa Dinas Pasar tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengembangkannya. Padahal untuk membangun pasar baru banyak dimulai dari keberadaan pasar desa yang umumnya masih bersifat tradisional.

Kondisi tersebut makin menyulitkan Dinas Pasar dalam usahanya untuk mengembangkan pasar-pasar daerah di Kabupaten Jember karena pengelolaannya sudah beralih dari Dinas Pasar kepada pemerintah desa. Di sisi yang lain pemberlakuan perda tersebut akan berpengaruh pada berkurangnya perolehan pungutan retribusi pasar. Sebelum berlakunya Perda Nomor 16 tahun 2000 pungutan dari pasar desa merupakan salah satu sumber pendapatan retribusi pasar.

3. Prosedur

Prosedur merupakan rangkain langkah yang saling berhubungan satu sama yang diikuti oleh pegawai Dinas Pasar dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pengelolaan pasar-pasar di Kabupaten Jember. Prosedur kerja dalam pelaksanaan pengelolaan pasar bertujuan agar terjadi sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi yang efektif.

Prosedur di Dinas Pasar bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi satuan-satuan organisasi dan unit-unit kerja yang ada di Dinas Pasar. Dengan 29 unit kerja yang ada wilayah kerja Dinas Pasar perlu menerapkan prosedur kerja yang dapat menciptakan pola kerja yang dinamis baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh dinas dalam upaya peningkatan PAD.

Dalam hal penarikan retribusi dan penyeteran hasil pungutan memang tidak banyak menghambat tugas-tugas para pegawai, tetapi dalam tugas-tugas pengelolaan seringkali ditemukan berbagai hambatan.

Kegiatan pengelolaan pasar yang menyangkut mengenai kegiatan perbaikan dan pembuatan sarana pasar dikoodinasikan oleh Dinas Pasar. Bagi unit pasar yang akan melakukan kegiatan perbaikan dan pembuatan sarana pasar di diajukan dulu ke Dinas Pasar, Dinas pasar kemudian mengagendakan perbaikan dan pembangunan tersebut dan membuat prioritas pasar-pasar yang akan ditangani.

Meskipun sudah dibuat rencana yang menyangkut upaya perbaikan dan penyediaan sarana ada fasilitas pasar namun rencana tersebut dalam prakteknya terkadang tidak bisa dijalankan. Unit-unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap upaya perbaikan dan pemeliharaan tidak bisa menangani langsung, karena harus mengajukan dulu kegiatan tersebut kepada Dinas Pasar. Seperti dituturkan seorang informan;

Saya tidak berwenang untuk memakai dana dari hasil pungutan retribusi, besarnya pemakaian dana yang dipakai ditentukan oleh Dinas Pasar. Saya harus mengajukan usulan dulu pada dinas untuk upaya perbaikan dan pemeliharaan

Prosedur yang harus diikuti para pegawai di tingkatan unit kerja tersebut terkadang menghambat pelaksanaan tugas para pegawainya. Seperti dituturkan seorang informan :

Sudah seringkali saya mengajukan permohonan penambahan fasilitas kebersihan dan perbaikan kantor serta penambahan peralatannya. Tapi belum ada realisasinya, ketika dikonfirmasi alasannya selalu sama, belum ada dana.

Saat ini Dinas Pasar dihadapkan pada kendala-kendala yang belum bisa diatasi. Kendala terutama menyangkut penyediaan sarana dan prasana pasar yang mendukung demi terciptanya pasar yang representatif bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan seorang informan :

Saat ini memang belum seluruhnya bangunan maupun fasilitas pasar yang rusak tertangani. Belum tersedianya dana terkadang membuat rencana kegiatan yang menyangkut penanganan dan perbaikan sarana pasar tidak bisa dilaksanakan.

Sesuai dengan rencana bangunan bangunan yang sudah rusak ditangani secepat mungkin agar pelayanan terhadap masyarakat semakin baik, tapi kenyataannya masih banyak yang belum bisa ditangani. Seorang informan lain mengeskakan ;

Para pedagang seringkali mengeluhkan tidak tersedianya sarana pasar seperti ; TPS, listrik dan WC/kamar mandi di pasar ini, tapi belum ada tindak lanjut dari Dinas Pasar.

Minimnya dana yang tersedia menjadi hambatan utama bagi usaha perbaikan dan perawatan serta upaya menciptakan pasar yang representatif.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Pasar banyak melakukan berbagai kegiatan pembinaan pada pedagang untuk dapat menangani permasalahan sarana dan fasilitas pasar secara swadaya. Para mantri pasar dan pegawai yang ada di tingkatan kerja yang langsung bersinggungan langsung dengan para pedagang diminta untuk lebih sering mengadakan pembinaan pada pedagang. Seperti dituturkan seorang informan;

Kalau mengharapkan penanganan terhadap bangunan pasar yang rusak dari pihak Dinas Pasar mungkin upaya menciptakan kondisi pasar yang baik akan sulit. Saya lebih sering melakukan pendekatan pada pedagang untuk secara gotong royong dan bersama-sama membenahi bangunan pasar yang rusak dan menyediakan sarana kebersihan, seperti ; gerobak sampah dan tempat pembuangan sampah.

Keterbatasan dana yang dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk pelaksanaan tugas dinas pasar memang masih belum dapat menutup semua anggaran kegiatan yang telah direncanakan. Keterbatasan dana tersebut menyebabkan Dinas Pasar saat ini belum bisa menciptakan pasar yang representatif bagi para pengguna jasa pasar.

4. Pelatihan

Diklat mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian ketrampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi. Tapi diklat yang selama ini diadakan diperuntukan untuk para pegawai yang berstatus PNS, padahal pegawai di lingkungan Dinas Pasar tidak hanya pegawai dengan status PNS juga ada pegawai dengan status rollstate.

Jumlah pegawai yang berstatus rollstate sebanyak 201 atau sekitar 54 % dari jumlah keseluruhan jumlah pegawai yang ada di Dinas Pasar. Karena statusnya para pegawai ini tidak pernah mendapatkan pelatihan formal yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para pegawai terutama di tingkatan unit kerja yang berstatus rollstate dilakukan Dinas Pasar dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan.

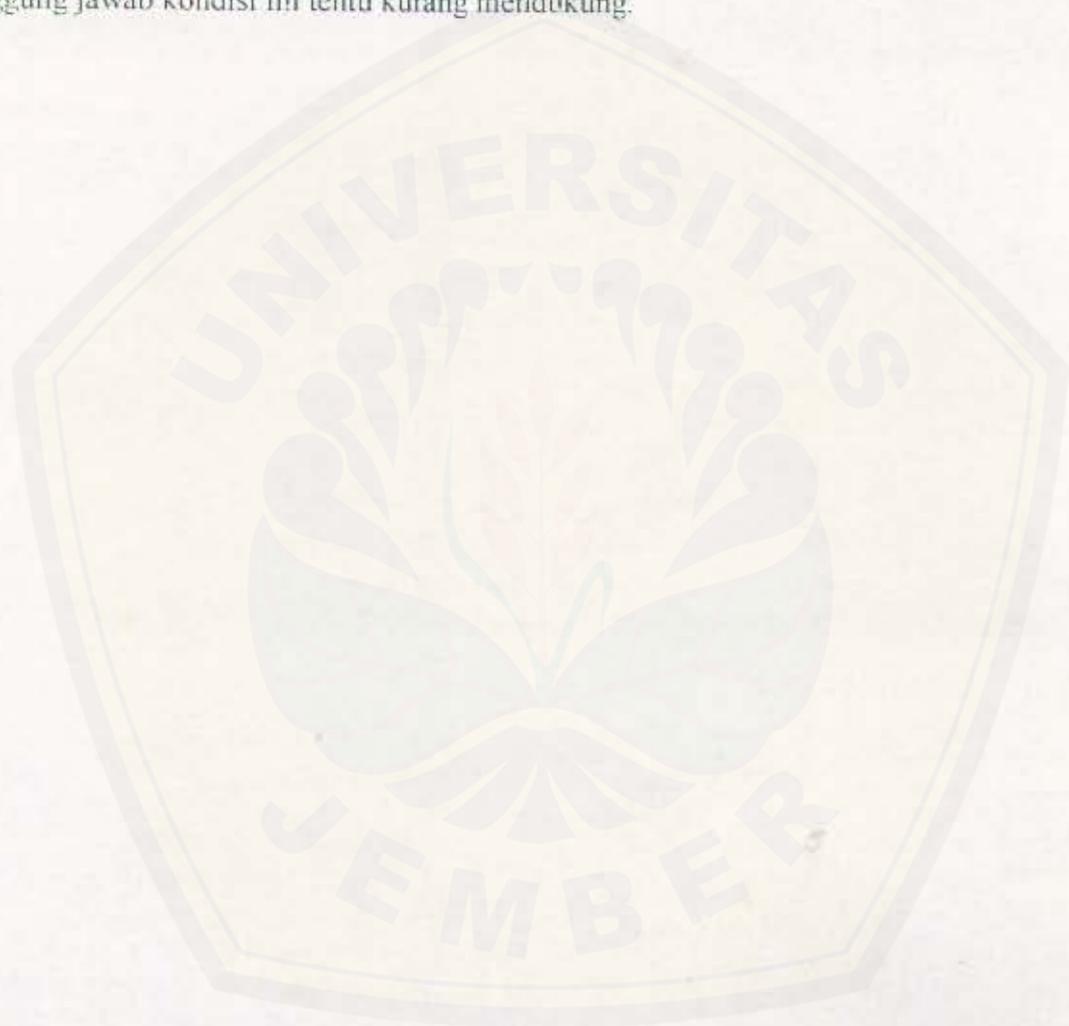
Dalam setiap tiga bulannya pihak Dinas Pasar merencanakan kegiatan pembinaan terhadap para pegawai yang ada di unit kerja. Namun rencana pembinaan tersebut tidak dapat dilakukan untuk semua unit kerja dan pembinaan tersebut lebih banyak pembinaan berkaitan dengan petunjuk penyelesaian masalah yang tidak dapat ditangani para pegawai yang ada di tingkatan unit kerja. Seperti diututurkan seorang informan :

Selama saya bekerja di pasar ini belum pernah mendapatkan pelatihan ataupun pendidikan khusus yang berkaitan dengan tugas saya. Dari pihak dinas hanya melakukan pembinaan dan pengarahan itupun tidak rutin.

Seorang informan lain menambahkan :

Pihak dinas datang ke unit pasar dan memberikan arahan dan petunjuk bila mereka diberi laporan terhadap persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pegawai di tingkatan unit kerja.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya para pegawai terutama para pegawai bagian operasional yang bertugas di lapangan tidak dibekali pelatihan pendidikan khusus. Bila dikaitkan dengan visi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember yakni meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) melalui retribusi pasar yang bertumpu pada pengelolaan yang demokratis, efisien dan pelayanan yang prima dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab kondisi ini tentu kurang mendukung.



3.1.3.3 SENTRALISASI

Sentralisasi secara lebih khusus diartikan sebagai jenjang kepada siapa kekuasaan formal untuk membuat pilihan-pilihan secara leluasa dikonsentrasikan pada seorang individu, unit, atau tingkatan (biasanya berada tinggi pada organisasi), dengan demikian mengizinkan para pegawai (biasanya pada tingkat rendah dalam organisasi) untuk memberi masukan yang minimal pada pekerjaan mereka.

Keberadaan Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah kabupaten dibidang pasar. Dinas pasar dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Rincian tugas pokok dari kepala dinas pasar meliputi :

1. Membina, mengelola dan mengembangkan dinas pasar;
2. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana-sarana pasar lainnya;
4. Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
5. Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi, sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan dilingkungan pasar.

Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya desentralisasi, berupa pelimpahan urusan dalam bidang pasar dari kepala daerah kepada kepala dinas. Kepala dinas dalam menjalankan tugas pokoknya membawahi satuan organisasi yang terbagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas-tugas pokok dari kepala dinas tersebut dilaksanakan oleh tiap satuan organisasi di dinas pasar. Satuan-satuan organisasi di dinas pasar terdiri dari Bagian tata usaha, sub dinas retribusi, sub dinas perawatan dan kebersihan, sub dinas keamanan dan ketertiban, kelompok jabatan fungsional dan mantri pasar.

Kebijakan desentralisasi dari bupati kepada kepala dinas pasar dan dari kepala dinas pasar didesentralisasikan kepada para mantri pasar terjadi dalam penyelenggaraan pungutan retribusi pasar memberikan manfaat dan keuntungan, karena pada dasarnya Dinas Pasar adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencapai tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyediaan pasar.

Kepala dinas pasar dalam menyelenggarakan pemungutan retribusi terbatas kemampuannya untuk memberi perhatian kepada data yang ia terima. Selain memimpin para pegawai yang ada di kantor dinas, kepala dinas juga harus memberi perhatian pada unit-unit pasar yang berjumlah 29 buah pasar. Kepala dinas mempunyai keterbatasan tertentu terhadap jumlah informasi yang dapat ia proses. Setelah batasan itu tercapai, maka masukan selebihnya akan menghasilkan informasi yang berlebihan. Untuk menghindari titik dimana kapasitas kepala dinas akan terlampaui, maka beberapa keputusan dapat diserahkan kepada orang lain.

Penyerahan pengambilan keputusan tersebut tampak dari pembentukan satuan-satuan organisasi di dinas pasar terdiri dari bagian tata usaha, sub dinas retribusi, sub dinas perawatan dan kebersihan, sub dinas keamanan dan ketertiban, kelompok jabatan fungsional.

Untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses pemungutan retribusi dari 29 unit kerja yang ada dibawah koordinasinya diserahkan dari kepala dinas pasar kepada Kepala Sub Dinas Retribusi. Demikian juga dengan satuan organisasi yang lain di Dinas Pasar mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dari 29 unit kerja yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keberadaan para mantri pasar di tiap unit pasar menjalankan tugas pokok dari dinas pasar di tiap unit pasar yang dikelolanya. Dalam menjalankan tugasnya mantri pasar memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Konsentrasi dari pengambilan keputusan pada satu titik tunggal yakni konsentrasi pada Dinas Pasar dengan demikian telah disebarkan.

Dinas Pasar merupakan organisasi induk yang membawahi 29 unit kerja yang tersebar di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember. Dinas Pasar menetapkan berbagai kebijakan bagi pelaksanaan pengelolaan pasar bagi tiap unit kerja. Dengan penunjukan mantri pasar untuk tiap-tiap pasar yang dikelolanya berarti juga telah terjadi desentralisasi dari kepala dinas pasar kepada mantri pasar. Tugas-tugas dari dinas pasar diserahkan kepada para mantri pasar untuk melakukan pengelolaan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya. Keberadaan mantri pasar harus dapat menjabarkan visi dan misi dari kepala dinas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan retribusi pasar serta memberikan pelayanan yang prima kepada para pedagang dan para pengguna fasilitas pasar.

Dinas Pasar sebagai organisasi induk membawahi 29 unit kerja yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dinas pasar mengeluarkan berbagai kebijakan. Hal ini tampak di tiap-tiap bidang:

1. Bidang Retribusi

Dalam bidang retribusi kewenangan untuk mengadakan usaha ekstensifikasi berupa pembangunan pasar baru dan usaha diversifikasi usaha dengan pembangunan terminal/cargo pusat sayur, pemusatan produk hasil samping hasil laut, pemusatan pasar buah, pemusatan pasar pujasera sekaligus membuka tempat rekreasi bagi warga masyarakat.

2. Bidang Alokasi Sarana dan Prasarana

Bidang alokasi sarana dan prasarana Dinas Pasar memiliki kewenangan untuk mengajukan anggaran perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana bangunan pasar maupun utilitas untuk pelayanan umum yang ada di pasar. Dinas pasar mengajukan prioritas terhadap perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana dari informasi yang diberikan oleh para mantri pasar yang ada dalam wilayah kerjanya.

3. Bidang Personalia/aparatur

Dalam bidang personalia/aparatur untuk mengantisipasi kekurangan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya dinas pasar mengajukan penambahan

awai baru kepada kepala daerah. Banyaknya jumlah pegawai yang ditiap unit diatur oleh Dinas Pasar. Dinas Pasar menetapkan berapa banyaknya pegawai di tiap unit pasarnya. Penetapan ini didasarkan atas luas wilayah pasar dan luasan pasar tersebut.

Bidang Pengelolaan Pasar

Dalam bidang pengelolaan pasar Dinas Pasar juga mempunyai kewenangan dalam hal; Penetapan lokasi pendirian pasar, kriteria untuk lokasi pasar, pemberian izin bagi para pedagang yang memerlukan tempat tinggal di dalam pasar untuk membangun atas biaya sendiri atas sebuah warung atau kios, izin menggunakan tempat-tempat berjualan di dalam pasar, pemindahan hak tempat tinggal yang dilakukan oleh para pedagang, keseragaman bentuk tanda pengenal di tiap pasar, tanda pengenal lokasi pasar yang menyebutkan jenis barang yang diperdagangkan, penambahan bangunan pasar atau membuat bangunan baru yang bersifat permanen, penetapan bentuk, warna, dan tata cara pengisian kartu pendaftaran.

Kepala dinas pasar sesuai dengan fungsinya berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis, sedangkan kewenangan yang menyangkut kewenangan dalam segi hukum dan keuangan banyak berada ditangan pemerintah daerah.

Untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses penghitungan retribusi dari 29 unit kerja yang ada dibawah koordinasinya diserahkan dari kepala dinas pasar kepada Kepala Sub Dinas Retribusi. Demikian dengan satuan organisasi yang lain di Dinas Pasar mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dari 29 unit kerja yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keberadaan para mantri pasar di tiap unit pasar menjalankan tugas pokok dan dinas pasar di tiap unit pasar yang dikelolanya. Dalam menjalankan tugasnya mantri pasar memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Konsentrasi dari pengambilan keputusan pada titik tunggal yakni konsentrasi pada Dinas Pasar dengan demikian telah terjamin.

Dalam pelaksanaan strategi ekstensifikasi pungutan retribusi pasar digunakan pendekatan dari Max Weber seperti yang telah disebutkan dalam tentang sentralisasi administrasi dan desentralisasi administrasi

Sentralisasi Administrasi

Orang-orang yang menduduki posisi puncak hirarki membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan. Kepala Dinas Pasar menetapkan kebijaksanaan untuk berikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam penyediaan pasar. Samping itu keberadaan Dinas Pasar merupakan dinas penghasil yang berorientasi pada penggalan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) berupa pungutan pasar harus ditingkatkan perolehannya.

Kebijaksanaan dari kepala dinas kemudian dijabarkan oleh satuan-satuan organisasi di Dinas Pasar dengan menetapkan prosedur terhadap strategi ekstensifikasi. Prosedur menyangkut bentuk-bentuk kegiatan ekstensifikasi, siapa yang melaksanakan, alokasi anggaran dan kapan kegiatan itu dilaksanakan. Rencana kegiatan ekstensifikasi tersebut seperti yang tersebut dalam tabel V merupakan rencana program ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2001 s/d 2005.

Strategi ekstensifikasi terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yakni kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan kegiatan yang dilakukan oleh para mantri pasar atas unit pasar yang dikelolanya. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar meliputi :

1. Perluasan dan pengembangan pasar;
2. Pembangunan pasar baru.
3. Pembuatan pasar unggulan hasil samping laut di Puger;
4. Pemusatan sayuran di Pasar Petung;
5. Pemusatan pasar buah di Pasar Gebang;
6. Pemusatan pasar pujasera dalam kota.

Sedangkan strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh para mantri pasar meliputi kegiatan pencarian peluang-peluang dan terobosan-terobosan baru untuk menggalan potensi tersebut meliputi ;

1. Pendayagunaan lahan secara efektif/pemanfaatan lahan-lahan kosong dalam pasar;
2. Penertiban/ pengaturan kios-kios dalam pasar;
3. Pendirian bangunan-bangunan baru dalam pasar secara swadaya.

Untuk kegiatan tersebut, para mantri pasar memiliki kewenangan untuk mengambil wewenang di tiap unit pasar yang dikelolanya. Dinas Pasar memberikan wewenang baru untuk mengambil keputusan yang dimiliki mantri pasar. Bentuk wewenang tersebut meliputi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha diversifikasi pungutan retribusi pasar.

Mantri pasar sebagai pimpinan hirarki yang paling rendah dalam organisasi Dinas Pasar lebih banyak membuat keputusan operasional daripada ketiga bentuk kegiatan ekstensifikasi yang telah ditetapkan.

Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi administrasi menunjuk pada pendelegasian wewenang tipe-tipe kekuasaan dari hirarki tingkat atas kepada hirarki tingkat bawah. Meskipun Dinas Pasar telah melimpahkan wewenang kepada para mantri pasar untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dari sektor pasar tetapi kepala dinas masih mempertahankan kewenangan dalam mengambil keputusan untuk mengadakan usaha ekstensifikasi berupa pembangunan pasar, pembangunan pasar baru dan usaha diversifikasi yang anggarannya masih berada di tangan Dinas Pasar.

Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan strategi ekstensifikasi di tingkat unit kerja. Para mantri pasar hanya mempunyai sedikit kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai dengan wilayah kerjanya. Bentuk-bentuk kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan para mantri pasar telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Dinas Pasar. Meskipun mantri pasar yang banyak membuat keputusan terhadap operasionalisasi kegiatan ekstensifikasi di tiap unit pasar tapi keputusan-keputusan tersebut dikontrol dan diawasi ketat oleh Dinas Pasar. Pengawasan dan koordinasi yang dilakukan Dinas Pasar berupa :

1. Kontrol terhadap pelaksanaan strategi ekstensifikasi tersebut dilaksanakan dalam tiga bentuk :
 - a. Evaluasi perolehan retribusi setiap bulannya dalam rapat antara Dinas Pasar dan para mantri pasar. Dalam rapat tersebut Dinas Pasar mengadakan evaluasi terhadap perolehan pungutan retribusi untuk masing-masing unit kerja.
 - b. Evaluasi setiap tiga bulan terhadap perolehan pungutan retribusi pasar yang telah dicapai. Evaluasi ini merupakan kegiatan rutin untuk mengetahui apakah target perolehan pungutan selama tiga bulan dapat terealisasi.
 - c. Kegiatan evaluasi lain dilaksanakan setiap akhir tahun, kegiatan dilakukan oleh Dinas Pasar untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi apakah perolehan pungutan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah dibebankan.

2. Alokasi dana yang digunakan berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi di tingkatan unit kerja dikoodinasikan oleh Dinas Pasar.

Para mantri pasar adalah yang paling banyak membuat keputusan terhadap kegiatan ekstensifikasi yang sesuai dengan kondisi tiap unit pasar yang dikelolanya tetapi keputusan tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Dinas Pasar serta terdapat mekanisme kontrol dan koordinasi yang ketat dari Dinas Pasar.

Ada beberapa pertimbangan yang dipakai oleh Dinas Pasar dengan menetapkan bentuk-bentuk kegiatan ekstensifikasi yang akan dilakukan oleh mantri pasar di tiap unit kerja, diantaranya :

1. Kedudukan Dinas Pasar sebagai organisasi induk yang membawahi 29 unit kerja perlu menetapkan bentuk kegiatan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar dan terwujudnya pelayanan yang prima perlu diseragamkan untuk memudahkan koordinasinya.
2. Pembiayaan untuk kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan di tiap unit kerja dibebankan pada APBD, sedangkan yang berhak mengajukan anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Dinas Pasar.

3. Kegiatan-kegiatan ekstensifikasi yang berupa perluasan dan pengembangan pasar, pembangunan pasar baru lebih efektif dan efisien bila dilakukan oleh Dinas Pasar dan bukan mantri pasar meskipun kegiatan tersebut dalam wilayah kerjanya.

Dari desentralisasi administrasi dalam pelaksanaan strategi ekstensifikasi terlihat bahwa bupati masih mempertahankan untuk menyetujui atau menolak keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dinas Pasar. Di pihak yang lain Dinas Pasar juga mempertahankan kewenangan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh para mantri pasar di tingkatan unit kerja.

Jadi desentralisasi administrasi terjadi dalam pelaksanaan strategi ekstensifikasi dari bupati kepada Dinas Pasar dan dari Dinas Pasar kepada mantri pasar tetapi masih terdapat koordinasi dan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat. Koordinasi dan pengawasan dilakukan oleh bupati terhadap pengambilan keputusan yang dibuat oleh Dinas Pasar, disamping itu koordinasi dan pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Pasar atas pengambilan keputusan yang dibuat para mantri pasar.

Strategi ekstensifikasi meningkatkan sentralisasi di Dinas Pasar karena bentuk-bentuk kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh mantri pasar di unit pasar yang ada dalam wilayah kerjanya telah ditetapkan lebih dahulu disisi yang lain terdapat kontrol yang ketat terhadap keberhasilan pelaksanaannya.

Meskipun kedudukan mantri pasar merupakan pimpinan hirarki yang paling rendah untuk mencapai tujuan pelaksanaan strategi ekstensifikasi yang sesuai dengan visi Dinas Pasar yakni meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) khususnya retribusi pasar yang bertumpu pada pengelolaan yang demokratis, efisien dan pelayanan yang prima dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Kemampuan para mantri pasar perlu ditingkatkan karena mantri pasarlah pimpinan yang paling dekat dengan para pengguna jasa pasar dan bertanggung jawab secara langsung terhadap pencapaian pungutan retribusi pasar. Disamping itu kebijakan ekstensifikasi dari Dinas Pasar tersebut terkadang tidak sesuai

dengan kondisi di unit pasar di wilayah kerjanya. Sebagaimana dituturkan seorang informan :

Semua unit pasar yang dikelola Dinas Pasar potensial dikembangkan, namun untuk kegiatan pemanfaatan lahan secara efektif berupa pemanfaatan lahan-lahan kosong dalam pasar masih tidak dapat dilaksanakan di Unit Pasar Sukorejo, Unit Pasar Menampu, Unit Pasar Patrang, Unit Pasar Petung, Unit Pasar Sukosari, Unit Pasar Gladak Merah. Pasar-pasar tersebut lahannya sudah sulit untuk dikembangkan.

Keenam unit pasar tersebut tidak lagi memiliki ruang-ruang kosong dalam pasar yang dapat digunakan untuk menampung lebih banyak lagi para pedagang.

Kegiatan ekstensifikasi ini pun juga membawa dampak tersendiri pada unit pasarnya, terutama terhadap ketertiban para pedagangnya. Penertiban para pedagang yang berjualan di terutama pinggir jalan raya seperti terjadi di Unit Pasar Tanjung, Unit Pasar Sempolan dan unit Pasar Batung masih sulit ditertibkan. Padahal kondisi tersebut dari lihat dari segi keamanan para pengguna jasa pasar (pedagang dan pembeli) kurang terjaga dan dapat menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan dalam lingkungan pasar. Seperti diungkapkan oleh seorang informan :

Pihak dinas masih sulit menertibkan para pedagang yang masih berjualan di sepanjang trotoar dan di pinggir jalan raya. Hal tersebut disebabkan rendahnya kesadaran para pedagang untuk menciptakan pasar yang tertib. Padahal keberadaan mereka bisa mengganggu kendaraan yang melintas dan para pengguna jalan trotoar.

Penertiban pedagang memang menjadi persoalan utama yang dihadapi Dinas Pasar, khususnya dalam bidang ketertiban. Minimnya jumlah pegawai serta rendahnya kesadaran para pedagang untuk mewujudkan pasar yang tertib juga menjadi hambatan bagi pelaksanaan fungsi penertiban, sehingga Dinas Pasar sering berkoordinasi dengan pihak aparat kecamatan dan aparat desa di wilayah unit pasar berada dalam upaya penertiban para pedagang.

Perlunya meningkatkan kemampuan mantri pasar untuk menunjang kegiatan pungutan retribusi yang berorientasikan pada pencapaian pungutan sesuai dengan target dan memberikan pelayanan yang prima pada para pengguna jasa pasar. Seperti diungkapkan seorang informan :

Mantri pasar harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar apa yang ditugaskan oleh dinas dapat berhasil dengan baik. Mantri pasar selain mempunyai tugas untuk mengembangkan unit pasar yang dikelolanya, mereka juga dituntut untuk dapat mencapai target perolehan pungutan retribusi dari unit pasarnya.

Sedangkan informan lain menambahkan :

Keberadaan mantri pasar di tiap unit kerja harus dapat memimpin para pegawainya untuk dapat memberikan pelayanan yang prima pada para pedagang, dapat meningkatkan keramaian dari tiap unit pasar yang dikelolanya agar perolehan pungutannya meningkat.

Dinas Pasar saat ini menghadapi kendala karena keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Menyangkut kualitas dari pegawai khususnya mantri pasar dari segi pendidikan memang masih banyak yang berpendidikan rendah. Seperti diungkapkan seorang informan :

Banyak dari para mantri pasar yang hanya lulusan SMA, bahkan lulusan SMP. Padahal kemampuan serta pengetahuan mantri pasar sangat menunjang keberhasilan penyelenggaraan pungutan retribusi.

Seorang informan lain menambahkan :

Kalau dihitung-hitung mantri pasar yang berpendidikan sarjana hanya 6 orang selebihnya hanya lulusan SMP dan SMA. Tingkat pendidikan ini tentu saja akan berpengaruh banyak terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas sehari-harinya.

Mantri pasar sebagai para pemimpin unit kerja adalah penanggungjawab pelaksanaan langsung dari implementasi strategi ekstensifikasi. Begitu besar peranan kepemimpinan mantri pasar dalam organisasi Dinas Pasar sehingga sikap dan perilaku mereka serta ketrampilannya kadang-kadang diidentifikasi dengan Dinas Pasar.

Dinas Pasar dalam pelaksanaan strategi ekstensifikasi selain terbatasnya sumber daya atau bisa terjadi bahwa sumber daya yang diterima tidak memadai, jauh lebih sedikit daripada yang direncanakan. Dari segi pendanaan juga masih belum mencukupi. Hambatan yang lain banyak pegawai yang dipekerjakan di lingkungan Dinas Pasar tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk melaksanakan kewajibannya.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar telah meningkatkan ketiga dimensi dari struktur organisasi yakni ; kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Peningkatan yang paling nyata terlihat pada dimensi kompleksitas, dimana pembangunan pasar baru dan pengembangan pasar menuntut Dinas Pasar untuk meningkatkan diferensiasi demi kepentingan ekonomis dan efisiensi. Tetapi keputusan tersebut menciptakan berbagai tekanan untuk menambah pegawai manajerial untuk membantu dalam pengontrolan, koordinasi, serta pengurangan konflik. Dengan demikian penghematan yang diciptakan kompleksitas diimbangi oleh beban yang makin bertambah untuk mempertahankan keutuhan organisasi.

Strategi ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Pasar juga menimbulkan permasalahan baru yang dihadapi ;

1. Semakin meningkatkan kekurangan jumlah pegawai di Dinas Pasar. Saat ini untuk mengantisipasi kekurangan pegawai yang berstatus PNS tersebut terpaksa menggunakan tenaga kerja yang statusnya rollstate.
2. Dari bidang perawatan kondisi fisik sarana dan prasarana bangunan pasar saat ini kondisi bangunan los/bedak/kios yang mengalami kerusakan banyak yang belum tersentuh penanganannya. Dengan adanya strategi ekstensifikasi, berarti menambah jumlah bedak, kios dan bangunan pasar baru yang harus diperhatikan kualitas fisiknya.
3. Dalam bidang kebersihan dengan meningkatnya jumlah dan luas pasar berarti meningkatkan volume sampah produk-produk pasar dan berarti menambah jumlah sarana kebersihan yang harus disediakan oleh Dinas Pasar untuk menciptakan pasar yang representatif.
4. Bidang ketertiban penataan pedagang masih sulit dilakukan karena masih rendahnya kesadaran dari para pedagang untuk dapat menciptakan kondisi pasar yang representatif.
5. Dari segi keramaian para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar juga belum maksimal, masih banyak kios-kios, toko dan bedak di pasar-pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar kosong dan belum termanfaatkan. Hal ini masih

ditambah dengan pemanfaatan fasilitas pasar yang hanya dipakai pada pagi hari.

Dengan bertambahnya permasalahan dan kompleksitas di Dinas pasar maka makin besar pula kebutuhan akan alat komunikasi, koordinasi dan kontrol yang efektif. Dinas Pasar sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari sub sistem yang membutuhkan koordinasi, komunikasi dan kontrol agar dapat efektif. Dengan kata lain, jika kompleksitas meningkat maka akan demikian halnya dengan tuntutan terhadap Dinas Pasar untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang didiferensiasi dan disebar bekerja dengan mulus dan secara bersama kearah pencapaian tujuan dari organisasi. Makin tinggi kompleksitas makin besar pula jumlah perhatian yang harus Dinas Pasar berikan untuk menghadapi masalah komunikasi, koordinasi dan kontrol.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data, pengolahan data dan analisa terhadap data tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Pasar berdampak terhadap penyesuaian strukturnya. Penyesuaian tersebut ditandai dengan bertambahnya unit kerja dari 26 unit kerja menjadi 29 unit kerja.
2. Penyesuaian struktur yang dilakukan semakin meningkatkan kompleksitas secara horisontal, vertikal dan spasial.
3. Kompleksitas secara horisontal meningkat seiring pembentukan tiga unit kerja baru.
4. Penunjukkan mantri pasar tidak diikuti dengan merubah tingkatan hirarki antara kepala dinas dengan mantri pasar. Penambahan jumlah mantri pasar tersebut semakin memperlebar rentang antara kepala dinas dan mantri pasar.
5. Adanya unit pasar baru yang dikelola Dinas Pasar semakin meningkatkan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.
6. Strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar tidak banyak berdampak pada tehnik-tehnik untuk menstadarisasikan perilaku para pegawainya.
7. Perda Nomor 3 tahun 1995 dari segi besarnya tarif yang dibebankan pada pengguna jasa pasar sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.
8. Diberlakukannya Perda Nomor 16 tahun 2000 semakin menyulitkan pihak Dinas Pasar dalam melakukan pengembangan dan perluasan pasar yang dikelolanya.

9. Upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para pegawai rollstate dengan memberi pelatihan belum pernah dilakukan, pegawai-pegawai tersebut hanya diberi pembinaan dari dinas.
10. Strategi ekstensifikasi meningkatkan sentralisasi karena bentuk-bentuk kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan para mantri pasar di tiap unit pasar telah ditetapkan lebih dahulu oleh pihak Dinas Pasar. Disamping itu juga terdapat kontrol yang dari Dinas Pasar terhadap perolehan pungutan retribusi yang dilakukan setiap satu bulan, tiga bulan dan setiap akhir tahun.

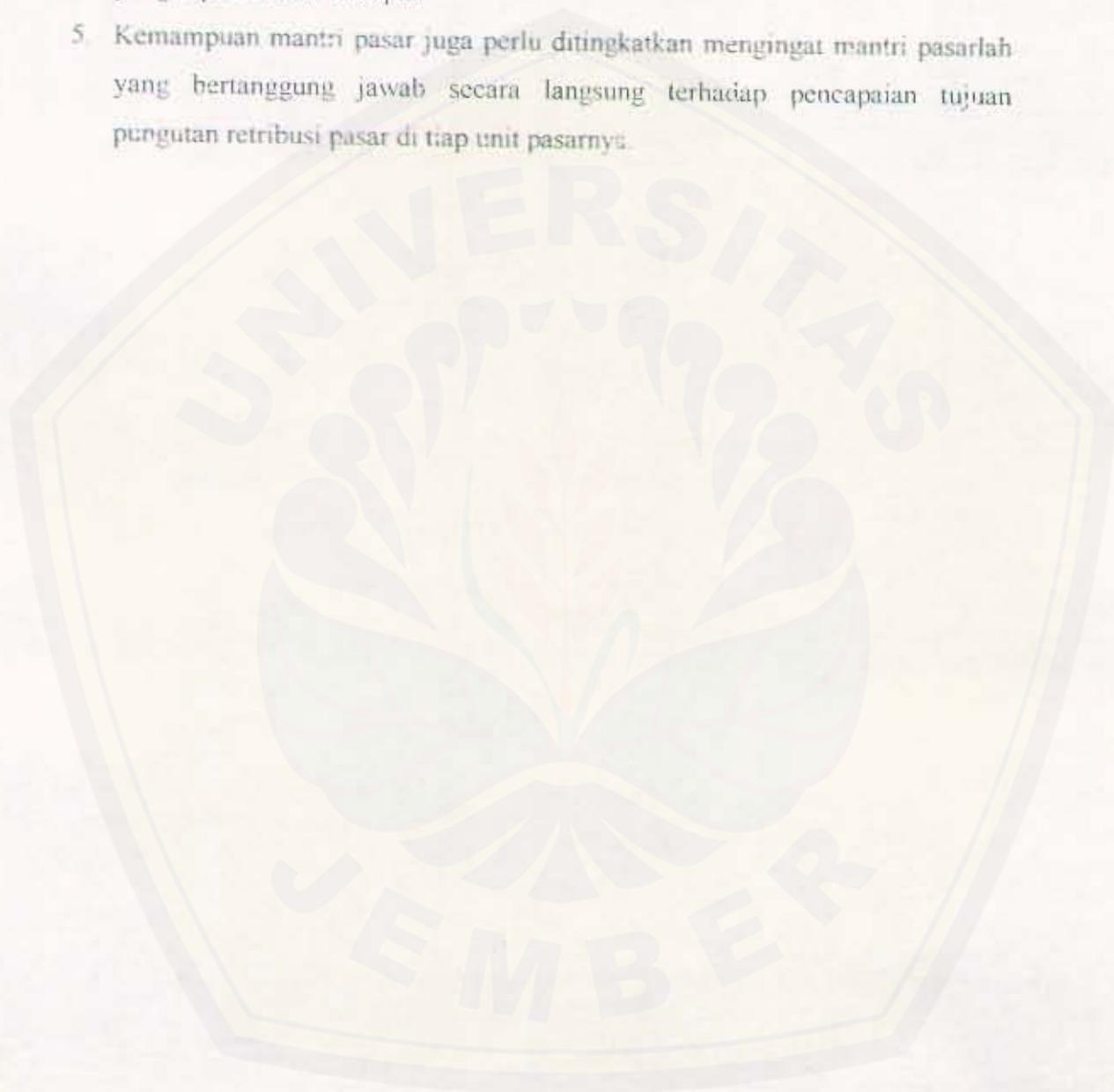
5.2 Saran

Atas dasar masalah yang ditemukan dalam penelitian dapat disarankan sebagai berikut :

1. Strategi ekstensifikasi telah meningkatkan kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi di Dinas Pasar maka makin besar pula jumlah perhatian yang harus Dinas Pasar berikan untuk menghadapi masalah komunikasi, koordinasi dan kontrol. Disamping itu perlu juga ditingkatkan kegiatan intensifikasi dalam proses pungutan retribusi pasar berupa :
 - a. Penetapan wilayah pungutan, waktu pungutan dan nilai pungutan berdasarkan letak tempat usaha dan komoditi dagangan dilaksanakan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
 - b. Pelaksanaan sewa toko, ruko, lahan dan utilitas pelayanan km/wc dalam pasar tepat waktu dan sasaran dilakukan pada bulan Januari setiap tahunnya.
 - c. Penertiban dan penjaringan perijinan dilaksanakan pada bulan Juni setiap tahunnya.
 - d. Penjaringan tunggakan retribusi setiap tiga bulan, setiap tahunnya.
2. Perlu juga segera dibuat perda baru yang menggantikan Perda nomor 3 tahun 1995 agar sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.
3. Untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan pegawai yang berstatus rollstate perlu segera diadakan pelatihan khusus yang diberikan pada mereka

mengingat keberadaannya sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas mengelola pasar-pasar di Kabupaten Jember. Disamping itu perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai rollstate agar kinerja meningkat.

4. Perlu diupayakan tersedianya dana yang cukup agar usaha mewujudkan pasar yang representatif tercapai.
5. Kemampuan mantri pasar juga perlu ditingkatkan mengingat mantri pasarlah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pencapaian tujuan pungutan retribusi pasar di tiap unit pasarnya.



pository Universitas

a

1999.

Tentang

1997,

Mutiara

enerbit

8, P.T.

Press

id II :

sertasi,

kan ke

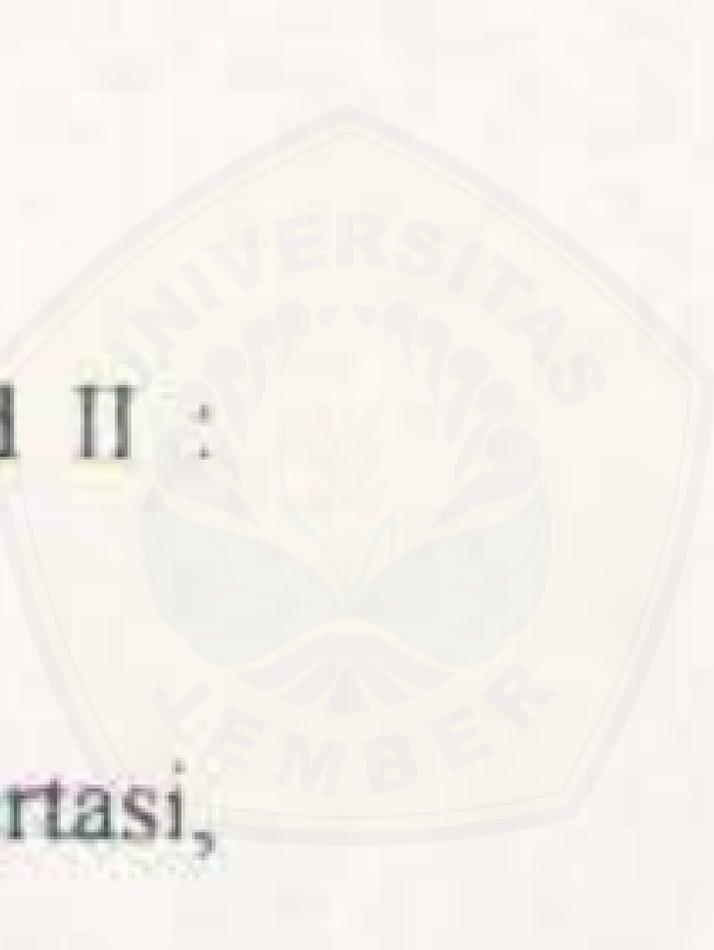
Jakarta

1998,

imedia

a

onesia,



- m, David dan Ted Gaebler, *Reinventing Government*, seri umum, 1992. Pustaka Binaan Presindo. Jakarta.
- ce, Jhon.A, dan Richard Robinson. *Manajemen Strategik Jilid I*, 1997, Binarupa Aksara, Jakarta
- ins, Stephen.P, *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*, Edisi 3, 1994, Penerbit Arcan, Jakarta
- u, J, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, 2002, Penerbit P.T. Grasindo, Jakarta
- o, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, 1990, Rineka Cipta, Jakarta
- rimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*, 1995, LP3ES, Jakarta
- sono, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, 1996, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- idha, Daan, *Masalah Otonomi serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 1981, Sinar Baru, Bandung
- brata, *Metode Penelitian*, 1991, Ghalia Indonesia, Jakarta
- owinoto, Mulyarto. *Tahap-tahap Penelitian Sosial*, 1981, UGM, Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah bentuk kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan ?
2. Kegiatan ekstensifikasi apa sajakah yang direncanakan dan yang telah terealisasi ?
3. Apakah ada peyesuaian struktur dari Dinas Pasar berkaitan dengan strategi ekstensifikasi tersebut ?

Kompleksitas

1. Bagaimanakah pembagian kerja yang diterapkan dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar ?
2. Apa yang menjadi dasar dalam departementalisasi ?
3. Berapakah jumlah tingkatan hirarki yang ada ?
4. Berapakah banyaknya jumlah bawahan untuk masing-masing satuan organisasi yang dapat diatur secara efektif ?
5. Bagaimanakah penyebaran wilayah kerja, kantor dan personalia dalam melakukan pengelolaan pasar ?
6. Apakah ada penambahan jumlah unit pasar yang dikelola sehubungan dengan strategi ekstensifikasi ?

Formalisasi

1. Teknik-teknik apa sajakah yang dipakai Dinas Pasar dalam menstandarisasi para pegawainya ?
2. Apakah ada perubahan dari teknik-teknik formalisasi berkaitan dengan strategi ekstensifikasi yang dilakukan ?
3. Sesuikah standarisasi pegawai dengan upaya pencapaian tujuan organisasi ?

Sentralisasi

1. Keputusan strategis apa sajakah yang berada pada level Dinas Pasar dan pada level unit kerja ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pengendalian yang dilakukan terhadap keberhasilan dari strategi ekstensifikasi tersebut ?

Alokasi Kebutuhan Biaya	Tahun 2001												Tahun 2002												Tahun 2003												Tahun 2004												Tahun 2005														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
675.000.000	X																																																														
86.250.000	X																																																														
15.000.000																																																															
20.000.000																																																															
15.000.000																																																															
15.000.000																																																															
15.000.000																																																															
250.000.000																																																															
400.000.000																																																															
350.000.000																																																															
700.000.000																																																															
350.000.000																																																															
100.000.000																																																															
150.000.000																																																															
250.000.000																																																															
450.000.000																																																															
500.000.000																																																															



piran 2 Target dan Realisasi Target Perolehan Penerimaan Retribusi Pasar untuk Jenis Pungutan Pasar Umum di Tiap Unit Pasar di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000 dan 2001.

No	Unit Kerja Pasar Umum	Tahun anggaran 2000		Tahun Anggaran 2001	
		Target (000)	Realisasi (000)	Target (000)	Realisasi (000)
1	Tanjung	340.000	341.398	500.000	503.683
2	Balung	89.750	91.338	135.000	135.688
3	Kalisat	78.650	78.901	116.000	117.150
4	Ambulu	71.300	73.931	106.000	113.831
5	Rambipuji	71.750	72.503	107.000	108.911
6	Kencong	61.400	61.222	91.000	95.123
7	Tanggul	62.350	62.728	94.000	94.989
8	Gebang	44.600	45.519	70.000	71.027
9	Bangsalsari	30.250	30.405	44.000	44.350
10	Puger	27.250	29.227	41.000	43.870
11	Manggisan	19.050	19.332	28.000	28.504
12	Jenggawah	25.000	25.171	37.000	38.346
13	Johar	20.920	22.610	33.000	33.305
14	Sukowono	25.400	25.689	38.000	38.386
15	Mangli	18.750	19.033	28.000	28.727
16	Umbulsari	18.900	19.016	28.000	28.445
17	Tegalboto	18.120	18.245	27.000	31.826
18	Mayang	18.000	18.856	27.000	27.255
19	Gladakmerah	15.500	15.631	22.000	22.234
20	Kreyongan	9.500	9.784	15.000	15.338
21	Menampu	8.700	8.740	14.000	14.317
22	Sempolan	7.350	7.585	11.000	11.281
23	Petung	4.260	4.263	6.000	6.017
24	Patrang	4.230	4.130	6.000	6.000
25	Sukorejo	3.950	4.159	6.000	6.319
26	Sukosari	1.450	1.537	2.000	2.048
27	Tegalbesar	3.550	3.730	6.000	7.984
28	Burung	2.500	2.572	4.000	4.160

er : Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun 2001

Lampiran 3 Tarif retribusi pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember

Klasifikasi dan Golongan	Retribusi pasar sehari/M ²				
	LTU 1 (Rp)	LTU 2 (Rp)	LTU 3 (Rp)	LTU 4 (Rp)	LTU 5 (Rp)
KELAS UTAMA					
GOLONGAN A	110,00	80,00	55,00	45,00	30,00
GOLONGAN B	80,00	60,00	50,00	45,00	30,00
GOLONGAN C	65,00	55,00	45,00	40,00	30,00
GOLONGAN D	55,00	50,00	40,00	35,00	30,00
KELAS I					
GOLONGAN A	85,00	60,00	45,00	40,00	30,00
GOLONGAN B	70,00	55,00	45,00	35,00	30,00
GOLONGAN C	55,00	45,00	40,00	35,00	30,00
GOLONGAN D	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00
KELAS II					
GOLONGAN A	50,00	45,00	35,00	30,00	25,00
GOLONGAN B	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
GOLONGAN C	35,00	35,00	30,00	25,00	20,00
GOLONGAN D	30,00	30,00	25,00	20,00	15,00
KELAS III					
GOLONGAN A	45,00	35,00	30,00	25,00	20,00
GOLONGAN B	35,00	30,00	25,00	20,00	20,00
GOLONGAN C	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
GOLONGAN D	25,00	25,00	20,00	20,00	15,00

Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember 2002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Telepon (0331) 337818, Jember (68118)
E-mail : lemlit unej @ jember. Telkom.net.id

Nomor : 141/J25.3.1/PL.5/2002
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan
Penelitian

20 Februari 2002

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Pemerintah Kabupaten Jember
di -

JEMBER.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 0479/J25.1.2/PL.5/2002 tanggal 16 Pebruari 2002, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama/NIM : JOKO WIYONO / 96-1122
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Administrasi Negara
Alamat : Beji, Pedan, Klaten, Jawa Tengah.
Judul Penelitian : Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar Dalam
Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Melalui Kebijakan Pembangunan Pasar Baru.
Lokasi : Dinas Pasar Kabupaten Jember.
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



Ketua,

[Signature]
DR. Ir. T. Sutikto, MSc.
NIP. 131 131 022

Embusan Kepada Yth. :

Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Mahasiswa ybs.
Arsip.



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Letjen. S. Parman 89 Telp. 337853 Jember

Jember, 26 Pebruari 2002.

mor : 072/243/436.46/2002 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pasar
fat : Penting Kab. Jember
mpiran : 1 (satu) berkas. di -
rihal : Ijin Penelitian Jember

Memperhatikan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember Tanggal 20 Pebruari 2001 Nomor : 141/J.25.3.1/PL.5/2002, Perihal Permohonan Melaksanakan Ijin Penelitian.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan penelitian di maksud, dimohon kepada saudara untuk dapatnya memberikan bantuan berupa data/keterangan seperlunya kepada :

N a m a : JOKO WIYONO / 96-1122
Alamat : BEJI, PEDAN, KLATEN, JAWA TENGAH
Pekerjaan : MHS. FAK. SOSPOL UNIV. JEMBER
Keperluan : PENELITIAN
J u d u l : EKSTENSIFIKASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR BARU.
W a k t u : TGL. 20 PEBRUARI 2002 S/D 20 APRIL 2002.
Peserta : -

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
KABUPATEN JEMBER

ajian Strategis dan HAM



Drs. SANTIDJAJA SOEJOETI

Penata TK I
NIP. 130 805 317

MBUSAN : Kepada Yth,

dr. Rektor Univ. Jember;
dr. Mahasiswa ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PASAR

JL. H. SAMANHUDI NO. 442 TELP. 481196
JEMBER 68131 / 68137

SURAT KETERANGAN

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linma tanggal 26 Pebruari 2002 Nomor : 072/243/436.46/2002 perih tersebut dipokok surat, diberitahukan bahwa :

N a m a : JOKO WIYONO / 96-1122
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah melakukan penelitian di Instansi kami terhitung mula tanggal : 20 Pebruari 2002 s/d 20 April 2002

Demikian untuk menjadikan maklum.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DINAS PASAR KAB. JEMBER
DINAS PASAR
* JEMBER *
Drs. SUTJIPTO
Pembina Tk.I
NIP. 010 174 797

embusan kepada Yth :
dr. Peneliti/Mahasiswa
bersangkutan

UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER